

2023

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Jl. Lingkar Selatan, Malangan, Giwangan, Umbulharjo
Yogyakarta 55361 Telp/Fax (0274) 4396955
HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id
EMAIL: pertanianpangan@jogjakota.go.id
WEBSITE: pertanian.jogjakota.go.id

PENGANTAR



Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan kewajiban bagi setiap perangkat daerah berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah, dengan memperhatikan keberadaan, kualitas, dan kebermanfaatan dokumen LKIP berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LKIP merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta dalam penyelenggaraan urusan pangan, kelautan dan perikanan serta pertanian berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 serta Perjanjian Kinerja Tahun 2023, sebagai bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Laporan evaluasi kinerja ini telah diupayakan sebaik mungkin dalam penyajiannya namun demikian kami menyadari masih dijumpai tantangan dan masalah dalam pencapaian target kinerja. Diharapkan dengan penyajian LKIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Yogyakarta, 31 Januari 2024
Pt. Kepala Dinas

Drs. Kadri Renggono, M.Si
NIP. 196611271993031006

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2023 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas Pertanian dan Pangan yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2017-2022. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Isu Strategis yang melingkupi Dinas Pertanian dan Pangan adalah :

- a. Perbaikan pola konsumsi pangan masyarakat menuju pola pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) perlu terus dilakukan dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan dan ketersediaan pangan di masyarakat.
- b. Pengawasan mutu dan keamanan pangan hasil pertanian, peternakan dan perikanan perlu ditingkatkan baik dari sisi kualitas maupun kuantitas pengawasannya, untuk menjamin mutu pangan yang dikonsumsi masyarakat.
- c. Meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit yang bersumber dari hewan (zoonosis) dan penyakit hewan menular strategis.
- d. Pengembangan Dinas Pertanian dan Pangan sebagai pusat layanan perbenihan tanaman pisang dan hortikultura bersertifikat, edukasi dan penelitian sekaligus penyedia sarana wisata agrobisnis.
- e. Peningkatan kapasitas dan kelembagaan kelompok pertanian, peternakan dan perikanan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan kelompok.

Melalui sinkronisasi Misi dan Sasaran Nasional, Propinsi maupun Kota, Dinas Pertanian dan Pangan turut berperan dan memberikan kontribusi dalam pelaksanaan program dan kegiatannya untuk mendukung tercapainya **Misi 3 yaitu : Mewujudkan Daya Saing Kota Yogyakarta yang Unggul dalam Pelayanan Jasa**, pada **Tujuan ke 3 : Menurunnya Ketimpangan Pendapatan antar Penduduk**, untuk mencapai **Sasaran Daerah 4 yaitu : Menurunnya Kemiskinan Masyarakat**, dengan Indikator Kinerja Sasaran Daerah : Persentase Penduduk Miskin.

LKIP DPP 2023

PERENCANAAN KINERJA

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta selama 4 (empat) tahun anggaran yang dituangkan dalam Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, dan Renstra DPP Tahun 2023-2026 melalui Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 adalah Meningkatkan Angka Konsumsi Pangan dan Meningkatkan Reformasi Birokrasi.

Tabel 2.2. IKU/Sasaran Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2023-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Data Awal	Target tahunan			
					2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Angka Konsumsi Pangan	Angka Konsumsi Pangan	poin	89.7	90.4	91.2	92.1	93.1
2	Meningkatnya Reformasi Birokrasi	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	poin	80	80.5	81	81.5	82

Selanjutnya mendasarkan pada rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat Kota Yogyakarta sebagai tindak lanjut dari Laporan Hasil Evaluasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023, maka Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta melakukan reviu dan perbaikan atas kinerja perangkat daerah, yang ditetapkan melalui Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 261 Tahun 2023 tentang Penetapan Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

Tabel 2.3. IKU/Sasaran Strategis Perbaikan Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2023-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Data Awal	Target tahunan			
					2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Angka Konsumsi Pangan	Angka Konsumsi Pangan	poin	89.7	90.4	91.2	92.1	93.1
2	Meningkatnya Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	%	88.00	89.47	90.94	92.41	93.88
3	Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan	Angka Konsumsi Ikan	Kg/ Kapita/ Tahun	35.43	35.46	35.49	35.52	35.55
4	Meningkatnya Persentase Kenaikan Kelas Kelompok Tani	Persentase Kenaikan Kelas Kelompok Tani	%	2.26	3.99	4.27	4.55	4.81
5	Meningkatnya Persentase Penurunan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis	Persentase Penurunan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis	%	-11.29	-11.82	-12.37	-12.94	-13.51
6	Meningkatnya Reformasi Birokrasi	Kategori Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	nilai	BB	A	A	A	A

LKIP DPP 2023

ANGGARAN

Pada Tahun Anggaran 2023 Dinas Pertanian dan Pangan melaksanakan kegiatan dengan :

1. Anggaran Murni : Rp. 17.608.093.176,-
 - Belanja Operasi : Rp. 17.436.143.176,-
 - Belanja Modal : Rp. 171.950.000,-
2. Anggaran Perubahan : Rp. 17.608.093.176,-
 - Belanja Operasi : Rp. 17.436.143.176,-
 - Belanja Modal : Rp. 171.950.000,-

Uraian	Target (Rp.)	Prosentase
Belanja Operasi	17.436.143.176	99.02%
- Belanja Pegawai	9.331.981.195	53.00%
- Belanja Barang Jasa	8.104.161.981	46.03%
Belanja Modal	171.950.000	0.98%
- BM Peralatan dan Mesin	171.950.000	0.98%
Jumlah	16.941.087.882	100%

AKUNTABILITAS KINERJA

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian	Predikat Capaian
1.	Meningkatnya Angka Konsumsi Pangan	Angka Konsumsi Pangan	poin	90.4	91.2	100.88%	Tercapai
2.	Meningkatnya Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	%	89.47	93.41	104.40%	Tercapai
3.	Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan	Angka Konsumsi Ikan	Kg/Kapita/Tahun	35.46	35.89	101.21%	Tercapai
4.	Meningkatnya Persentase Kenaikan Kelas Kelompok Tani	Persentase Kenaikan Kelas Kelompok Tani	%	3.99	5.80	145.36%	Tercapai
5.	Meningkatnya Persentase Penurunan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis	Persentase Penurunan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis	%	-11.82	-68.18	576.82%	Tercapai
6.	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Pertanian dan Pangan	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	nilai	A	A	100.00%	Tercapai

LKIP DPP 2023

Dinas Pertanian dan Pangan melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan tahun 2023 yang telah disepakati sesuai Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian setiap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2023 dengan realisasi capaian kerjanya. Pencapaian tujuan digunakan untuk melihat sejauh mana capaian pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target akhir Renstra. Hal ini digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap indikator kinerja maupun target Renstra, apakah masih relevan atau perlu dilakukan reviu.

Evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran strategis Dinas Pertanian dan Pangan dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Dari 6 indikator kinerja Sasaran Strategis seluruhnya memperoleh predikat **tercapai** dengan persentase capaian diatas 100.00%.

ANALISIS EFISIENSI SUMBER DAYA

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan cara membandingkan persentase capaian kinerja terhadap persentase capaian atau penyerapan anggaran. Penggunaan sumber daya akan dikatakan efisien apabila persentase capaian kinerja menunjukkan hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan persentase realisasi keuangan atau penyerapan anggaran.

No	Sasaran Strategis	Kinerja					Program Pendukung	Kinerja	Anggaran		
		Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	% capaian 2023			Indikator Kinerja	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Angka Konsumsi Pangan	Angka Konsumsi Pangan	poin	90.4	91.2	100.88%	Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Peningkatan persentase kawasan yang dikembangkan menjadi kawasan pangan lestari	609,642,000	607,832,000	99.70%
							Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Angka Ketersediaan Energi	574,063,108	573,531,500	99.91%
								Peningkatan persentase pemenuhan cadangan pangan Pemerintah Daerah	471,762,000	471,114,650	99.86%
							Penanganan Kerawanan Pangan	Penurunan wilayah rawan pangan prioritas 2	94,691,336	94,475,500	99.77%
2	Meningkatnya Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	89.47	93.41	104.40%	Pengawasan Keamanan Pangan	Peningkatan Persentase pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan yang diawasi	251,747,220	248,235,000	98.60%

LKIP DPP 2023

							Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Peningkatan persentase pelaku usaha pangan asal hewan dan perikanan yang diawasi	716,373,430	688,627,150	96.13%
3	Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan	Angka konsumsi ikan	Kg/ka pita/ta hun	35.46	35.89	101.21%	Pengelolaan Perikanan Budidaya	Peningkatan Persentase kelompok pembudidaya ikan yang berizin	855,289,168	853,161,300	99.75%
							Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase pengolah dan pemasar hasil perikanan yang berizin	127,247,500	127,008,500	99.81%
4	Meningkatnya Persentase Kenaikan Kelas Kelompok Tani	Persentase kenaikan kelas kelompok tani	%	3.99	5.80	145.36%	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase petani tanaman pangan yang telah memenuhi prosedur penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida sesuai aturan	11,712,700	11,144,390	95.15%
								Peningkatan persentase varietas tanaman buah yang telah bersertifikat	1,019,001,300	1,015,269,600	99.63%
							Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Peningkatan jumlah prasarana pertanian yang dapat beroperasi dengan baik sesuai fungsinya	69,845,000	69,229,900	99.12%
							Penyuluhan Pertanian	Cakupan bina kelompok tani	813,294,500	808,762,043	99.44%
5	Meningkatnya Persentase Penurunan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis	Persentase penurunan jumlah kasus penyakit hewan menular strategis	%	-11.82	-68.18	576.82%	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Peningkatan persentase Pengecur Obat Hewan yang terbina dan terawasi	15,821,320	15,427,700	97.51%
							Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Peningkatan persentase unit usaha bidang kesehatan hewan yang terbina dan terawasi	744,701,100	742,428,350	99.69%
							Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase zoonosis prioritas yang terkendali	150,080,575	149,959,775	99.92%
6	Meningkatnya Reformasi Birokrasi	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	nilai	A	A	100%	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan	12,500,010,117	11,870,451,046	94.96%

Dapat dilihat dari Tabel di atas bahwa persentase kinerja sasaran strategis seluruhnya dapat tercapai lebih besar dari persentase capaian kinerja anggaran, yang berarti dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran dalam pencapaian sasaran strategis dan IKU Dinas seluruhnya dapat tercapai secara **EFISIEN**.

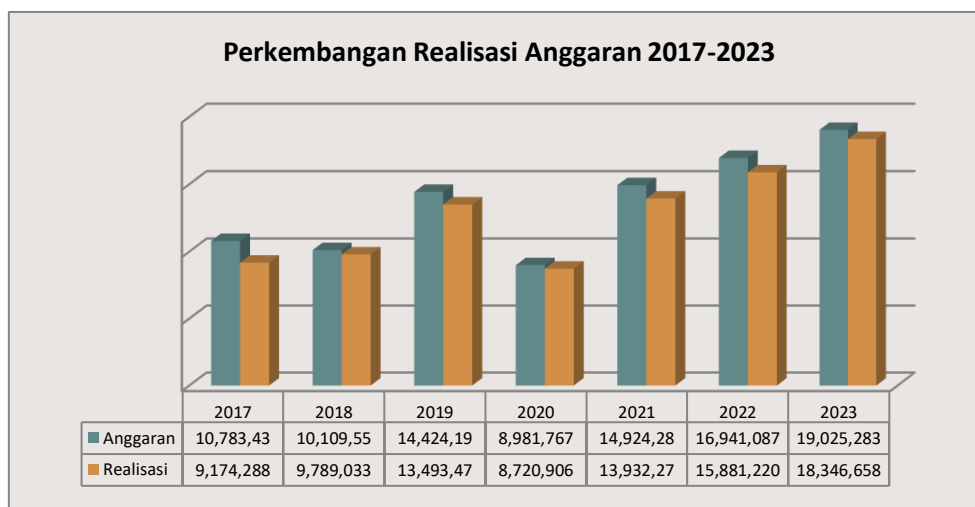
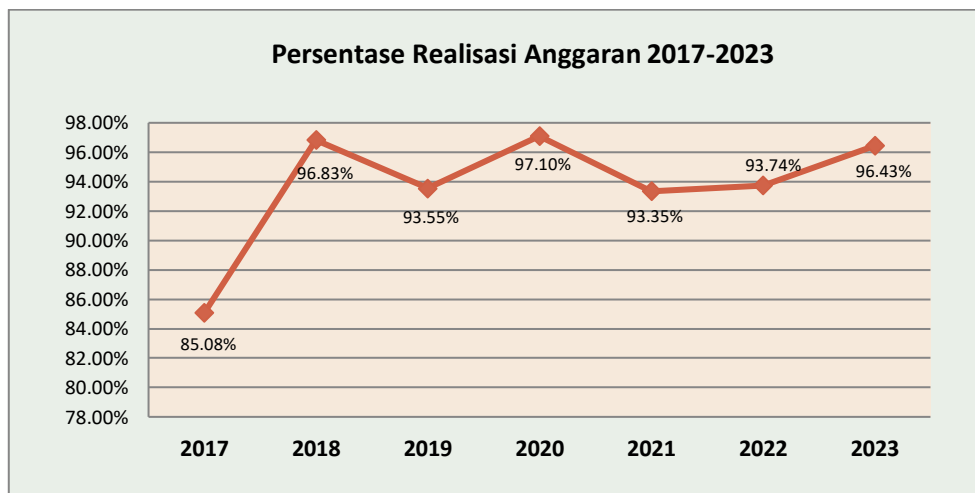
LKIP DPP 2023

REALISASI ANGGARAN

Jumlah anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan seluruh program dan kegiatan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta berdasarkan anggaran perubahan Tahun 2023 beserta realisasi keuangannya adalah :

Uraian	Anggaran (Rp.)	Prosentase	Realisasi (Rp.)	Prosentase
Belanja Operasi	18,574,002,074	97.63%	15,443,515,601	97.24%
- Belanja Pegawai	9,839,399,425	51.72%	9,228,389,269	58.11%
- Belanja Barang Jasa	8,734,602,649	45.91%	8,680,563,935	54.66%
Belanja Modal	451,280,300	2.37%	437,705,200	2.76%
- BM Peralatan dan Mesin	316,280,300	1.66%	303,950,200	1.91%
- BM Gedung dan Bangunan	135,000,000	0.71%	133,755,000	0.84%
Jumlah	19,025,282,374	100.00%	15,881,220,801	100.00%
			Persentase	96.43%

Persentase realisasi keuangan Tahun 2023 secara keseluruhan mencapai 96.43%, meningkat apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 93,74%.



LKIP DPP 2023

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada sasaran Dinas Pertanian dan Pangan menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Pertanian dan Pangan ke depan, sebagai berikut:

1. Peningkatan jumlah cadangan pangan daerah secara kontinyu guna menjaga pasokan beras yang stabil antar waktu, memenuhi kebutuhan beras masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan kerawanan pasca bencana, instrumen stabilisasi harga beras di pasaran, dan meningkatkan akses beras pada masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.
2. Pemanfaatan pekarangan serta pengembangan olahan pangan lokal dalam rangka diversifikasi pangan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan ketahanan pangan keluarga dan masyarakat guna mendukung pemantapan ketahanan pangan.
3. Perbaikan pola konsumsi pangan untuk meningkatkan skor Pola Pangan Harapan.
4. Peningkatan pengawasan terhadap mutu pangan baik yang berasal dari pertanian, hewan maupun perikanan untuk meningkatkan mutu pangan yang beredar di Kota Yogyakarta, yang dilaksanakan secara intensif dan berkelanjutan melalui pembentukan tim pemantauan pengawasan mutu pangan lintas instansi (satpol PP, Dinas Perdagangan).
5. Penguatan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha pertanian, peternakan dan perikanan untuk mewujudkan usaha tani/ternak/ikan yang berkelanjutan.
6. Meningkatkan pendampingan kelompok tani oleh penyuluh dengan melaksanakan bimbingan pemeliharaan, perawatan, mengendalikan hama penyakit, serta memotivasi kelompok untuk dapat mengembangkan kelompoknya dan berani bersaing dengan petani yang lain dengan menyelenggarakan evaluasi kelompok tani, penilaian kelas kelompok serta lomba dan kontes tanaman hias.
7. Meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit hewan menular strategis dan penyakit hewan zoonosis, serta meningkatkan layanan kesehatan hewan ternak maupun hewan kesayangan.

DAFTAR ISI

PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud dan Tujuan	1
1.3. Gambaran Umum Organisasi Perangkat Daerah	2
1.4. Kepegawaian	2
1.5. Sarana dan Prasarana	3
1.6. Isu-isu Strategis	4
1.7. Sistematika LKIP	5
BAB II PERENCANAAN	
1.1. Perencanaan Strategis	6
1.2. Perjanjian Kinerja 2021	13
1.3. Rencana Anggaran Tahun 2021	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Capaian Kinerja Organisasi Tahun 2021	16
3.2. Realisasi Anggaran	72
BAB V PENUTUP	77
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah.

Laporan Kinerja disusun sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan yang harus disusun pada setiap akhir tahun anggaran. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*).

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2023 diharapkan dapat :

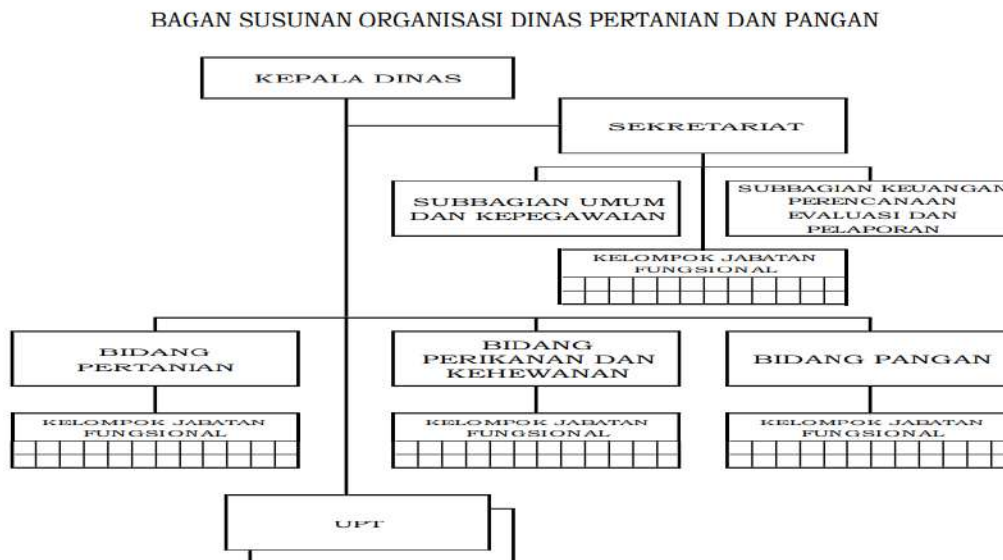
1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Pertanian dan Pangan.
2. Mendorong Dinas Pertanian dan Pangan didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Pertanian dan Pangan untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Pertanian dan Pangan di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

LKIP DPP 2023

1.3 GAMBARAN UMUM ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 37 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah, Dinas Pertanian dan Pangan mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pertanian, bidang pangan, dan bidang kelautan dan perikanan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut Dinas mempunyai fungsi :

- Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian, pangan, dan perikanan;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian, pangan, dan perikanan;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pertanian, pangan, dan perikanan;
- Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pertanian, pangan, dan perikanan;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Pangan

1.4 KEPEGAWAIAN

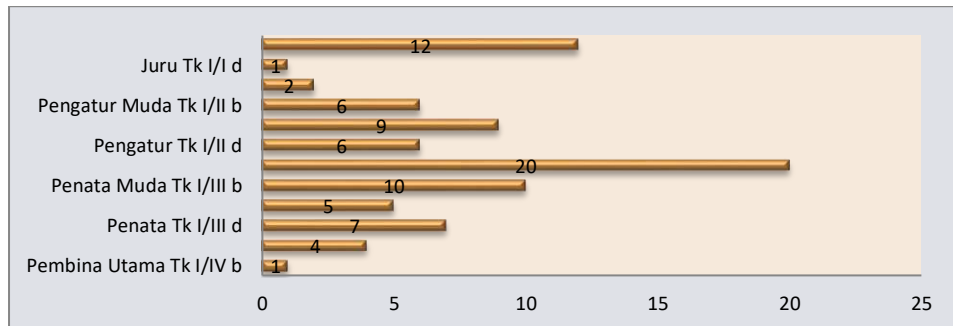
Dalam menjalankan kegiatan administrasi dan operasionalnya, per Desember 2023 dinas didukung oleh pegawai sebanyak 71 orang PNS, 12 orang PPPK, 33 orang tenaga jasa lainnya orang perseorangan dan 29 tenaga outsourcing, dengan komposisi per bidang sebagai berikut :

No.	Bidang	PNS	PPPK	NON ASN	Jumlah
1	Sekretariat	16	-	2	18
2	Bidang Pangan	10	5	10	25
3	Bidang Pertanian	19	7	26	52
4	Bidang Kehewananan dan Perikanan	25	-	24	52
Total		70	12	62	147

Sumber Data : Sub Bag Umum & Kepegawaian, Des 2023

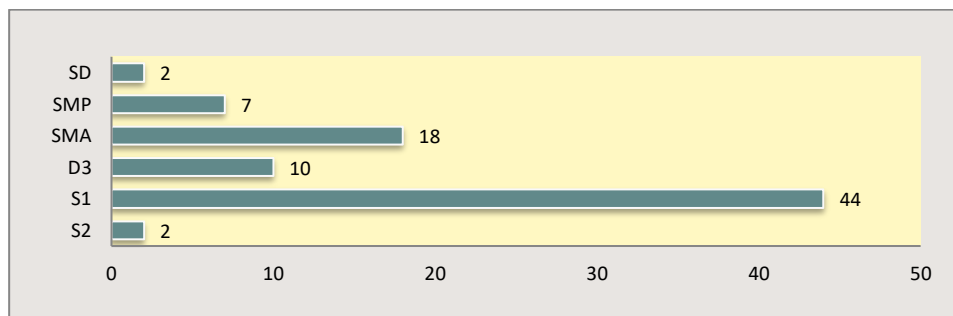
LKIP DPP 2023

Berdasarkan pangkat dan golongan, ASN Dinas Pertanian dan Pangan memiliki komposisi sebagai berikut :



Sumber Data : Sub Bag Umum dan Kepegawaian, Des 2023

Sedangkan berdasarkan tingkat pendidikannya, ASN Dinas Pertanian dan Pangan memiliki komposisi sebagai berikut :



Sumber Data : Sub Bag Umum & Kepegawaian, Des 2023

1.5 SARANA DAN PRASARANA

Dalam rangka menyelenggarakan operasional pelaksanaan kegiatan, Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta memiliki dukungan sarana dan prasarana perkantoran yang meliputi :

Tabel 1.5. Sarana dan Prasarana Perkantoran

No	Jenis Aset	Luas/Jumlah Eksisting
I	TANAH	
	Tanah Darat	19.525 M2
	Tanah Sawah	18.145 M2
	Tanah Bangunan Kantor	400 M2
	Tanah Kolam Air Tawar	10.000 M2
II	BANGUNAN	
	Gedung Kantor Dinas	400 M2
	RPH	7.811 M2
	Poliklinik Hewan	150 M2
	Balai Penyuluhan Pertanian	250 M2

No	Jenis Aset	Luas/Jumlah Eksisting
	BBI Mendungan	3.000 M2
	BBI Nitikan	12.589 M2
	Sub Raiser Ikan Hias	1.412 M2
III	KENDARAAN BERMOTOR	
	Kendaraan Roda 4	13 unit
	Kendaraan Roda 3	6 unit
	Kendaraan Roda 2	27 unit
IV	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	
	Alat besar	51 unit
	Alat bengkel dan alat ukur	17 unit
	Alat pertanian	177 unit
	Alat kantor dan rumahtangga	3.329 unit
	Alat studio, komunikasi dan pemancar	21 unit
	Alat kedokteran dan kesehatan	34 unit
	Alat laboratorium	118 unit
	Komputer dan laptop	117 unit
	Alat peraga	11 unit
	Bahan perpustakaan	381 unit

Sumber Data : Sub Bag Umum & Kepegawaian, Des 2023

1.6 ISU-ISU STRATEGIS

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukan dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Isu Strategis yang melingkupi Dinas Pertanian dan Pangan, antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Perbaikan pola konsumsi pangan masyarakat menuju pola pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) perlu terus dilakukan dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan dan ketersediaan pangan di masyarakat.
- b. Pengawasan mutu dan keamanan pangan hasil pertanian, peternakan dan perikanan perlu ditingkatkan baik dari sisi kualitas maupun kuantitas pengawasannya, untuk menjamin mutu pangan yang dikonsumsi masyarakat.
- c. Meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit yang bersumber dari hewan (zoonosis) dan penyakit hewan menular strategis.
- d. Pengembangan Dinas Pertanian dan Pangan sebagai pusat layanan perbenihan tanaman pisang dan hortikultura bersertifikat, edukasi dan penelitian sekaligus penyedia sarana wisata agrobisnis.
- e. Peningkatan kapasitas dan kelembagaan kelompok pertanian, peternakan dan perikanan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan kelompok.

LKIP DPP 2023

1.7 SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada bagian ini disajikan ringkasan dari Laporan Kinerja Dinas.

2. BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang latar belakang disusun LKIP, penjelasan umum tentang Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian dan Pangan, keadaan sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana, serta Sistematika penyusunan LKIP.

3. BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepada Daerah.

4. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi. Disajikan pula Inovasi yang telah dilakukan oleh Perangkat daerah.

5. BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

6. LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 PERENCANAAN STRATEGIS

Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak tahun 2023 sampai dengan tahun 2026, merupakan dokumen pedoman atau acuan pokok penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026.

Dari RPD Kota Yogyakarta selanjutnya dijabarkan menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2023 ditetapkan melalui Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023, dan Peraturan Walikota Nomor 57 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023.

Dengan mengacu pada dokumen RPD Kota Yogyakarta selanjutnya perangkat daerah menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 4 (empat) tahun yang ditetapkan melalui Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026, dan sebagai penjabaran dari RKPD Kota Yogyakarta Tahun 2023 maka perangkat daerah menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang ditetapkan melalui Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 73 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023.

Selanjutnya berdasarkan pada rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat Kota Yogyakarta sebagai tindak lanjut dari Laporan Hasil Evaluasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023, maka Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta melakukan reviu dan perbaikan atas kinerja perangkat daerah, yang ditetapkan melalui Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 261 Tahun 2023 tentang Penetapan Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

2.1.1 Visi Dan Misi Kepala Daerah

Mengingat periode RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 merupakan periode transisi dimana belum ada Kepala Daerah definitif yang terpilih, maka berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 visi RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026 mendasarkan pada visi misi RPJPD.

Tabel 2.1. Ringkasan Visi Misi RPD Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026

Visi Kota Yogyakarta	Misi Kota Yogyakarta	Tujuan Daerah	Sasaran Daerah	Indikator Kinerja
Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan Berkualitas, Pariwisata Berbasis Budaya dan Pusat Pelayanan Jasa, yang Berwawasan Lingkungan	1. Mempertahankan Predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pendidikan.	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah
	2. Mempertahankan Predikat Kota Yogyakarta sebagai Kota Pariwisata, Kota Budaya dan Kota Perjuangan.	Meningkatnya Kualitas Pariwisata	Meningkatnya Kualitas Pariwisata	Lama Tinggal Wisatawan
	3. Mewujudkan daya saing Kota Yogyakarta yang Unggul dalam Pelayanan Jasa.	Menurunnya Ketimpangan Pendapatan antar Penduduk	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi	Pertumbuhan Ekonomi
			Menurunnya Kemiskinan Masyarakat	Persentase Penduduk Miskin
	4. Mewujudkan Kota Yogyakarta yang Nyaman dan Ramah Lingkungan.	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Meningkatnya Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
	5. Mewujudkan masyarakat Kota Yogyakarta yang Bermoral, Beretika, Beradab dan Berbudaya.	Terwujudnya karakter masyarakat berdaya yang bermoral dan beretika dengan menerapkan nilai-nilai luhur dalam bermasyarakat	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Indeks Keberdayaan Masyarakat
	6. Mewujudkan Kota Yogyakarta yang good governance dan clean government, berkeadilan, demokratis dan berlandaskan hukum.	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota Yogyakarta	Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah				
7. Mewujudkan Kota Yogyakarta yang aman, tertib, bersatu dan damai.	Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Menurunnya Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat	Angka Kriminalitas	
			Jumlah Pelanggaran PERDA	

	8. Mewujudkan Pembangunan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas.	Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Meningkatnya Keterpaduan Pengembangan Infrastruktur Wilayah	Indeks Pengembangan Infrastruktur Wilayah
	9. Mewujudkan Kota Yogyakarta Sehat.	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup

Melalui sinkronisasi Misi dan Sasaran Nasional, Propinsi maupun Kota, Dinas Pertanian dan Pangan turut berperan dan memberikan kontribusi dalam pelaksanaan program dan kegiatannya untuk mendukung tercapainya **Misi 3 yaitu : Mewujudkan Daya Saing Kota Yogyakarta yang Unggul dalam Pelayanan Jasa**, pada **Tujuan ke 3 : Menurunnya Ketimpangan Pendapatan antar Penduduk**, untuk mencapai **Sasaran Daerah 4 yaitu : Menurunnya Kemiskinan Masyarakat**, dengan Indikator Kinerja Sasaran Daerah : Persentase Penduduk Miskin.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta selama 4 (empat) tahun anggaran yang dituangkan dalam Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026, dan Renstra DPP Tahun 2023-2026 melalui Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 adalah Meningkatkan Angka Konsumsi Pangan dan Meningkatkan Reformasi Birokrasi, dengan target tahunan sebagaimana Tabel di bawah ini.

Tabel 2.2. IKU/Sasaran Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2023-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Data Awal	Target tahunan			
					2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Angka Konsumsi Pangan	Angka Konsumsi Pangan	poin	89.7	90.4	91.2	92.1	93.1
2	Meningkatnya Reformasi Birokrasi	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	poin	80	80.5	81	81.5	82

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja dan sebagai tindak lanjut dari laporan hasil evaluasi terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun sebelumnya, maka melalui Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 261 Tahun 2023 tentang Penetapan Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, Dinas Pertanian dan Pangan melakukan evaluasi dan perbaikan kinerja terhadap indikator Sasaran Perangkat Daerah dan indikator Program, dengan target tahunan seperti Tabel berikut.

Tabel 2.3. IKU/Sasaran Strategis Perbaikan Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2023-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Data Awal	Target tahunan			
					2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya Angka Konsumsi Pangan	Angka Konsumsi Pangan	point	89.7	90.4	91.2	92.1	93.1
2	Meningkatnya Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	%	88.00	89.47	90.94	92.41	93.88
3	Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan	Angka Konsumsi Ikan	Kg/ Kapita/ Tahun	35.43	35.46	35.49	35.52	35.55
4	Meningkatnya Persentase Kenaikan Kelas Kelompok Tani	Persentase Kenaikan Kelas Kelompok Tani	%	2.26	3.99	4.27	4.55	4.81
5	Meningkatnya Persentase Penurunan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis	Persentase Penurunan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis	%	-11.29	-11.82	-12.37	-12.94	-13.51
6	Meningkatnya Reformasi Birokrasi	Kategori Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	nilai	BB	A	A	A	A

Dalam pengukuran kinerja dan evaluasi hasil kinerja yang akan disampaikan pada laporan ini nantinya akan berdasarkan pada IKU/Sasaran Strategis sesuai perbaikan kinerja, sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta (terlampir).

2.1.3 Strategi, Program dan Kegiatan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, Dinas Pertanian dan Pangan melaksanakan urusan, program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan nomenklatur pada Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021, yaitu :

- 1 (satu) Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar yaitu Urusan Pangan;
- 2 (dua) Urusan Pilihan yaitu Urusan Kelautan dan Perikanan serta Urusan Pertanian;
- 12 Program;
- 27 Kegiatan;
- 65 Sub Kegiatan.

Tabel 2.4. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023

NO.	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya
2	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan
			Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
			Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan
		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
			Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun		
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal		
3	Penanganan Kerawanan Pangan	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
4	Pengawasan Keamanan Pangan	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
			Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
5	Pengelolaan Perikanan Budidaya	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya
			Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
6	Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan

LKIP DPP 2023

		Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil
7	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman
		Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan
8	Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya
9	Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis
		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner
		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner
10	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis
11	Penyuluhan Pertanian	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
			Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa
			Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian
12	Penunjangn Urusan Pemerintah Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

LKIP DPP 2023

			Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
			Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD
			Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
		Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	
		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
		Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
			Administrasi Umum Perangkat Daerah
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

LKIP DPP 2023

			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

2.2 PERJANJIAN KINERJA 2023

Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Walikota Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Tabel 2.5. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 (Murni)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target 2023
1.	Meningkatnya Angka Konsumsi Pangan	Angka Konsumsi Pangan	poin	90.4
2.	Meningkatnya Reformasi Birokrasi	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	poin	80.5

Tabel 2.6. Perjanjian Kinerja Tahun 2023 (Perubahan)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target 2023
1.	Meningkatnya Angka Konsumsi Pangan	Angka Konsumsi Pangan	poin	90.4
2.	Meningkatnya Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	%	89.47
3.	Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan	Angka Konsumsi Ikan	Kg/Kapita/Tahun	35.46
4.	Meningkatnya Persentase Kenaikan Kelas Kelompok Tani	Persentase Kenaikan Kelas Kelompok Tani	%	3.99
5.	Meningkatnya Persentase Penurunan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis	Persentase Penurunan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis	%	-11.82
6.	Meningkatnya Reformasi Birokrasi	Hasil Penilaian Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	nilai	A

LKIP DPP 2023

2.3 RENCANA ANGGARAN TAHUN 2023

Pada Tahun Anggaran 2023 Dinas Pertanian dan Pangan melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp. 17.608.093.176,- dengan rincian Belanja Operasi Rp. 17.436.143.176,- dan Belanja Modal Rp171.950.000,- dan anggaran perubahan sebesar Rp. 17.608.093.176,- dengan rincian Belanja Operasi Rp. 17.436.143.176,- dan Belanja Modal Rp171.950.000,-

2.3.1 Target Belanja Perangkat Daerah

Tabel 2.7. Target Belanja APBD Perubahan Tahun 2023

Uraian	Target (Rp.)	Prosentase
Belanja Operasi	17.436.143.176	99.02%
- Belanja Pegawai	9.331.981.195	53.00%
- Belanja Barang Jasa	8.104.161.981	46.03%
Belanja Modal	171.950.000	0.98%
- BM Peralatan dan Mesin	171.950.000	0.98%
Jumlah	16.941.087.882	100%

2.3.2 Alokasi Anggaran Sasaran Strategis

Tabel 2.7. Anggaran Belanja Langsung untuk Mencapai Sasaran

No	Sasaran Strategis	Program Pendukung	Anggaran	Bidang
1	Meningkatnya Angka Konsumsi Pangan	Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	609.642.000	Pangan
		Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.045.825.108	Pangan
		Penanganan Kerawanan Pangan	94.691.336	Pangan
2	Meningkatnya Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	Pengawasan Keamanan Pangan	251.747.220	Pangan
		Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	716.373.430	Pangan
3	Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan	Pengelolaan Perikanan Budidaya	855.289.168	Perikanan dan Kehewan
		Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	127.247.500	Perikanan dan Kehewan
4	Meningkatnya Persentase Kenaikan Kelas Kelompok Tani	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	1.030.714.000	Pertanian
		Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	69.845.000	Pertanian

LKIP DPP 2023

No	Sasaran Strategis	Program Pendukung	Anggaran	Bidang
		Penyuluhan Pertanian	813.294.500	Pertanian
5	Meningkatnya Persentase Penurunan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis	Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	744.701.100	Perikanan dan Kehewan
		Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	15.821.320	Perikanan dan Kehewan
		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	150.080.575	Perikanan dan Kehewan
6	Meningkatnya Reformasi Birokrasi	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	12.500.010.117	Sekretariat

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2023

Dinas Pertanian dan Pangan melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian dan Pangan tahun 2023 yang telah disepakati sesuai Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian setiap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2023 dengan realisasi capaian kerjanya. Pencapaian tujuan digunakan untuk melihat sejauh mana capaian pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target akhir Renstra. Hal ini digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap indikator kinerja maupun target Renstra, apakah masih relevan atau perlu dilakukan revaluasi.

Pengukuran kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Pertanian dan Pangan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Pertanian dan Pangan beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

Tabel 3.1. Capaian Kinerja IKU/Sasaran Strategis Tahun 2023 sesuai Perbaikan Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian	Predikat Capaian
1.	Meningkatnya Angka Konsumsi Pangan	Angka Konsumsi Pangan	poin	90.4	91.2	100.88%	Tercapai
2.	Meningkatnya Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	%	89.47	93.41	104.40%	Tercapai
3.	Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan	Angka Konsumsi Ikan	Kg/Kapita/Tahun	35.46	35.89	101.21%	Tercapai
4.	Meningkatnya Persentase Kenaikan Kelas Kelompok Tani	Persentase Kenaikan Kelas Kelompok Tani	%	3.99	5.80	145.36%	Tercapai
5.	Meningkatnya Persentase Penurunan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis	Persentase Penurunan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis	%	-11.82	-68.18	576.82%	Tercapai
6.	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Pertanian dan Pangan	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	nilai	A	A	100.00%	Tercapai

Evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran strategis Dinas Pertanian dan Pangan dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Dari 6 indikator kinerja Sasaran Strategis seluruhnya memperoleh predikat **tercapai** dengan persentase capaian diatas 100.00%. Adapun evaluasi dan analisis capaian dari masing-masing sasaran strategis secara rinci akan diuraikan di bawah ini.

ANALISIS KINERJA SASARAN STRATEGIS 1 : MENINGKATNYA ANGKA KONSUMSI PANGAN

Tabel 3.2 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran Strategis 1

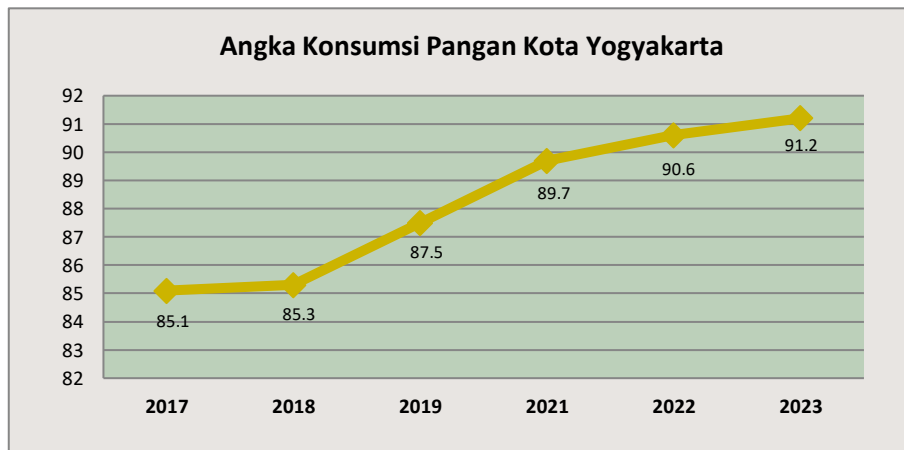
Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
Meningkatnya Angka Konsumsi Pangan	Angka Konsumsi Pangan	Angka Konsumsi Pangan dihitung terhadap konsumsi energi dan protein secara agregat menggunakan standar Angka Kecukupan Gizi (AKG) dan Angka Kecukupan Protein (AKP) hasil Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) XI tahun 2018. Hasil Perhitungan : skor angka konsumsi pangan sebesar 91,2 dari penjumlahan dari skor PPH untuk 9 jenis kelompok bahan makanan (padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak dan lemak, buah berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur dan buah serta lain-lain).

Tabel 3.3 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

Sasaran Strategis	Kinerja							
	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2022	Target 2023	Target Renstra 2026	Realisasi 2023	% capaian 2023	% capaian Renstra
Meningkatnya Angka Konsumsi Pangan	Angka Konsumsi Pangan	poin	89.7	90.4	93.1	91.2	100.88%	97.96%

3.1.1 Membandingkan terhadap capaian kinerja tahun lalu.

Sasaran Meningkatkan Angka Konsumsi Pangan baru digunakan sebagai indikator kinerja sasaran strategis pada periode Renstra 2023-2026, dimana pada tahun 2022 (periode Renstra 2017-2022) kinerja ini belum digunakan untuk pengukuran kinerja strategis perangkat daerah. Meskipun demikian Dinas Pertanian dan Pangan tetap melakukan pengambilan data secara mandiri untuk perhitungan Angka Konsumsi Pangan, sehingga perbandingan capaian kinerja dengan tahun sebelumnya dapat terpenuhi. Semenjak tahun 2017 Angka Konsumsi Pangan senantiasa mengalami peningkatan. Sebagai catatan pada Tahun 2020 tidak tersedia data disebabkan karena terjadinya wabah Covid-9 yang melanda pada saat itu tidak memungkinkan pengambilan data.



3.1.2 Membandingkan terhadap target capaian jangka menengah.

Apabila dilihat pada Tabel 3.3 di atas, maka target akhir Renstra pada tahun 2026 untuk indikator kinerja Sasaran Strategis Angka Konsumsi Pangan ditetapkan pada 93,1 poin, dengan demikian capaian kinerja pada tahun 2023 ini telah mencapai 97,96% terhadap target. Kondisi capaian ini berada dalam keadaan yang optimis untuk dapat tercapai pada akhir periode Renstra 2023-2026.

3.1.3 Membandingkan terhadap target nasional.

Indikator Sasaran Strategis Angka Konsumsi Pangan tidak dapat diperbandingkan terhadap target Nasional, karena secara nasional indikator kinerja yang digunakan adalah skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang diperoleh dari hasil survei Susenas, sedangkan Angka Konsumsi Pangan diperoleh dari hasil survei secara mandiri yang dilakukan oleh Dinas

Pertanian dan Pangan. Terdapat perbedaan dalam metode survei antara PPH dengan Angka Konsumsi Pangan, dimana PPH lebih mendasarkan pada sisi ketersediaan pangan untuk konsumsi pangan masyarakat, sedangkan Angka Konsumsi Pangan menghitung jumlah dan jenis bahan pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat.

3.1.4 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Faktor – faktor yang menunjang keberhasilan tercapainya target indikator kinerja sasaran strategis Angka Konsumsi Pangan ini diantaranya adalah karena masyarakat sangat kooperatif dalam melakukan wawancara pada saat survei konsumsi pangan untuk perhitungan angka konsumsi pangan. Disamping itu juga terdapat peningkatan konsumsi pangan dari 9 kelompok pangan yaitu padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak/lemak, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur/buah dan lain-lain (aneka bumbu dan bahan minuman), berdasarkan hasil survei secara mandiri. Selain itu pengembangan pangan lokal melalui gerakan diversifikasi pangan turut mendukung ketersediaan aneka ragam bahan pangan yang dapat dikonsumsi masyarakat dalam rangka ketahanan pangan.

Adapun faktor-faktor yang menghambat keberhasilan tercapainya target indikator kinerja sasaran strategis 1 adalah adanya perbedaan pada bulan pengambilan sampel dapat berpengaruh pada konsumsi masyarakat yang diwawancarai, sehingga bulan yang dipilih bukan saat bulan puasa atau mendekati HBKN, dan adanya keterbatasan kader Posyandu dan data untuk analisis pemanfaatan pangan tidak selalu update.

Upaya solusi yang dilakukan adalah dengan meningkatkan komunikasi, edukasi dan informasi kepada masyarakat mengenai keberagaman pangan terutama pangan lokal yang dapat dikonsumsi, serta dengan terus meningkatkan koordinasi bersama OPD terkait, melibatkan kader kesehatan dalam kegiatan pertanian dan pangan seperti sosialisasi B2SA, Gempal (Gerakan Pangan Lokal), Gembrot (Gerakan Mengonsumsi Protein) maupun dengan memasyarakatkan gerakan Jogja Sadar Kalori.

3.1.5 Analisis Efisiensi penggunaan sumber daya

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan cara membandingkan persentase capaian kinerja terhadap persentase capaian atau penyerapan anggaran. Penggunaan sumber daya akan dikatakan efisien apabila persentase capaian kinerja menunjukkan hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan persentase realisasi keuangan atau penyerapan anggaran.

Tabel 3.4 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Kinerja						Anggaran		
	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2022	Target RKP 2023	Realisasi 2023	% capaian RKP 2023	Target	Realisasi	% capaian
Meningkatnya Angka Konsumsi Pangan	Angka Konsumsi Pangan	poin	89.7	90.4	91.2	100.88%	1,750,158,444	1,746,953,650	99.82%

Dari tabel di atas terlihat bahwa persentase kinerja sasaran strategis 1 terhadap target tahun 2023 sebesar 100,88% tercapai lebih besar dari persentase capaian kinerja anggaran 99.28%, yang berarti dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran dalam pencapaian sasaran strategis Meningkatkan Angka Konsumsi Pangan telah tercapai secara **EFISIEN**.

3.1.6 Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran Dinas.

Tabel 3.5 Capaian Kinerja Program yang Mendukung Sasaran Strategis 1

Program Pendukung	Kinerja						Anggaran		
	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	% capaian 2023	Target	Realisasi	% capaian
Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Peningkatan persentase kawasan yang dikembangkan menjadi kawasan pangan lestari	%	26.27	28.88	28.88	100.00%	609,642,000	607,832,000	99.70%
Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Angka Ketersediaan Energi	kkal/kapita/hari	2607	2611.9	2745.31	105.11%	574,063,108	573,531,500	99.91%
	Peningkatan persentase pemenuhan cadangan pangan Pemerintah Daerah	%	38.96	54.21	54.21	100.00%	471,762,000	471,114,650	99.86%
Penanganan Kerawanan Pangan	Penurunan wilayah rawan pangan prioritas 2	wilayah	0	3	0	100.00%	94,691,336	94,475,500	99.77%

Dari 3 (tiga) Program yang mendukung tercapainya Sasaran Strategis 1 seluruhnya dapat **tercapai** dengan capaian di atas 100%, dan berdasarkan analisis penggunaan sumber daya seluruhnya **efisien** dalam penggunaan anggarannya. Salah satu Indikator Kinerja Program yaitu Angka Ketersediaan Energi menunjukkan capaian terhadap Renstra yang telah melebihi 100%, sehingga untuk indikator maupun target kinerja dari hasil evaluasi akhir tahun akan menjadi catatan untuk perbaikan atau revaluasi kinerja di tahun 2024.

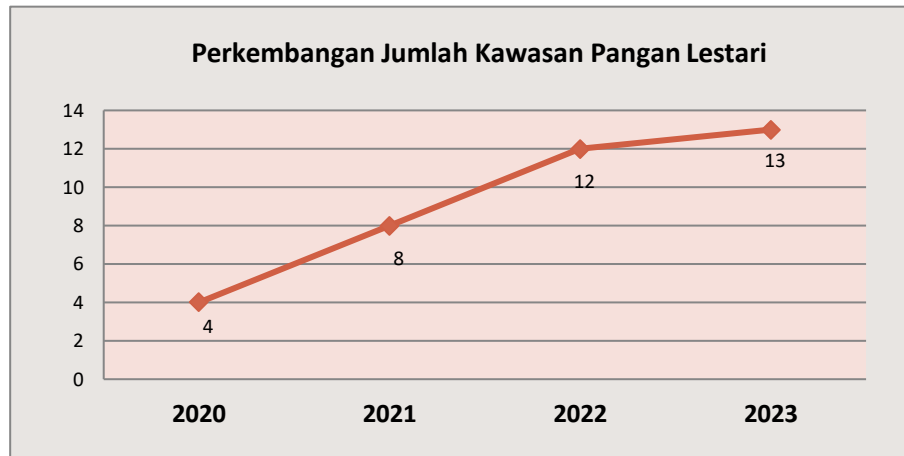
Keberhasilan capaian kinerja indikator Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Angka Konsumsi Pangan didukung oleh 3 (tiga) program, yaitu :

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan

Indikator kinerja program ini yaitu Peningkatan Persentase Kawasan yang Dikembangkan menjadi Kawasan Pangan Lestari dapat tercapai dengan realisasi sebesar 28.88% dan tingkat capaian 100%. Formulasi perhitungan : jumlah kelurahan yang dikembangkan menjadi kawasan pangan lestari (13 kelurahan) dibagi jumlah kelurahan di Kota Yogyakarta (45 kelurahan) dikali 100% = 28.88%. Dengan tingkat capaian penggunaan anggaran sebesar 99,70%, program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan dapat dikatakan tercapai dengan efisien.

Faktor pendukung keberhasilan capaian program ini adalah karena Program Kampung Pangan Lestari, Kampung Sayur dan Bimtek Optimalisasi Rumah Bibit terlaksana dengan baik dengan dukungan dari penyuluh pertanian, pihak kemantren, pihak kelurahan dan kelompok tani yang secara aktif berpartisipasi dalam program tersebut disertai dengan pendampingan terhadap kelompok tani.

Adapun faktor penghambat keberhasilan capaian program diantaranya karena sempat terjadi keterlambatan dalam pengiriman bibit lele karena menunggu bibit lele yang sesuai sehingga pertumbuhannya dapat optimal, selain itu faktor cuaca pada awal tahun curah hujan tinggi dan menjelang akhir tahun musim kemarau yang panjang menyebabkan timbulnya hama dan penyakit pada tanaman.



Dukungan terhadap capaian kinerja program ini diperoleh dari 1 Sub Kegiatan yaitu :

a. *Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya*

Memiliki 1 Output dengan indikator kinerja Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia dengan target output 10 unit tercapai sebanyak 10 unit (5 unit Kampung Pangan Lestari dan 5 unit Kampung Sayur).

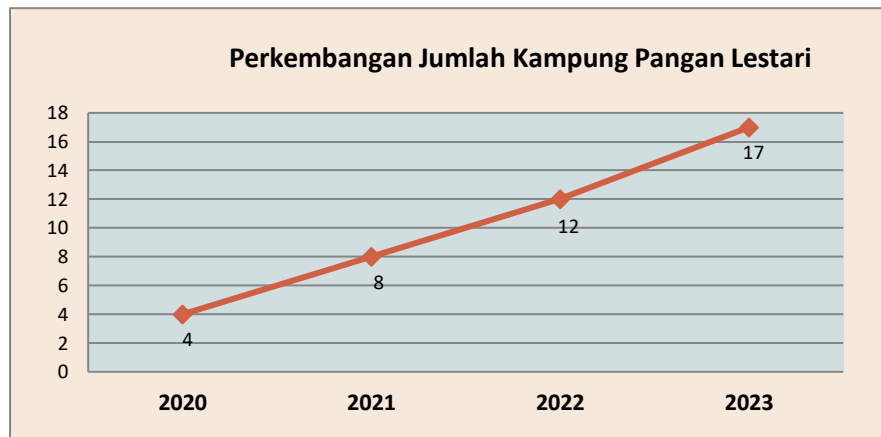
Aktivitas yang dilakukan dalam Sub Kegiatan tersebut adalah :

- Bimbingan Teknis Kampung Pangan Lestari yang disertai dengan pendampingan pasca pelaksanaan Bimtek. Bimtek terselenggara pada 5 lokasi yaitu di Jetis, Gondokusuman, Mergangsan dan Umbulharjo, dengan masing-masing 30 peserta Bimtek yang berasal dari kelompok tani di Kota Yogyakarta yang telah teregister.

Dengan adanya penambahan 5 unit Kampung Pangan Lestari pada tahun 2023 maka sampai dengan tahun 2023 telah terbentuk sebanyak 17 Kampung Pangan Lestari yaitu di :

- 1) KWT Kauman 265, Ngupasan, Gondomanan
- 2) Kelompok Maharani RW 5 Basen, Purbayan, Kotagede
- 3) Kelompok Harumanis RW 10 Patangpuluhan, Wirobrajan
- 4) KWT Flamboyan, Pringgokusuman, Gedong Tengen
- 5) Kelompok Tanam Tumbuh, Karangwaru, Tegalrejo
- 6) Kelompok Ngremboko, Kricak, Tegalrejo
- 7) Kelompok Tani Sumber Rejeki, Gowongan, Jetis
- 8) Kelompok Tani Gemah Ripah, Bausasran, Danurejan
- 9) Kelompok Tani Tinalan Asri, Kelurahan Prenggan, Kotagede
- 10) Kelompok Tani Kebun Kali Code, Tegalpanggung, Danurejan
- 11) Kelompok Tani Suryofarm, Gedongkiwo, Mantrijeron
- 12) Kelompok Tani Kembang Telang, Brontokusuman, Mergangsan

- 13) Kelompok Tani Sami Mulyo, Kelurahan Cokrodiningratan, Kemantren Jetis;
- 14) Kelompok Tani Kompitu, Kelurahan Kotabaru, Kemantren Gondokusuman;
- 15) Kelompok Tani Cakruk Hijau, Kelurahan Wirogunan, Kemantren Mergangsan;
- 16) Kelompok Tani Kebon Manunggal Asri, Kelurahan Pandeyan, Kemantren Umbulharjo;
- 17) Kelompok Tani Laras Asri, Kelurahan Warungboto, Kemantren Umbulharjo



- Bimbingan Teknis Kampung Sayur juga disertai dengan pendampingan pasca pelaksanaan Bimtek. Bimtek terselenggara pada 5 lokasi dengan masing-masing 30 peserta Bimtek yang berasal dari kelompok tani di Kota Yogyakarta yang telah teregister. Pengembangan Kampung Sayur adalah pemberdayaan masyarakat melalui sistem pertanian perkotaan dengan memaksimalkan fungsi lahan pekarangan, dinding, ruang terbuka hijau, taman bermain, dinding jalan dan gang sebagai media penanaman sayuran, sekaligus meningkatkan produksi tanaman pangan untuk mendukung ketahanan pangan, meningkatkan konsumsi sayur dan buah serta menambah nilai estetika bagi Kampung dan jalan di wilayah Kota Yogyakarta.

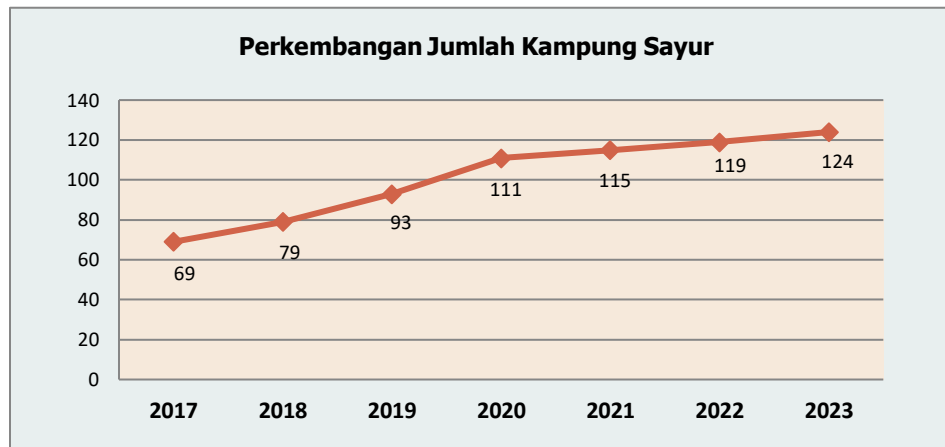
Lokasi pelaksanaan Bimtek Kampung Sayur pada tahun 2023 :

- 1) Kelompok Tani Patehan Hijau, Kelurahan Patehan, Kemantren Kraton;
- 2) Kelompok Tani Berdikari, Kelurahan Demangan, Kemantren Gondokusuman;
- 3) Kelompok Tani Timoho Ngremboko, Kelurahan Muja-Muju, Kemantren Gondokusuman;
- 4) Kelompok Tani Subur Makmur, Kelurahan Prenggan, Kemantren Kotagede;
- 5) Kelompok Tani Subur Ceria, Kelurahan Pringgokusuman, Kemantren Gedongtengen.

Dengan bertambahnya 5 lokasi Kampung Sayur pada tahun 2023, maka secara keseluruhan jumlah Kampung Sayur di Kota Yogyakarta yang mulai dirintis sejak tahun 2017 bertambah menjadi 124 lokasi yang tersebar di 45 wilayah kelurahan.

- Bimtek Optimalisasi Rumah Bibit, dilaksanakan sebanyak 2 kali dengan jumlah peserta bimtek masing-masing sebanyak 30 orang yang berasal dari kelompok tani di Kota Yogyakarta yang telah teregister. Bimtek dilaksanakan di kantor Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta. Bimtek Optimalisasi Rumah Bibit

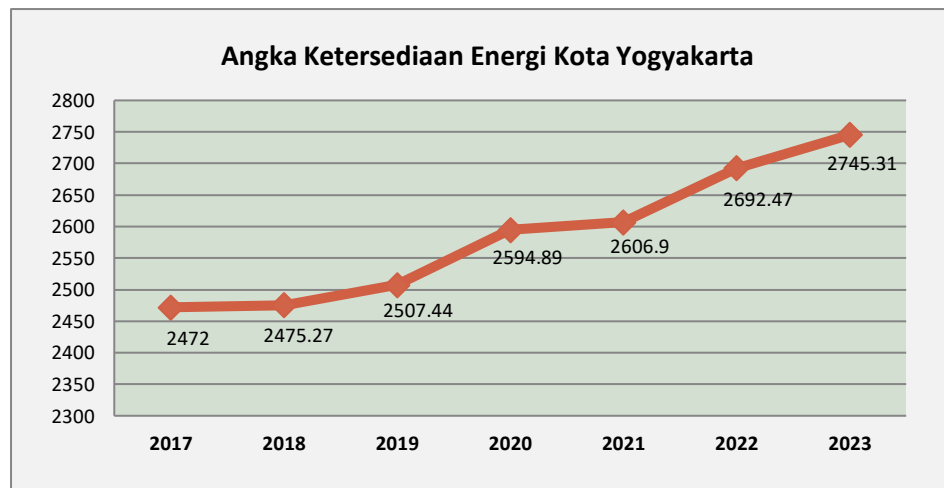
diselenggarakan dengan tujuan agar supaya ketersediaan bibit untuk Kampung Pangan Lestari maupun Kampung Sayur dapat disiapkan secara berkelanjutan.



2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Terdapat 2 indikator kinerja pada program ini yaitu :

- a. Angka Ketersediaan Energi dapat tercapai dengan realisasi sebesar 2.745,31 kkal/kapita/hari dengan tingkat capaian 105.11% terhadap target 2.611.9 kkal/kapita/hari. Formulasi perhitungan Angka Ketersediaan Energi diperoleh melalui hasil analisa rumusan angka perhitungan Neraca Bahan Makanan (NBM). Dengan tingkat capaian penggunaan anggaran sebesar 99,89%, program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dapat dikatakan tercapai dengan efisien.



- b. Peningkatan persentase pemenuhan cadangan pangan Pemerintah Daerah dapat tercapai dengan realisasi sebesar 54.21% dan tingkat capaian 100% dari hasil perhitungan tercapainya pemenuhan sebanyak 65,05 ton beras sebagai cadangan pangan pemerintah daerah terhadap target 120 ton. Dengan tingkat capaian penggunaan anggaran sebesar 99,89%, program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dapat dikatakan tercapai dengan efisien.

Tabel 3.6 Pengadaan Cadangan Beras Kota Yogyakarta

Tahun	Jumlah Pengadaan (ton)	Akumulasi (ton)	Persentase terhadap Target 120 ton
2019	2,00	2	1.67%
2020	14,75	16.75	13.96%
2021	15,00	31.75	26.46%
2022	15,00	46,75	38.96%
2023	18,30	65.05	54.21%

Faktor pendukung keberhasilan capaian program ini adalah karena adanya kerja sama dan koordinasi yang baik dengan instansi terkait sehingga pelaksanaan pemantauan stok, pasokan dan harga pangan terlaksana disertai ketersediaan data yang mendukung analisis. Adapun faktor penghambat keberhasilan capaian program diantaranya karena pencatatan stok, pasokan dan harga masih secara manual yaitu saat di lapangan menggunakan kertas kemudian *input* data ke *google drive*. Terkadang terjadi keterlambatan input data karena bersamaan dengan kegiatan yang lain, namun sudah teratasi.

Dukungan terhadap capaian kinerja program ini diperoleh dari 3 Kegiatan dan 7 Sub Kegiatan, dengan rincian aktivitas yang dilakukan pada setiap sub kegiatan sebagai berikut :

a. Sub Kegiatan Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan

Memiliki indikator kinerja output Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan dengan target 13 laporan, tercapai sebesar 100%, dengan realisasi 12 laporan informasi harga pangan bulanan, dan 1 laporan Neraca Bahan Makanan (NBM).

Faktor pendorong tercapainya kinerja diantaranya karena laporan informasi harga pangan setiap bulan dapat tersedia dengan lancar karena didukung dengan data yang didapatkan dari pemantauan harga pangan yang terlaksana dengan baik. Sedangkan penyusunan laporan Neraca Bahan Makanan (NBM) terlaksana dengan baik karena didukung oleh respon yang baik dari instansi terkait. Adapun faktor penghambat tercapainya kinerja diantaranya adalah karena terkadang terjadi keterlambatan input data karena bersamaan dengan kegiatan yang lain, namun sudah teratasi.

Aktivitas yang dilakukan pada Sub Kegiatan ini adalah :

- Penyusunan Laporan Informasi Harga Pangan sebanyak 1 laporan/bulan yang dilaksanakan oleh Tim Kerja Ketahanan Pangan dengan metode pelaksanaan kegiatan berupa pengumpulan data informasi harga pangan pada pasar tradisional, pasar modern, warung/toko kelontong dan distributor di Kota Yogyakarta, analisis data informasi harga pangan, penyusunan laporan dan rapat-rapat koordinasi.

Laporan informasi harga pangan ini setiap bulan ditayangkan pada website Pemerintah Kota Yogyakarta www.jogjakota.go.id berupa Prognosa Situasi Pangan Kota Yogyakarta.

The image displays three screenshots of the 'PROGNOSA SITUASI PANGAN KOTA YOGYAKARTA' website, showing data for January, February, and March 2023. Each screenshot includes a 'KETERSEDIAAN PANGAN' table and a 'HARGA PANGAN' table.

PROGNOSA SITUASI PANGAN KOTA YOGYAKARTA - JANUARI 2023 MINGGU KE 5

Kategori	Satuan	Produksi	Importasi	Stok Awal	Stok Akhir	Ketersediaan	Defisit
Jagung	Ton	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0
Jagung Bunting	Ton	100.000	0	100.000	100.000	0	0
Jagung Bunting Bunting	Ton	100.000	0	100.000	100.000	0	0
Jagung Bunting Bunting Bunting	Ton	100.000	0	100.000	100.000	0	0
Jagung Bunting Bunting Bunting Bunting	Ton	100.000	0	100.000	100.000	0	0
Jagung Bunting Bunting Bunting Bunting Bunting	Ton	100.000	0	100.000	100.000	0	0
Jagung Bunting Bunting Bunting Bunting Bunting Bunting	Ton	100.000	0	100.000	100.000	0	0
Jagung Bunting Bunting Bunting Bunting Bunting Bunting Bunting	Ton	100.000	0	100.000	100.000	0	0
Jagung Bunting Bunting Bunting Bunting Bunting Bunting Bunting Bunting	Ton	100.000	0	100.000	100.000	0	0
Jagung Bunting Bunting Bunting Bunting Bunting Bunting Bunting Bunting Bunting	Ton	100.000	0	100.000	100.000	0	0

PROGNOSA SITUASI PANGAN KOTA YOGYAKARTA - FEBRUARI 2023

Kategori	Satuan	Produksi	Importasi	Stok Awal	Stok Akhir	Ketersediaan	Defisit
Jagung	Ton	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0
Jagung Bunting	Ton	100.000	0	100.000	100.000	0	0
Jagung Bunting Bunting	Ton	100.000	0	100.000	100.000	0	0
Jagung Bunting Bunting Bunting	Ton	100.000	0	100.000	100.000	0	0
Jagung Bunting Bunting Bunting Bunting	Ton	100.000	0	100.000	100.000	0	0
Jagung Bunting Bunting Bunting Bunting Bunting	Ton	100.000	0	100.000	100.000	0	0
Jagung Bunting Bunting Bunting Bunting Bunting Bunting	Ton	100.000	0	100.000	100.000	0	0
Jagung Bunting Bunting Bunting Bunting Bunting Bunting Bunting	Ton	100.000	0	100.000	100.000	0	0
Jagung Bunting Bunting Bunting Bunting Bunting Bunting Bunting Bunting	Ton	100.000	0	100.000	100.000	0	0
Jagung Bunting Bunting Bunting Bunting Bunting Bunting Bunting Bunting Bunting	Ton	100.000	0	100.000	100.000	0	0

PROGNOSA SITUASI PANGAN KOTA YOGYAKARTA - MARET 2023

Kategori	Satuan	Produksi	Importasi	Stok Awal	Stok Akhir	Ketersediaan	Defisit
Jagung	Ton	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	0	0
Jagung Bunting	Ton	100.000	0	100.000	100.000	0	0
Jagung Bunting Bunting	Ton	100.000	0	100.000	100.000	0	0
Jagung Bunting Bunting Bunting	Ton	100.000	0	100.000	100.000	0	0
Jagung Bunting Bunting Bunting Bunting	Ton	100.000	0	100.000	100.000	0	0
Jagung Bunting Bunting Bunting Bunting Bunting	Ton	100.000	0	100.000	100.000	0	0
Jagung Bunting Bunting Bunting Bunting Bunting Bunting	Ton	100.000	0	100.000	100.000	0	0
Jagung Bunting Bunting Bunting Bunting Bunting Bunting Bunting	Ton	100.000	0	100.000	100.000	0	0
Jagung Bunting Bunting Bunting Bunting Bunting Bunting Bunting Bunting	Ton	100.000	0	100.000	100.000	0	0
Jagung Bunting Bunting Bunting Bunting Bunting Bunting Bunting Bunting Bunting	Ton	100.000	0	100.000	100.000	0	0

Laporan Situasi Pangan pada Website Pemerintah Kota Yogyakarta

- Penyusunan Neraca Bahan Makanan sebanyak 1 laporan dilaksanakan oleh Tim Kerja Ketahanan Pangan serta instansi terkait seperti Dinas Perdagangan, Dinas Perhubungan serta Dinas Kesehatan, dengan metode pelaksanaan kegiatan berupa pengumpulan data dari pasar tradisional, pasar modern, warung/toko kelontong dan distributor di Kota Yogyakarta, analisis data Neraca Bahan Makanan, penyusunan laporan, rapat koordinasi dan Focus Group Discussion (FGD).

b. Sub Kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

Memiliki indikator kinerja output Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia dengan target 2 laporan, tercapai sebesar 100%, dengan realisasi 2 laporan pelaksanaan Gerakan Mengkonsumsi Protein (1 laporan) dan Festival Pangan Lokal (1 laporan).

Faktor pendorong tercapainya kinerja diantaranya karena adanya dukungan positif dari DPP, instansi terkait, mitra, kemantren, kelurahan dan masyarakat secara aktif berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. Adapun faktor penghambat tercapainya kinerja diantaranya adalah karena Peserta Gerakan Mengkonsumsi Protein *by name by addres* (BNBA) didapatkan dari petugas puskesmas, saat pelaksanaan ada beberapa peserta BNBA tidak hadir, namun teratasi dengan cara dicarikan pengganti oleh petugas puskesmas.

Aktivitas yang dilakukan pada Sub Kegiatan ini adalah :

- Gerakan Mengkonsumsi Protein, dengan sasaran pada ibu-ibu hamil yang terindikasi mengalami kekurangan energi kronis, ibu-ibu hamil yang terindikasi mengalami anemia dan ibu yang memiliki bayi di bawah usia dua tahun, sebanyak 600 peserta dari 14 kemantren, berupa bimbingan teknis dan pemberian makanan tinggi protein seperti olahan ikan dan telur. Gerakan Mengkonsumsi Protein dilaksanakan pada 6 lokasi yaitu di Kemantren Mergangsan, Kemantren Kotagede, Kemantren Jetis, Kemantren Kraton, Kemantren Wirobrajan dan di Lapangan SMA Negeri 3 Yogyakarta pada acara Festival Pangan Lokal.
- Festival Pangan Lokal, diselenggarakan 1 kali dengan sasaran seluruh masyarakat Kota Yogyakarta berlokasi di Lapangan SMA Negeri 3 Yogyakarta, berupa Pameran dan Bazaar tanaman dan produk olahan pangan lokal dari kelompok tani, asosiasi, komunitas dan pelaku usaha di bidang pangan.

c. Sub Kegiatan Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan

Memiliki indikator kinerja output Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan dengan target 12 laporan, tercapai sebesar 100%, dengan realisasi 12 laporan hasil Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan.

Faktor pendorong tercapainya kinerja diantaranya laporan stok, pasokan dan harga pangan dapat tersedia setiap bulan karena didukung oleh terlaksananya pemantauan stok, pasokan dan harga pangan setiap minggu dengan baik. Adapun faktor penghambat tercapainya kinerja diantaranya adalah karena pencatatan stok, pasokan dan harga masih secara manual yaitu saat di lapangan menggunakan kertas kemudian input data ke google drive.

Aktivitas yang dilakukan pada Sub Kegiatan ini adalah :

- Pemantauan stok, pasokan dan harga pangan terhadap pedagang bahan pangan di Kota Yogyakarta, dengan metode pelaksanaan kegiatan berupa pengumpulan data yang dilakukan secara rutin sebanyak 8-12 kali per bulan di pasar tradisional, warung/toko kelontong, pasar modern dan distributor di Kota Yogyakarta, analisis data stok, pasokan dan harga pangan, dan penyusunan laporan. Data dan informasi analisis harga dan pasokan pangan yang disusun dan dilaporkan serta diupload pada JSS secara periodik per bulan untuk mengetahui situasi pangan di Kota Yogyakarta yang menunjukkan ada atau tidaknya gejolak harga pangan terhadap 11 komoditas yaitu beras, jagung, cabai keriting, cabai rawit merah, bawang merah, bawang putih, daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, minyak goreng dan gula pasir.

Hasil pemantauan bisa diakses melalui link :

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1FmaTGxwvyOF7sAyC4VIZ84HTbR0K-LUn/edit#gid=1914305432>



d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota

Memiliki indikator kinerja output Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota dengan target 2 laporan, tercapai sebesar 100%, dengan realisasi 2 laporan hasil dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan

oleh Satuan Tugas Ketahanan Pangan Kota Yogyakarta serta Laporan Kajian Ketersediaan Pangan di Kota Yogyakarta.

Faktor pendorong tercapainya kinerja diantaranya adanya koordinasi dan kerja sama antara instansi terkait dan mitra terkait cadangan pangan kota yang terlaksana dengan baik. Adapun faktor penghambat tercapainya kinerja diantaranya adalah pengintegrasian tujuan dan kegiatan pada instansi terkait untuk mencapai tujuan bersama secara efisien teratasi dengan koordinasi yang rutin.

Aktivitas yang dilakukan pada Sub Kegiatan ini adalah :

- Pembentukan Satuan Tugas Ketahanan Pangan Kota Yogyakarta dengan anggota meliputi Tim Kerja Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, BULOG, Kepolisian Resor Kota Yogyakarta dan Kodim 0734 Kota Yogyakarta, Dinas Perdagangan, Dinas Perhubungan serta Dinas Kesehatan.
- Rapat-rapat koordinasi rutin untuk sinkronisasi dan koordinasi pengendalian cadangan pangan pemerintah daerah, serah terima serta monitoring dan evaluasi pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah.
- Penyusunan Dokumen Kajian Ketersediaan Pangan.



e. Sub Kegiatan Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota

Memiliki indikator kinerja output Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan target 18,3 ton, tercapai sebesar 100%, dengan realisasi pengadaan sebanyak 18,3 ton beras premium sebagai cadangan pangan pemerintah Kota Yogyakarta.

Faktor pendorong tercapainya kinerja diantaranya adanya koordinasi dan kerja sama dengan mitra penyedia yang berjalan dengan baik, serta jumlah dan kualitas cadangan beras yang diterima sesuai dengan spesifikasi. Adapun faktor penghambat tercapainya kinerja diantaranya adalah harga beras sempat mengalami peningkatan, namun bisa diperoleh kesepakatan dengan mitra terkait harga yang sesuai sehingga jumlah beras yang didapatkan sesuai dengan target.

Aktivitas yang dilakukan pada Sub Kegiatan ini adalah :

- Pengadaan beras kualitas medium sebagai cadangan pangan pemerintah Kota Yogyakarta sebanyak 18,3 dengan metode pengadaan langsung melalui mitra penyedia jasa. Untuk selanjutnya pengelolaannya diserahkan kepada PD. Tarumartani melalui proses Serah Terima Cadangan Beras Pemerintah yang dilaksanakan pada tanggal 17 Mei 2023 di PD. Taru Maratani, dengan dihadiri oleh Direktur Utama PT. Taru Martani, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Yogyakarta, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan, Kepala Dinkominfosan, Kepala Dinas Perdagangan, UD Barokah, Mitra Dinas Pertanian dan Pangan, serta Media Pers.

- Surat Perjanjian Kerja Sama yang telah disepakati antara Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta dengan PT. Taru Martani mengatur tentang Stock Opname cadangan beras. Stock opname atau monitoring cadangan beras pemerintah dilakukan untuk memastikan jumlah dan kualitas cadangan beras yang dikelola PT. Taru Martani sesuai dengan kesepakatan. Jumlah cadangan beras yang ada di gudang minimal 25% dari 65.05 ton. Cadangan beras pemerintah Kota Yogyakarta berupa beras medium dengan spesifikasi kadar air maksimum 14%, derajat sosoh 90%, warna putih, tingkat kepatahan maksimal 20%, dan tidak bercampur dengan kotoran batu atau gabah.



Serah Terima Cadangan Beras Kota Yogyakarta
dan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dengan PT Tarumartani

f. Sub Kegiatan Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun

Memiliki indikator kinerja output Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun dengan target 1 dokumen, tercapai sebesar 100%, dengan realisasi sebanyak 1 dokumen Pola Pangan Harapan (PPH).

Faktor pendorong tercapainya kinerja diantaranya Dokumen Pola Pangan Harapan (PPH) tersusun dengan baik karena koordinasi dan kerja sama dengan mitra penyedia berjalan dengan baik, disertai dengan ketersediaan data yang mendukung. Adapun faktor penghambat tercapainya kinerja diantaranya adalah adanya perbedaan bulan pengambilan sampel dapat berpengaruh pada konsumsi masyarakat yang diwawancarai, sehingga bulan yang dipilih bukan saat bulan puasa atau mendekati HBKN.

Aktivitas yang dilakukan pada Sub Kegiatan ini adalah :

- Penyusunan Dokumen Pola Pangan Harapan (PPH) yang dilakukan dengan metode pengadaan langsung melalui penyedia jasa konsultansi, dengan sasaran seluruh masyarakat di Kota Yogyakarta.

g. Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal

Memiliki indikator kinerja output Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun dengan target 1 laporan, tercapai sebesar 100%, dengan realisasi sebanyak 1 laporan hasil pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal.

Faktor pendorong tercapainya kinerja diantaranya adalah adanya koordinasi dan kerja sama dengan instansi terkait berjalan dengan lancar disertai dengan partisipasi yang aktif dari masyarakat. Adapun faktor penghambat tercapainya kinerja diantaranya adalah pelaksanaan lomba B2SA yang dilaksanakan di luar ruangan tidak efektif.

Aktivitas yang dilakukan pada Sub Kegiatan ini adalah :

- Sosialisasi Menu Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA) dengan sasaran sosialisasi kepada ibu hamil, ibu menyusui, ibu dengan baduta, ibu dengan balita dan calon pengantin sebanyak 14 kali pada semua Kemantren di Kota Yogyakarta dengan pemberian bahan contoh pangan berbahan dasar protein.
- Lomba Menu Beragam, Bergizi, Seimbang, dan Aman (B2SA) dengan peserta dari penyedia jasa Gandeng-Gendong dari seluruh Kemantren dan Kelurahan di Kota Yogyakarta. Lomba berlangsung sebanyak 1 kali di Lapangan SMA Negeri 3 Kota Yogyakarta, bersamaan dengan terselenggaranya acara Festival Pangan Lokal.
- Lomba Landscape Sayur dengan peserta kelompok tani dari seluruh Kemantren dan Kelurahan di Kota Yogyakarta, Lomba Sayur Kategori Buah dengan peserta kelompok tani dari seluruh Kemantren dan Kelurahan di Kota Yogyakarta, dan Lomba Stand Festival Pangan Lokal dengan peserta seluruh pelaku usaha bidang pangan. Lomba berlangsung sebanyak 1 kali di Lapangan SMA Negeri 3 Kota Yogyakarta, bersamaan dengan terselenggaranya acara Festival Pangan Lokal.



3. Program Penanganan Kerawanan Pangan

Indikator kinerja program ini yaitu Penurunan wilayah rawan pangan prioritas 2 dapat tercapai dengan realisasi tidak terdapat wilayah dengan kondisi rawan pangan (0 wilayah rawan pangan) dan tingkat capaian 100% terhadap target 3 wilayah. Dengan tingkat capaian penggunaan anggaran sebesar 99,77%, program Penanganan Kerawanan Pangan dapat dikatakan tercapai dengan efisien.

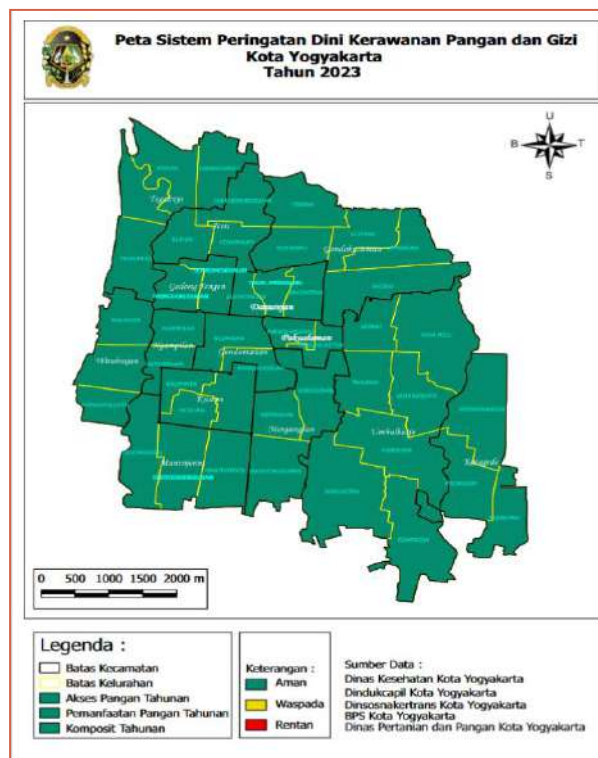
Faktor pendukung keberhasilan capaian program ini adalah karena adanya koordinasi dan kolaborasi dengan instansi terkait berjalan dengan baik sehingga tersedia data yang akurat untuk analisis peta ketahanan dan kerentanan pangan. Adapun faktor penghambat keberhasilan capaian program diantaranya karena pengumpulan data dari instansi terkait memerlukan waktu, sehingga proses analisis data harus menunggu data tersebut.

Dukungan terhadap capaian kinerja program ini diperoleh 1 Sub Kegiatan yaitu Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang memiliki indikator kinerja output Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan

yang dimutakhirkan dengan target 1 laporan, tercapai sebesar 100%, dengan realisasi 1 laporan peta ketahanan dan kerentanan pangan.

Aktivitas yang dilakukan pada Sub Kegiatan ini adalah :

- Penyusunan dokumen Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang dilaksanakan dengan metode pengadaan langsung melalui penyedia jasa.
- Penyusunan Laporan Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG) yang dilaksanakan oleh Tim Kerja Ketahanan Pangan, Dinas Kesehatan, BMKG dan BPBD Kota Yogyakarta melalui rapat-rapat koordinasi, pengumpulan data, analisis data dan penyusunan laporan.



Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kota Yogyakarta

3.1.7 Analisis Program/Kegiatan terkait dengan Pengarusutamaan Gender

Sebagai daerah perkotaan, Kota Yogyakarta dihadapkan dengan realita kondisi lahan pertanian yang sempit serta semakin menyempit seiring waktu. Pada tahun 2023 hanya terdapat 37.33 ha lahan sawah di Kota Yogyakarta, yang tersebar di Kemantren Kotagede, Mantriheron, Tegalrejo, Mergangsan, dan Umbulharjo dengan kepemilikan sawah oleh masing-masing petani kurang dari 1 ha. Dengan lahan yang kecil tersebut, isu ketahanan pangan menjadi masalah yang perlu diperhatikan di Kota Yogyakarta. Diperlukan alternatif agar masyarakat Kota Yogyakarta dapat melakukan kegiatan pertanian dengan kondisi lahan yang terbatas, sehingga masyarakat dapat mencukupi sebagian kebutuhannya sendiri melalui hasil panen.

Berdasarkan kondisi dan permasalahan tersebut, Dinas pertanian dan Pangan melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Pengembangan Kampung Sayur dan Bimbingan Teknis Pengembangan Kampung Pangan Lestari. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memfasilitasi pemanfaatan lahan pekarangan sebagai lahan pertanian bagi masyarakat Kota

(pertanian perkotaan). Diharapkan dengan kegiatan tersebut, masyarakat dapat membudidayakan tanaman pangan di lahan pekaranganyang ada, guna memenuhi sebagian kebutuhan pangannya secara mandiri maupun sebagai hobi, terutama untuk 5 kelompok rentan afirmatif gender yaitu : perempuan, fakir miskin, disabilitas, anak-anak serta lansia.

Realisasi dari program dan kegiatan yang mendukung pengarusutamaan gender adalah sebagai berikut :

Kegiatan	Target	Realisasi
Bimtek Pengembangan Kampung Sayur	5 Lokasi	5 Lokasi: 1. Kelompok Tani Patehan Hijau, Patehan, Kraton 2. Kelompok Tani Berdikari, Demangan, Gondokusuman (4 Laki-laki, 18 Perempuan) 3. Kelompok Tani Timoho Ngremboko, Baciro, Gondokusuman 4. Kelompok Tani Subur Makmur, Prenggan, Kotagede (3 Laki-laki, 21 Perempuan) 5. Kelompok Tani Subur Ceria, Pringgokusuman, Gedongtengen (0 Laki-laki, 24 Perempuan)
Anggaran	196.225.000	194.190.000
Pengembangan Kampung Pangan Lestari	5 Lokasi	5 Lokasi: 1. KT Sami Mulyo, Cokrodiningratan, Jetis (4 Laki-laki, 11 Perempuan) 2. KT Cakruk Hijau, Wirogunan, Mergangsan 3. KT Kebon Manunggal Asri, Pandeyan Umbulharjo 4. KT Laras Asri, Balai Muslimin RW 8, Warungboto, Umbulharjo (0 Laki-laki, 20 Perempuan) 5. KT Kompitu Hijau, Kotabaru, Gondokusuman (6 Laki-laki, 15 Perempuan)
Anggaran	289.350.000	289.350.000

Dalam pelaksanaannya, kegiatan bimbingan teknis kampung sayur dan kampung pangan lestari ini mendukung kelompok afirmasi gender dengan memberdayakan wanita di Kota Yogyakarta dalam bidang pertanian. Hal ini terbukti dengan keikutsertaan wanita dalam kedua bimtek tersebut sebesar lebih dari 80%. Dari 10 kelompok tani yang menjadi peserta bimtek kampung sayur dan kampung pangan lestari, 6 diantaranya teridentifikasi data pilah gendernya. Kelompok-kelompok tersebut diantaranya KT Berdikari, KT Subur Makmur, KT Subur Ceria, KT Sami Mulyo, KT Laras Asri, dan KT Kompitu Hijau. Dari keenam kelompok tani tersebut, keanggotaannya terdiri atas 17 laki-laki dan 109 perempuan.

3.1.8 Inovasi yang Mendukung Pencapaian Kinerja

1. Jogja Sadar Kalori

Inovasi Jogja Sadar Kalori telah tercantum dalam Keputusan Walikota tentang Penerapan Inovasi Daerah Tahun 2021 serta Peraturan Walikota Nomor 58 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Yogyakarta Tahun 2022. Dalam kedua peraturan tersebut, inovasi ini tercatat dengan nama "Label Kandungan Kalori Pada Jamuan Sidang", dan mengalami perubahan nama menjadi "Jogja Sadar Kalori" untuk diusulkan ke dalam Kepwal Penerapan Inovasi Daerah Tahun 2022. Selain itu, inovasi ini juga didasari dengan SK Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Tahun 2021.

Latar belakang pembuatan inovasi ini adalah karena kurangnya kesadaran masyarakat Kota Yogyakarta tentang pola konsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA), yang mengakibatkan meningkatnya penyakit karena ketidakseimbangan pola konsumsi pangan seperti hipertensi, diabetes mellitus, stunting, dan obesitas yang berpotensi menurunkan usia produktif dan usia harapan hidup, sehingga mengakibatkan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) tidak tercapai.

Tujuan dari inovasi Jogja Sadar Kalori adalah untuk memberikan pelayanan perhitungan jumlah kalori makanan pada Gandeng-Gendong di Kota Yogyakarta, meningkatkan kesadaran masyarakat Kota Yogyakarta tentang pola konsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA), sehingga masyarakat Kota Yogyakarta dapat menerapkan pola konsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) secara berkelanjutan.

Manfaat yang diperoleh dengan adanya inovasi ini adalah bagi Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta dapat memberikan inovasi pelayanan publik kepada masyarakat terkait Menu Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA), bagi stakeholder terkait yaitu Bagian Administrasi Pembangunan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian dapat membangun kerja sama yang kolaboratif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Kota Yogyakarta, dan bagi Gandeng-Gendong di Kota Yogyakarta dapat menyusun menu yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman.



Menu 2		902 kkal
Menu	Jumlah	Kalori
Nasi	1 mangkok	204
Sayur sop	1 mangkuk	109
Daging sapi	1 potong	288
Tempe goreng	1 potong	34
Tahu goreng	1 potong	35
Sambel goreng	1 sdm	15
Jus jeruk	1 gelas	112
Pisang	1 buah	105

Persentase dari nilai kecukupan gizi
39% dari total AKG laki-laki
46% dari total AKG perempuan

Hasil yang diperoleh dengan adanya inovasi ini adalah tersedianya informasi jumlah kalori makanan pada kotak snack dan makan yang diproduksi oleh Gandeng-Gendong Kota Yogyakarta Gandeng-Gendong di Kota Yogyakarta dapat menyediakan makanan dengan komposisi porsi yang tepat disertai dengan informasi jumlah kalori makanan pada kotak snack dan nasi box, ASN dan masyarakat yang melihat dan menerima kotak snack dan nasi box tersebut mulai sadar akan pentingnya komposisi porsi makanan dan jumlah kalori yang dibutuhkan, kemudian dapat menerapkannya secara berkelanjutan.

2. Dari Jogja untuk Jogja

Pertanian perkotaan di Kota Yogyakarta terus berkembang setiap tahunnya, khususnya di bidang ketahanan pangan untuk memenuhi ketersediaan pangan melalui program-program pemberdayaan masyarakat seperti Kampung Sayur, Kampung Pangan Lestari dan Pekarangan Pangan Lestari. Melalui program-program tersebut dibutuhkan bahan baku seperti bibit tanaman, bibit lele dan media tanam. Kelompok tani di Kota Yogyakarta sudah mampu untuk memproduksi bibit tanaman, bibit lele dan media tanam. Inovasi Dari Jogja Untuk Jogja hadir untuk memenuhi kebutuhan bahan baku tersebut yang berasal dari kelompok tani di Kota Yogyakarta, sehingga tidak perlu mendatangkan bahan baku tersebut dari luar wilayah kota Yogyakarta. Manfaat Dari Jogja Untuk Jogja adalah menumbuhkan semangat petani Kota Yogyakarta dalam mengembangkan pertanian perkotaan dan juga menambah pendapatan kelompok tani di Kota Yogyakarta.

3.1.9 Kolaborasi Lintas Sektor yang Mendukung Pencapaian Kinerja

Dalam upaya peningkatan ketahanan pangan masyarakat yang bertujuan untuk mengurangi angka stunting pada anak-anak, maka dinas berkolaborasi dengan Bappeda dan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta, serta Dinas Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Keluarga Berencana. Adapun dalam upaya meningkatkan minat dan antusiasme masyarakat dalam pemanfaatan pekarangan dan lahan sempit maka dinas bekerjasama dengan wilayah kelurahan serta Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DIY.

ANALISIS KINERJA SASARAN STRATEGIS 2 : MENINGKATNYA PERSENTASE PENGAWASAN DAN PEMBINAAN KEAMANAN PANGAN

Tabel 3.7 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran Strategis 2

Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
Meningkatnya Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi di pedagang di Kota Yogyakarta sesuai standar yang berlaku dibagi jumlah total sampel pangan dikali 100 persen. Hasil Perhitungan : - Jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi = 1.588 sampel - Jumlah sampel yang tidak aman dikonsumsi = 112 sampel - Jumlah total sampel = 1.700 sampel

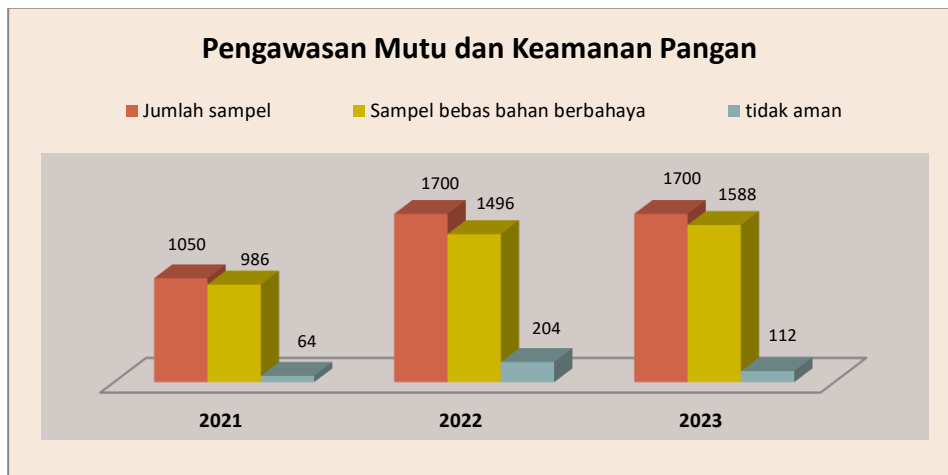
Tabel 3.8 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja						
		Satuan	Realisasi 2022	Target 2023	Target Renstra	Realisasi 2023	% capaian 2023	% capaian Renstra
Meningkatnya Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	88	89.47	93.88	93.41	104.40%	99.50%

Target capaian kinerja Sasaran Strategis 2 pada Tahun 2023 dapat tercapai dengan tingkat capaian sebesar 104.40%. Realisasi capaian sebesar 93.41% diperoleh dari hasil pengawasan keamanan pangan, dengan cara pengambilan sampel bahan pangan asal tumbuhan, asal hewan dan asal perikanan terhadap pedagang pasar tradisional maupun modern, dengan hasil uji keamanan pangan dari 1.700 sampel bahan pangan segar yang diuji, terdapat sebanyak 112 sampel yang mengandung bahan berbahaya (6.59%).

3.1.1 Membandingkan terhadap capaian kinerja tahun lalu.

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kinerja pengawasan mutu dan keamanan pangan ini mengalami peningkatan pada jumlah sampel uji mutu pangan yang bebas dari bahan berbahaya, sehingga jumlah sampel uji mutu pangan yang tidak aman atau mengandung bahan berbahaya mengalami penurunan.



3.1.2 Membandingkan terhadap target capaian jangka menengah.

Terhadap capaian jangka menengah akhir periode Renstra 2023-2026, target akhir Renstra pada akhir tahun 2026 adalah 93,88%. Dengan realisasi yang diperoleh pada tahun 2023 yaitu sebesar 93,41%, maka target akhir Renstra telah tercapai sebesar 99,50%. Dengan kondisi capaian ini maka indikator kinerja Sasaran Strategis 2 ini optimis dapat tercapai pada akhir periode Renstra 2023-2026, dan akan menjadi bahan evaluasi kinerja perangkat daerah pada tahun berikutnya.

3.1.3 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Faktor – faktor yang menunjang keberhasilan tercapainya target indikator kinerja sasaran strategis 2 ini diantaranya adalah bahwa masyarakat dan para pelaku usaha antusias dalam mengikuti pembinaan dan sosialisasi keamanan pangan. Disamping itu para pelaku usaha juga memiliki antusiasme yang cukup tinggi untuk manaati aturan terkait perijinan usaha penjualan daging, dan secara mandiri menginginkan pengawasan dan pengujian secara berkala serta mereka juga sangat kooperatif dengan petugas monitoring.

Adapun faktor-faktor yang menghambat keberhasilan tercapainya target indikator kinerja sasaran strategis 1 adalah jumlah pelaku usaha perikanan berkurang dan beralih ke usaha lain, terjadi peningkatan jumlah unit usaha pedagang daging ayam di luar pasar tadisional, pasar substituen belum mendukung dalam segi higien sanitasi untuk produk PAH dan perikanan, rendahnya pengetahuan para pelaku usaha PSAT yang melakukan pengemasan mandiri dan registrasi PSAT, serta ada beberapa pelaku usaha terdampak relokasi pasar. Selain itu banyak pelaku usaha perikanan baru serta memiliki beragam produk dan distributor, sedangkan SDM pengawasan mutu sangat terbatas sehingga tidak seluruhnya dapat terjangkau pengawasan, pengujian sampel uji mutu bahan pangan masih terbatas pada pengujian kualitatif karena sarana dan prasarana laboratorium belum cukup memadai untuk pengujian secara kuantitatif.

Upaya solusi yang dilakukan adalah dengan meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas OPD dalam hal monitoring dan pengujian produk pangan segar asal tumbuhan, asal ikan maupun asal hewan, seperti BPOM, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Purnama Lab serta GIS. Selain itu juga dilakukan penguatan data pelaku usaha dan meningkatkan jejaring antar pelaku usaha, serta penguatan kapasitas SDM pengawasan mutu.

3.1.4 Analisis Efisiensi penggunaan sumber daya

Sasaran Strategis	Kinerja						Anggaran		
	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	% capaian 2023	Target	Realisasi	% capaian
Meningkatnya Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	88	89.47	93.41	104.40%	968,120,650	936,862,150	96.77%

Dari tabel di atas terlihat bahwa persentase kinerja sasaran strategis 2 terhadap target tahun 2023 sebesar 104.40% tercapai lebih besar dari persentase capaian kinerja anggaran 96.77%, yang berarti dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran dalam pencapaian sasaran strategis 2 Meningkatkan Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan dapat tercapai secara **EFISIEN**.

3.1.5 Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran Dinas.

Program Pendukung	Kinerja						Anggaran		
	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	% capaian 2023	Target	Realisasi	% capaian
Pengawasan Keamanan Pangan	Peningkatan Persentase pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan yang diawasi	%	n/a	26.55	26.55	100.00%	251,747,220	248,235,000	98.60%
Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Peningkatan persentase pelaku usaha pangan asal hewan dan perikanan yang diawasi	%	n/a	22.49	22.49	100.00%	716,373,430	688,627,150	96.13%

Dari 2 Indikator Kinerja Program Pendukung Sasaran 2 ini seluruhnya dapat tercapai dengan capaian kinerja 100% dengan penggunaan sumber dana yang efisien, karena capaian kinerja lebih besar daripada capaian anggaran.

Keberhasilan capaian kinerja indikator sasaran 2 didukung oleh 2 (dua) program yaitu :

1. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Indikator kinerja program ini yaitu Peningkatan Persentase pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan yang diawasi dapat tercapai dengan realisasi sebesar 26.55% dan tingkat capaian 100%. Dengan tingkat capaian penggunaan anggaran sebesar 98.60%, program Pengawasan Keamanan Pangan dapat dikatakan tercapai dengan efisien.

Faktor pendukung keberhasilan capaian program ini adalah karena adanya Koordinasi dengan instansi terkait berjalan dengan baik, dukungan SDM cukup baik, kerjasama yang baik dengan pihak ritel, pelaku usaha berkomitmen memenuhi persyaratan Registrasi PSAT PDUK, pembinaan dan sosialisasi terkait keamanan PSAT, pelaku usaha PSAT yang melakukan registrasi terhadap produknya, pelaku usaha ritel di wilayah Kota Yogyakarta antusias dengan kegiatan monitoring dan pengawasan rutin terkait dengan registrasi PSAT.

Adapun faktor penghambat keberhasilan capaian program diantaranya karena adanya ketidaksesuaian harga barang dengan pagu anggaran, masih ada pelaku usaha yang kurang kooperatif, metode pengujian masih bersifat kualitatif, kurangnya sarpras untuk mengembangkan metode pengolahan pangan lokal, serta beberapa bahan dasar pangan lokal sulit didapatkan, Rendahnya pelaku usaha PSAT yang melakukan pengemasan mandiri, rendahnya kesadaran pelaku usaha PSAT untuk melakukan pengemasan mandiri, adanya pelaku usaha terdampak relokasi pasar, serta rendahnya kesadaran pelaku usaha PSAT untuk melakukan registrasi PSAT.

Dukungan terhadap capaian kinerja program ini diperoleh dari 1 Kegiatan dan 3 Sub Kegiatan, dengan rincian aktivitas yang dilakukan pada setiap sub kegiatan sebagai berikut :

a. Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota

Memiliki indikator kinerja output Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina dengan target 1 laporan, tercapai sebesar 100%, dengan realisasi 1 laporan hasil pembinaan kelembagaan keamanan pangan segar Kota Yogyakarta.

Faktor pendorong tercapainya kinerja diantaranya karena Koordinasi dengan instansi terkait berjalan dengan baik, dukungan SDM cukup baik serta terpenuhinya data yang dibutuhkan. Adapun faktor penghambat tercapainya kinerja diantaranya adalah karena kekurangan SDM dalam input data, banyaknya data yang harus diinput, serta belum adanya format baku dalam pembuatan dokumen pelaporan.

Aktivitas yang dilakukan pada Sub Kegiatan ini adalah :

- Bimbingan Teknik Olahan Pangan Lokal, dilaksanakan sebanyak 2 kali berupa pelatihan mengolah bahan pangan lokal dengan sasaran masyarakat umum, berlokasi di Pendopo Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta.
- Kampanye Makan Buah Nusantara, bertujuan untuk memperkenalkan buah-buahan lokal dengan memberikan bahan contoh buah lokal atau buah nusantara yang selain bentuk dan warnanya menarik, rasanya enak, dan juga mengandung nilai gizi yang cukup baik, dilaksanakan sebanyak 2 kali dengan sasaran 200 peserta dari pelajar dan masyarakat, bertempat di SMAN 3 Yogyakarta dan SDN Tegalmulyo.



- Pembinaan kepatuhan mutu pangan segar asal tumbuhan, dengan sasaran para pedagang pasar, retail di pasar tradisional maupun pasar modern, sebanyak 1 kali sebanyak 20 peserta bertempat di Aula Nusa Indah Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta. Kepada pedagang yang telah memenuhi ketentuan kepatuhan mutu selanjutnya akan diberikan Surat Keterangan Kepatuhan Mutu PSAT.
- Pengawasan mutu pangan segar asal tumbuhan (PSAT), dengan sasaran para pedagang pasar dan retail di 20 pasar tradisional maupun 7 pasar modern melalui monitoring dan pengambilan sampel sebanyak 500 sampel uji.
- Sosialisasi pengawasan mutu komoditas pertanian, dilakukan untuk menyampaikan informasi hasil pengawasan dan pengujian mutu komoditas pertanian kepada masyarakat umum, pedagang pasar dan kelompok tani di wilayah Kota Yogyakarta. Sosialisasi dilakukan sebanyak 10 kali bertempat di Kelurahan Cokrodiningratan, Balai RW 08 Kelurahan Purwokinanti, Kelompok Tani Ijo Royo-royo Warungboto, Kebun Sayur GPP Bausasran, Kebun KT Suryofarm, Pendopo Kelurahan Giwangan, Pendopo Kelurahan Panembahan, Kelompok Tani Sekar Niaga Wirobrajan, Kelompok Tani Wanita Sejahtera Mujamuju, serta Selasar Pasar Prawirotaman.
- Workshop peningkatan kapasitas petugas pengambil sampel dilaksanakan dengan sasaran Tim Kerja Pengawasan Mutu Pangan, untuk meningkatkan ketrampilan mereka di dalam pengambilan sampel uji mutu bahan pangan dengan metode pemberian materi serta praktek lapangan, yang dilaksanakan sebanyak 1 kali bertempat di Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta.



b. Sub Kegiatan Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota

Memiliki indikator kinerja output Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota dengan target 1 dokumen, tercapai sebesar 100%, dengan realisasi 1 dokumen laporan hasil registrasi PSAT-PDUK.

Faktor pendorong tercapainya kinerja diantaranya karena adanya kerjasama yang baik dengan pihak ritel, dan para pelaku usaha berkomitmen memenuhi persyaratan Registrasi PSAT PDUK. Adapun faktor penghambat tercapainya kinerja diantaranya adalah karena masih ada pelaku usaha yang kurang kooperatif, kekurangan SDM dalam input data, banyaknya data yang harus diinput, serta belum adanya format baku dalam pembuatan dokumen pelaporan.

Aktivitas yang dilakukan pada Sub Kegiatan ini adalah :

- Pengawasan Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan dilaksanakan dengan sasaran 20 retail modern dan 12 pelaku usaha PSAT melalui Monitoring dan pengambilan sampel, penilaian lapang SPPB PSAT, pendataan, dan pengawasan pemenuhan komitmen.

- Sosialisasi persyaratan pemenuhan komitmen Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan dimaksudkan untuk memberikan informasi dan edukasi kepada pelaku usaha dan pihak manajemen retail yang menjual PSAT. Sosialisasi ini dilaksanakan dengan sasaran pedagang retail modern dan pelaku usaha PSAT sebanyak 20 orang x 4 kali.



c. *Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota*

Memiliki indikator kinerja output Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota dengan target 1 dokumen, tercapai sebesar 100%, dengan realisasi 1 dokumen laporan hasil pengujian mutu dan pengolahan pangan lokal.

Faktor pendorong tercapainya kinerja diantaranya karena adanya dukungan SDM cukup baik, metode pengolahan yang digunakan cukup bervariasi serta keterampilan dalam inovasi pengembangan diversifikasi pangan lokal. Adapun faktor penghambat tercapainya kinerja diantaranya adalah karena metode pengujian masih bersifat kualitatif, kurangnya sarana untuk mengembangkan metode pengolahan pangan lokal, dan beberapa bahan dasar pangan lokal sulit didapatkan.

Aktivitas yang dilakukan pada Sub Kegiatan ini adalah :

- Pengujian dan pengolahan pangan lokal dilaksanakan melalui pengujian sampel mutu dan keamanan PSAT sebanyak 500 sampel, serta pembuatan olahan pangan lokal, sebanyak 16 jenis olahan pangan lokal.



2. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Indikator kinerja program ini yaitu Peningkatan Persentase pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan yang diawasi dapat tercapai dengan realisasi sebesar 22.49% dan tingkat capaian 100%. Dengan tingkat capaian penggunaan anggaran sebesar 96.13%, program Pengawasan Keamanan Pangan dapat dikatakan tercapai dengan efisien.

Faktor pendukung keberhasilan capaian program ini adalah karena adanya kerjasama antar instansi terkait berjalan dengan baik, lokasi yang mudah dijangkau untuk pengawasan qurban, pemateri workshop yang kooperatif, bahan dan peralatan laboratorium cukup lengkap, dukungan SDM cukup baik, pelaku usaha memiliki antusias untuk taat aturan terkait perijinan usaha penjualan daging, pelaku usaha yang secara mandiri menginginkan pengawasan dan pengujian secara berkala, pelaku usaha kooperatif dengan petugas monitoring, pembinaan secara intensif terhadap pelaku usaha perikanan dan PAH.

Adapun faktor penghambat keberhasilan capaian program diantaranya masih ada pedagang ikan asin yang masih kurang kesadaran akan pentingnya keamanan pangan terutama kandungan formalin, daya beli konsumen ikan asin yang semakin menurun mengakibatkan beberapa produk ikan asin yang cepat berbau tengik dan berjamur.

Dukungan terhadap capaian kinerja program ini diperoleh dari 1 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan, dengan rincian aktivitas yang dilakukan pada setiap sub kegiatan sebagai berikut :

a. Sub Kegiatan Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan

Memiliki indikator kinerja output Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan dengan target 24 laporan, tercapai sebesar 100%, dengan realisasi 24 laporan yang terdiri atas 12 laporan hasil pengawasan produk pangan asal hewan (1 laporan/bulan) dan 12 laporan hasil pengawasan produk pangan asal perikanan (1 laporan/bulan).

Faktor pendorong tercapainya kinerja diantaranya karena adanya kerjasama antar instansi terkait berjalan dengan baik, lokasi yang mudah dijangkau untuk pengawasan qurban serta pemateri workshop yang kooperatif. Adapun faktor penghambat tercapainya kinerja diantaranya adalah karena pedagang ikan asin tidak mengetahui asal komoditasnya dan sulit ditelusuri, adanya kekhawatiran pasca pengawasan terhadap komitmen unit usaha dalam mematuhi hasil pembinaan yang dilakukan, unit usaha yang diawasi cukup banyak, sehingga pemerataan pembinaan agak terlambat, kurang optimalnya pengawasan kurban dikarenakan pelaksanaan yang bersamaan, kurangnya personil pengawasan kurban, keterbatasan informasi timbal balik ke dinas tentang tindak lanjut edukasi sosialisasi pada masjid yang diundang, masih ada panitia pelaksanaan kurban di wilayah yang kurang memahami penanganan daging kurban.

Aktivitas yang dilakukan pada Sub Kegiatan ini adalah :

- FGD Perencanaan Sistem Keamanan Pangan Yogyakarta Terpusat dan Terintegrasi, dilaksanakan sebanyak 1 kali dengan sasaran peserta OPD terkait.
- Kampanye Minum Susu, dilaksanakan sebanyak 2 kali dengan sasaran peserta masyarakat serta pelajar sebanyak 500 orang, dan Gerakan Minum Susu dengan sasaran pelajar sebanyak 1.500 orang, melalui pemnyampaikan informasi mengenai nilai gizi dan manfaat susu, serta dengan pembagian susu sapi segar. Kampanye Minum Susu dilaksanakan di SDN Timuran dan SDN Bener, sedangkan Gerakan Minum Susu dilaksanakan di TK Negeri 8, Festival Pangan Lokal, Gebyar Paud Ngampilan, Gebyar Paud Gedongtengen, SMPN 11, Kemantren Kotagede, Kemantren Mergangsan, Kemantren Jetis dan gedung serbaguna Mancasan.
- Sosialisasi Mutu dan Keamanan Pangan Asal Hewan dan Ikan dilaksanakan dengan sasaran kepada pedagang pasar tradisional dan modern, pelaku usaha,

jagal, masyarakat di wilayah Kota Yogyakarta sebanyak 3 kali untuk pangan asal hewan bertempat di kelurahan Purwokinanti, Kelurahan Panembahan, dan Kelurahan Kricak, dan 3 kali untuk pangan asal ikan Kelompok Tani Sekar Niaga Wirobrajan, Kelompok Tani Wanita Sejahtera Kelurahan Muja Muju dan Kelompok Tani Kemantren Gondokusuman.



Sosialisasi Mutu Pangan Asal Hewan

Sosialisasi Mutu Pangan Asal Ikan

- Pelaksanaan Pemantauan dan Pemeriksaan Pemotongan Hewan Kurban dilaksanakan dengan sasaran kepada pedagang pasar tradisional dan modern, pelaku usaha, jagal, masyarakat di wilayah Kota Yogyakarta. Aktivitas ini meliputi pelaksanaan sosialisasi pemotongan hewan qurban sebanyak 14 kali di setiap Kemantren, workshop pemotongan hewan qurban sebanyak 1 kali untuk 120 orang takmir masjid bertempat di STAIM, serta pemantauan pemotongan hewan qurban yang meliputi pemeriksaan kesehatan hewan, antemortem dan postmortem selama 4 hari pada 520 lokasi pemotongan hewan qurban di kota Yogyakarta (lokasi dapat dilihat pada https://s.id/Pangan_DPPYk)



- Pengawasan Mutu Pangan Asal Hewan dan Ikan dilakukan dengan monitoring sebanyak 55 kali dan pengambilan sampel asal ikan sebanyak 600 sampel dari 60 pedagang, monitoring sebanyak 55 kali dengan pengambilan sampel PAH sebanyak 600 sampel dari 118 pedagang bulan dengan sasaran para pedagang pasar tradisional dan modern, pelaku usaha, masyarakat melalui monitoring dan pengambilan sampel uji mutu pangan asal hewan dan asal ikan di Pasar Beringharjo, Pasar Kranggan, Pasar Lempuyangan, Pasar Talok, Pasar Demangan, Pasar Kotaede, Pasar Pathuk, Pasar Senen, Pasar Sentul, Pasar Prawirotaman,

Pasar Pujokusuman, Pasar Giwangan, Pasar Gedongkuning, Pasar Ngasem, Pasar Legi, dan Pasar Serangan.



b. Sub Kegiatan Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner

Memiliki indikator kinerja output Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan target 24 laporan, tercapai sebesar 100%, dengan realisasi 24 laporan yang terdiri atas 12 laporan hasil pengujian mutu dan keamanan produk pangan asal hewan (1 laporan/bulan) dan 12 laporan hasil laporan hasil pengujian mutu dan keamanan produk pangan asal perikanan (1 laporan/bulan).

Faktor pendorong tercapainya kinerja diantaranya karena tersedianya bahan dan peralatan laboratorium cukup lengkap, serta adanya dukungan SDM cukup baik. Adapun faktor penghambat tercapainya kinerja diantaranya adalah terkadang saat pengujian muncul atau ditemukan hasil uji yang di luar sop dari test kit lab, sehingga di khawatirkan muncul kondisi hasil positif palsu atau negatif palsu dan hal ini membutuhkan uji banding untuk memastikan hasil alat uji yang dipakai, serta pengujian keamanan pangan masih bersifat kualitatif.

Aktivitas yang dilakukan pada Sub Kegiatan ini adalah :

- Pengujian mutu produk hewan dan perikanan yang dilaksanakan melalui pengambilan sampel 6-7 kali/bulan sebanyak 600 sampel Pangan Asal Hewan dan 600 sampel Pangan Asal Ikan. Sampel akan diuji melalui Pengujian sampel PAH di Laboratorium Mutu Pangan dengan metode uji eber, h₂s, postma, gelonggong (daging merah), uji durante (ayam), uji spesies (adonan), uji formalin (kikil dan usus), uji kualitas (susu), uji kualitas dan uji organoleptik (telur), uji formalin dan organoleptik (ikan).



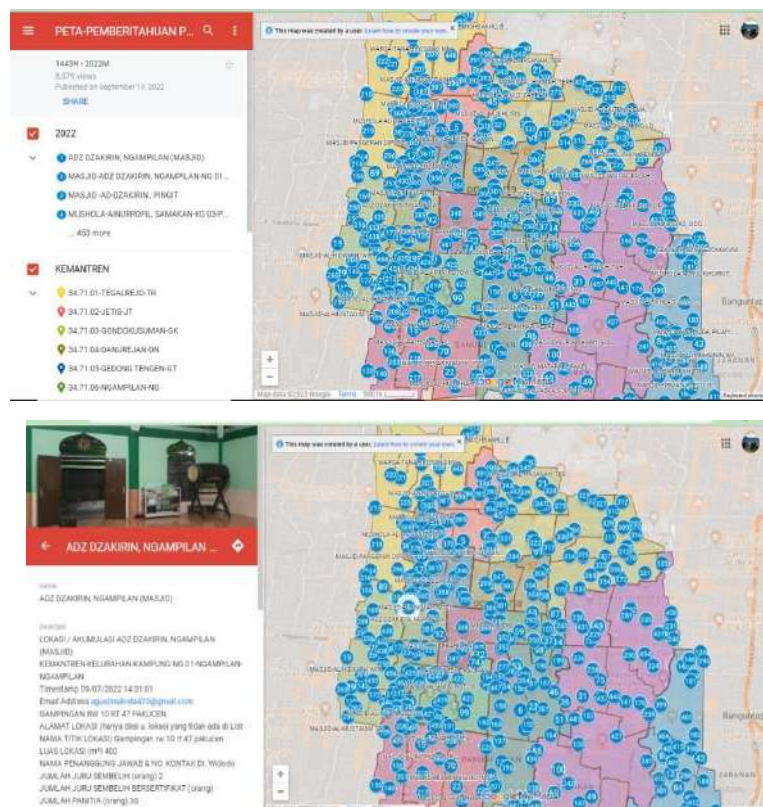
3.1.6 Inovasi yang Mendukung Pencapaian Kinerja

1. Peta Informasi TPH (Tempat Pemotongan Hewan) Kurban di Luar RPH

Pada tahun 2021 Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta berinisiatif untuk mengubah sistem pemberitahuan tempat pemotongan hewan kurban yang semula manual menjadi online (Google Form) dan juga membuat peta informasi TPH kurban dan jumlah hewan yang di sembelih kemudian di integrasikan ke Google Map. Sejalan dengan

itu, tahun 2022 dilakukan pengembangan pada peta informasi TPH kurban yang semula hanya titik dan jumlah hewan yang di sembelih menjadi lebih lengkap dan disesuaikan dengan laporan sistem informasi kesehatan hewan nasional (iSIKHNAS) sehingga masyarakat ataupun instansi terkait dapat dengan mudah mengakses data informasi secara real time online.

Dengan adanya Peta Informasi Tempat Pemotongan Hewan Kurban di Luar RPH masyarakat tidak perlu datang ke dinas untuk melaporkan titik sembelih dan proses pengumpulan data menjadi lebih cepat. Petugas pemantau hewan kurban mudah menemukan titik lokasi pemotongan sehingga dapat dengan mudah untuk melaksanakan pemeriksaan antemortem dan postmortem. Dengan inovasi ini data informasi yang diperoleh bersifat real time sehingga mempermudah dalam mengolah data. Proses berjalan cepat, akuntabel, dan cost effective. Antusiasme masyarakat juga semakin baik karena proses pelaporannya lebih mudah dan praktis.



Link peta :

<https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1RC2DoKcNpNURn2yJGERnPjVnGVBkdK9k&ll=-7.798132317058736%2C110.37343808372802&z=14>

3.1.7 Kolaborasi Lintas Sektor yang Mendukung Pencapaian Kinerja

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan mutu dan keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT) dilakukan secara intensif, bersinergi dan berkolaborasi dengan instansi terkait yaitu Dinas Kesehatan, Dinas Perdagangan, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD), serta Stasiun Karantina Ikan Pengendalian Mutu (BKIPM) dan Balai Besar Veteriner (BBVET) Wates, Kulonprogo.

**ANALISIS KINERJA SASARAN STRATEGIS 3 :
MENINGKATNYA ANGKA KONSUMSI IKAN**

Tabel 3.9 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran Strategis 3

Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
Meningkatnya Angka konsumsi ikan	Angka konsumsi ikan	Angka konsumsi ikan berdasarkan hasil survei SUSENAS Angka Konsumsi Ikan merupakan jumlah kilogram ikan yang dikonsumsi masyarakat Indonesia selama satu tahun dalam bentuk konversi setara konsumsi ikan utuh segar.

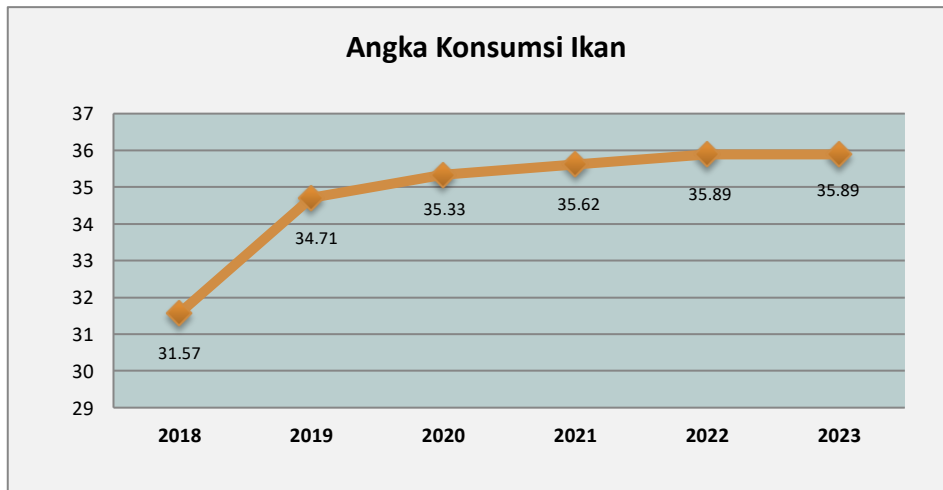
Perhitungan Angka Konsumsi Ikan (AKI)
 $AKI = A + B + C$
 A = KIDRT (Konsumsi Ikan Dalam Rumah Tangga)
 (Hasil olah data Susenas dari BPS)
 B = KILRT (Konsumsi Ikan Luar Rumah Tangga)
 C = Konsumsi Ikan Tidak Tercatat
 Angka koefisien 10 % (maksimal) merupakan angka yang disepakati oleh KKP sesuai dengan sensus Bapok oleh BPS

Tabel 3.10 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 3

Sasaran Strategis	Kinerja							
	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2022	Target RKPD 2023	Target Renstra	Realisasi 2023	% capaian 2023	% capaian Renstra
Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan	Angka konsumsi ikan	Kg/kapita/tahun	35.43	35.46	35.55	35.89	101.21%	100.96%

3.1.1 Membandingkan terhadap capaian kinerja tahun lalu.

Terhadap capaian kinerja tahun sebelumnya, Angka Konsumsi Ikan tidak mengalami peningkatan, namun demikian capaian kinerja ini telah melampaui target kinerja tahun 2023.

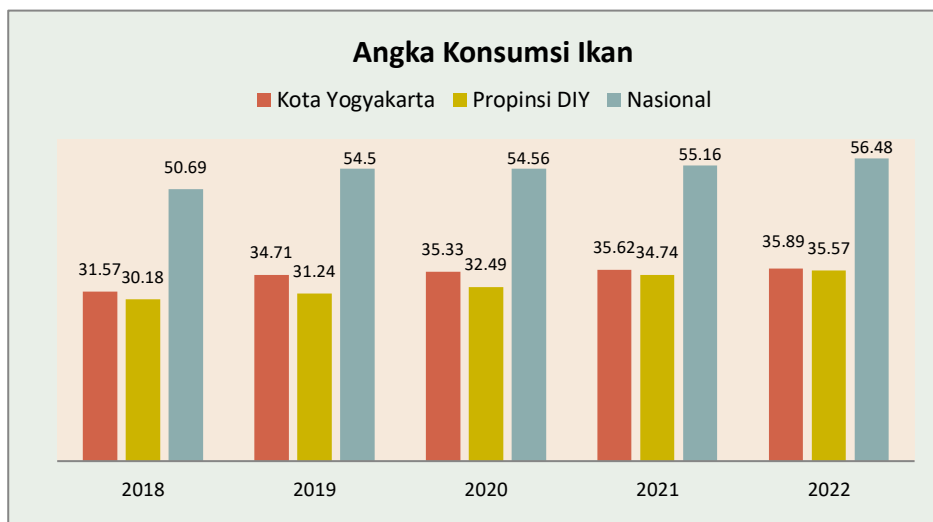


3.1.2 Membandingkan terhadap target capaian jangka menengah.

Terhadap capaian jangka menengah akhir periode Renstra 2023-2026, target akhir Renstra adalah 35.55%. Dengan realisasi yang diperoleh pada tahun 2023 yaitu sebesar 35.89%, maka target akhir Renstra telah terlampaui dengan capaian 100.96%. Dengan kondisi capaian ini maka indikator kinerja Sasaran Strategis 3 ini akan menjadi bahan evaluasi kinerja perangkat daerah, dan apabila diperlukan akan dilakukan perbaikan kinerja atau Reviu Renstra 2023-2026 untuk menyesuaikan target capaiannya.

3.1.3 Membandingkan terhadap target nasional.

Apabila dibandingkan dengan target nasional maka Angka Konsumsi Ikan di Yogyakarta masih cukup jauh angkanya, namun Angka Konsumsi Ikan di Kota Yogyakarta masih relatif lebih tinggi daripada Angka Konsumsi Ikan Propinsi DIY.



3.1.4 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Faktor – faktor yang menunjang keberhasilan tercapainya target indikator kinerja sasaran strategis 3 ini diantaranya adalah bahwa kegiatan sosialisasi Gemar Ikan sudah dilaksanakan sebanyak 10 kali di SD Negeri wilayah Kota Yogyakarta dan siswa SD sangat antusias dan interaktif mengikuti sosialisasi Gemar Ikan. Disamping itu masyarakat juga sangat antusias mengikuti bimtek olahan ikan karena menu olahan menarik dan inovatif.

Adapun faktor-faktor yang menghambat keberhasilan tercapainya target indikator kinerja sasaran strategis 3 adalah dalam perencanaan dan tatakala pelaksanaan Gemar Ikan harus menyesuaikan dengan kalender pendidikan.

Upaya solusi yang dilakukan diantaranya adalah dengan meningkatkan variasi olahan berbahan dasar ikan serta memberikan edukasi Gemar Ikan pada sekolah untuk meningkatkan minat masyarakat terutama anak-anak sejak usia dini untuk mengkonsumsi ikan.

3.1.5 Analisis Efisiensi penggunaan sumber daya

Dapat dilihat dari Tabel berikut bahwa persentase kinerja sasaran strategis 3 terhadap target tahun 2023 sebesar 101.21% tercapai lebih besar dari persentase capaian kinerja

anggaran 99.76%, yang berarti dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran dalam pencapaian sasaran strategis Meningkatkan Angka Konsumsi Ikan telah tercapai secara **EFISIEN**.

Sasaran Strategis	Kinerja						Anggaran		
	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	% capaian 2023	Target	Realisasi	% capaian
Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan	Angka konsumsi ikan	Kg/kapita/tahun	35.43	35.46	35.89	101.21%	982,536,668	980,169,800	99.76%

3.1.6 Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran Dinas.

Program Pendukung	Kinerja					Anggaran		
	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	% capaian 2023	Target	Realisasi	% capaian
Pengelolaan Perikanan Budidaya	Peningkatan Persentase kelompok pembudidaya ikan yang berizin	%	1.27	3.1	244.09%	855,289,168	853,161,300	99.75%
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase pengolahan dan pemasar hasil perikanan yang berizin	%	40	40	100.00%	127,247,500	127,008,500	99.81%

Keberhasilan capaian kinerja indikator sasaran 3 didukung oleh 2 (dua) program yaitu :

1. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Indikator kinerja program ini yaitu Peningkatan Persentase Kelompok Pembudidaya Ikan yang Berizin dapat tercapai dengan realisasi sebesar 3.1% yang dihitung dari hasil perolehan jumlah pembudidaya ikan yang telah berizin sebanyak 22 kelompok, dibagi jumlah seluruh pembudidaya ikan di Kota Yogyakarta sebanyak 710 kelompok dan tingkat capaian 244.09%. Dengan tingkat capaian penggunaan anggaran sebesar 99.75%, program Pengelolaan Perikanan Budidaya dapat dikatakan tercapai dengan efisien.

Faktor pendukung keberhasilan capaian program ini adalah karena terjalinnya komunikasi yang baik antara Petugas (dinas, penyuluh dan OPD terkait) dengan Masyarakat sehingga memudahkan dalam koordinasi kegiatan, antusias dan minat peserta Agro Expo dan kontes ikan hias tinggi dalam kegiatan yang diadakan oleh dinas, lokasi kegiatan (Sub Raiser) strategis dan pemanfaatan lebih luasa karena fasilitas milik Dinas. Adapun faktor penghambat keberhasilan capaian program diantaranya karena Pelaksanaan kegiatan menyesuaikan waktu dan kegiatan komunitas perikanan

Dukungan terhadap capaian kinerja program ini diperoleh dari 2 Kegiatan dan 3 Sub Kegiatan, dengan rincian aktivitas yang dilakukan pada setiap sub kegiatan sebagai berikut :

a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan

Memiliki indikator kinerja output Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan dengan target 71 kelompok, tercapai sebesar 100%, dengan realisasi 71 kelompok pembudidaya ikan kecil telah mendapatkan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan pembudidaya ikan.

Faktor pendorong tercapainya kinerja diantaranya karena terjalannya komunikasi yang baik antara Petugas (dinas, penyuluh dan OPD terkait) dengan masyarakat sehingga memudahkan dalam koordinasi kegiatan, antusias dan minat pelaku utama perikanan dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh DPP. Adapun faktor penghambat tercapainya kinerja diantaranya adalah karena pelaksanaan kegiatan menyesuaikan waktu dan kegiatan komunitas perikanan.

Aktivitas yang dilakukan pada Sub Kegiatan ini adalah :

- Bimtek pengembangan budidaya lele lanjutan, dilaksanakan sebanyak 1 kali dengan sasaran anggota kelompok budidaya perikanan, melalui metode Bimtek yang disertai dengan pendampingan kelompok secara rutin, berlokasi di Balai Benih Ikan (BBI) Nitikan.
- Bimtek penguatan kapasitas pokmaswas dan pengawasan perairan, dilaksanakan sebanyak 1 kali dengan sasaran anggota Pokmaswas, melalui metode Bimtek yang disertai dengan pendampingan kelompok secara rutin, berlokasi di Balai Benih Ikan (BBI) Nitikan.
- Restocking ikan, dilaksanakan melalui penebaran bibit ikan non invasif pada 3 sungai yang ada di Kota Yogyakarta (Code, Winongo, Gajahwong) guna mempertahankan kondisi ekosistem air sungai dan perikanan, sebanyak total sekitar 45.000 bibit ikan tawes dan wader yang diterbakan pada 3 sungai tersebut.
- Kaji Terap Pendederan lele, dilaksanakan oleh Penyuluh Perikanan bertempat di BBI Mendungan, sebanyak 6 unit. Kaji Terap dimaksudkan sebagai uji coba dari para penyuluh sebelum disosialisasikan kepada kelompok perikanan di masyarakat.

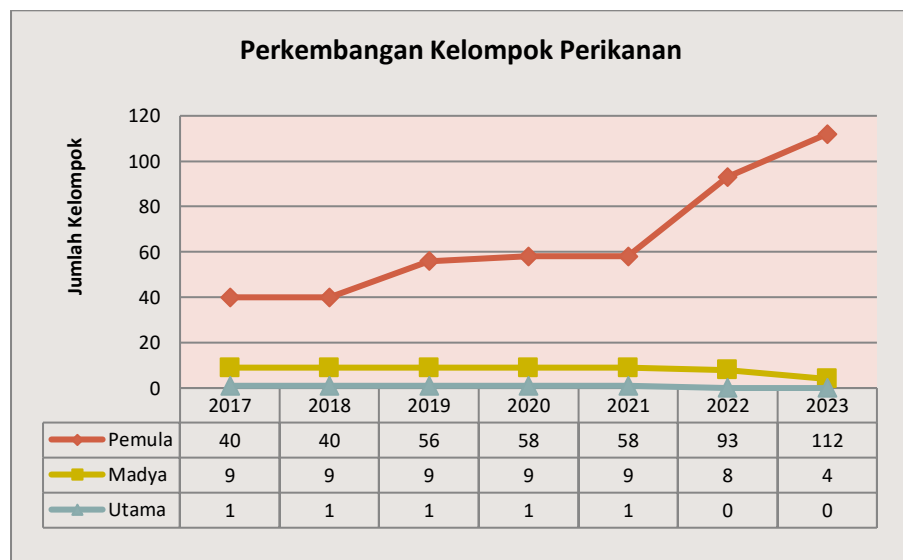


- Pendampingan kelompok perikanan, dilaksanakan dengan metode pertemuan rutin terhadap 12 kelompok perikanan yang terdiri dari Pokdakan, Pohlhasar dan Pokmaswas dengan lokasi pertemuan di Pokdakan Mina Sayidan (Prawirodrjan), Pokdakan Mina Arum (Bausasran); Poklhasar Joy 13 (Mergangsan), Pokdakan Jati Berkah (Kricak), Pokdakan Mina Sekawan Tigo (Bumijo), Pokdakan Mina Makaryo (Brontokusuman), Pokdakan Mina Makmur (Bausasran), Pokdakan Mina Rejo (Karangwaru), Pokdakan Maju Makmur (Prenggan), Pokdakan Mandiri Raharjo (Brontokusuman), Pokdakan Blumbang Lowanu (Brontokusuman), serta Pokmaswas Gajahwong Tirto Piguno (Prenggan).

- Pengembangan kelompok perikanan yang naik kelas, dilaksanakan dengan metode pertemuan kelompok dan pendampingan terhadap 4 Pokdakan yang naik kelas pada penilaian kelas kelompok, yaitu di Pokdakan Mina Sekawan Tigo (Bumijo, Jetis), Pokdakan Mina Asoka (Klitren), Pokdakan Gambir Mino (Pandeyan) serta Pokdakan Mina Code Sejahtera (Prawirodirjan).
- Penilaian kelas kelompok dilakukan secara rutin setiap tahun untuk menilai perkembangan kelompok perikanan terhadap 14 kelompok pembudidaya ikan yang ada di Kota Yogyakarta, yaitu Pokdakan Mina Sayidan (Prawirodrjan); Pokdakan Mina Arum (Bausasran); Poklalsar Joy 13 (Mergangsari); Pokdakan Jati Berkah (Kricak); Pokdakan Mina Sekawan Tigo (Bumijo); Pokdakan Mina Makaryo (Brontokusuman); Pokdakan Mina Makmur (Bausasran); Pokdakan Mina Rejo (Karangwaru); Pokdakan Maju Makmur (Prenggan); Pokdakan Mandiri Raharjo (Brontokusuman); Pokdakan Blumbang Lowanu (Brontokusuman); Pokmaswas Gajahwong Tirto Piguno (Prenggan)

Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk mengetahui progres perkembangan kelompok perikanan. Teknis penilaiannya mengacu pada indikator-indikator yang telah disusun oleh Tim Penilai. Untuk kategori Pemula (skor 0 – 350), Kategori Madya (Skor 351 – 650), Kategori Utama (skor 651 – 1000). Skor penilaian meliputi perencanaan, kemampuan berorganisasi, akses kelembagaan, kemampuan wirausaha dan kemandirian.

Dari hasil penilaian kelas kelompok perikanan pada tahun 2023 ini pada kelas Madya terdapat 4 kelompok yang mengalami penurunan kelas menjadi Pemula, karena tidak memenuhi kategori penilaian, sedangkan secara keseluruhan terjadi peningkatan jumlah kelompok perikanan sebanyak 15 kelompok baru sehingga total menjadi menjadi 116 kelompok pada tahun 2023 ini.



- Sarasehan Temu Pelaku Usaha Perikanan dilaksanakan melalui metode Forum Group Discussion sebanyak 1 kali dengan sasaran peserta dari Pelaku usaha perikanan Kota Yogyakarta (Pokdakan, Poklalsar, Pokmaswas).

b. Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan

Memiliki indikator kinerja output Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan dengan target 6 kelompok, tercapai sebesar 100%, dengan realisasi 6 kelompok usaha dan komunitas pembudidaya ikan kecil telah memperoleh pendampingan.

Faktor pendorong tercapainya kinerja diantaranya karena terjalannya komunikasi yang baik antara petugas (dinas, penyuluh dan OPD terkait) dengan masyarakat sehingga memudahkan dalam koordinasi kegiatan, antusias dan minat peserta Agro Expo dan kontes ikan hias tinggi dalam kegiatan yang diadakan oleh dinas, lokasi pelaksanaan kegiatan (Sub Raiser) strategis dan pemanfaatan lebih leluasa karena fasilitas milik Dinas. Adapun faktor penghambat tercapainya kinerja diantaranya adalah karena pelaksanaan kegiatan menyesuaikan waktu dan kegiatan komunitas perikanan, pelaksanaan kesulitan menyinkronkan waktu dengan komunitas, area Sub Raiser belum tertata secara maksimal untuk pelaksanaan event Agro Expo atau sejenisnya.

Aktivitas yang dilakukan pada Sub Kegiatan ini adalah :

- Agro Expo dilaksanakan sebanyak 1 kali dengan bentuk kegiatan berupa pameran dan bazaar dari para pelaku utama usaha perikanan dan pertanian, bertempat di Sub Raiser Ikan Hias, Dongkelan.



- Bimtek budidaya ikan hias diberikan kepada peserta dari pelaku usaha dan para hobiis ikan hias sebanyak 1 kali yang dilaksanakan di Balai Benih Ikan (BBI) Nitikan, Bimtek pengembangan budidaya lele pemula diberikan kepada peserta dari warga masyarakat berdasarkan usulan Pokok Pikiran anggota Dewan serta anggota Kelompok Pembudidaya Ikan sebanyak 7 kali, bertempat di Balai Benih Ikan (BBI) Nitikan.
- Kontes ikan hias dilaksanakan sebanyak 1 kali bersamaan dengan acara Agro Expo yang diselenggarakan bertempat di Sub Raiser Ikan Hias, dengan peserta dari komunitas penggemar/hobiis ikan hias serta pelaku usaha perikanan maupun pertanian.



- Bimtek budidaya ikan hias dilaksanakan sebanyak 2 kali dengan sasaran peserta dari pembudidaya ikan hias, komunitas dan hobies. Materi praktek berupa pembuatan aquascape serta teknis budidaya ikan hias dan hama penyakit, bertempat di Balai Benih Ikan (BBI) Nitikan.
- Bimtek budidaya ikan konsumsi dilaksanakan sebanyak 1 kali dengan sasaran peserta dari anggota Pokdakan yang aktif dan belum mengikuti bimtek sebelumnya, bertempat di Balai Benih Ikan (BBI) Nitikan.
- Bimtek pembenihan ikan Lele dilaksanakan sebanyak 1 kali dengan sasaran peserta dari anggota Pokdakan Jati Berkah Kricak (Calon UPR), bertempat di Pokdakan Jati Berkah Kricak.

c. *Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota*

Memiliki indikator kinerja output Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan target 3 unit, tercapai sebesar 100%, dengan realisasi 3 unit prasarana pembudidaya ikan di BBI Nitikan, BBI Mendungan serta Sub Raiser Ikan Hias.

Faktor pendorong tercapainya kinerja diantaranya karena perencanaan dan pengelolaan anggaran sesuai dengan kebutuhan, pengadaan dan belanja terlaksana sesuai dengan tatakala kegiatan, serta tersedianya sarana prasarana peralatan kerja yang memadai dan sumber daya manusia pengelola yang terampil. Adapun faktor penghambat tercapainya kinerja diantaranya adalah karena faktor cuaca, serta adanya kerusakan pada mesin dan peralatan.

Aktivitas yang dilakukan pada Sub Kegiatan ini adalah :

- Pengelolaan sarana prasarana di BBI Mendungan untuk pembenihan ikan konsumsi.
- Pengelolaan sarana prasarana di BBI Nitikan untuk pembenihan ikan hias.
- Pengelolaan sarana prasarana di Sub Raiser untuk pembesaran ikan arwana.

2. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Indikator kinerja program ini yaitu Persentase Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan yang Berizin dapat tercapai dengan realisasi sebesar 40% dan tingkat capaian 100% berdasarkan tercapainya sebanyak 40% kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan telah berizin dibandingkan seluruh kelompok pengolah dan pemasar yang ada di Kota Yogyakarta. Dengan tingkat capaian penggunaan anggaran sebesar 99.81%, program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dapat dikatakan tercapai dengan efisien.

Faktor pendukung keberhasilan capaian program ini adalah karena terjalannya komunikasi yang baik antara petugas (dinas, penyuluh dan OPD terkait) dengan masyarakat sehingga memudahkan dalam koordinasi kegiatan, antusias dan minat pelaku utama perikanan dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh DPP, materi dan narasumber pada kegiatan Bimtek Olahan Ikan menarik dan variatif. Adapun faktor penghambat keberhasilan capaian program diantaranya karena tatakala pelaksanaan Gemarikan menyesuaikan kalender pendidikan.

Dukungan terhadap capaian kinerja program ini diperoleh dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan, dengan rincian aktivitas yang dilakukan pada setiap sub kegiatan sebagai berikut :

a. *Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan Atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil*

Memiliki indikator kinerja output Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko dengan target 19 unit usaha kelompok, tercapai sebesar 100%, dengan realisasi 19 unit usaha perikanan telah memperoleh bimbingan usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil.

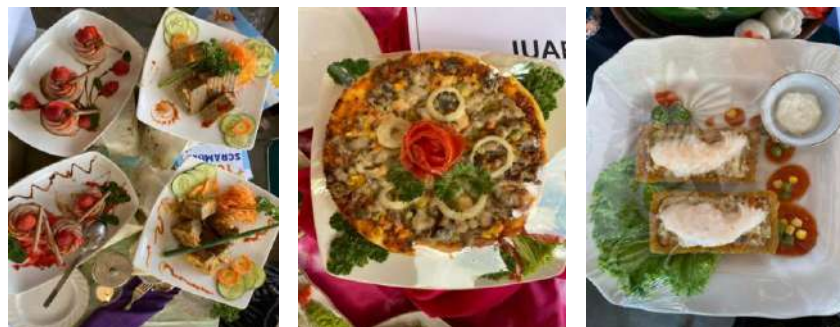
Faktor pendorong tercapainya kinerja diantaranya karena terjalannya komunikasi yang baik antara petugas (dinas, penyuluh dan OPD terkait) dengan masyarakat sehingga memudahkan dalam koordinasi kegiatan, antusias dan minat pelaku utama perikanan dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh DPP, serta materi dan narasumber pada kegiatan Bimtek Olahan Ikan menarik dan variatif. Adapun faktor penghambat tercapainya kinerja diantaranya adalah karena pelaksanaan kegiatan menyesuaikan waktu dengan kalender pendidikan.

Aktivitas yang dilakukan pada Sub Kegiatan ini adalah :

- Bimtek olahan ikan dilaksanakan dengan metode pelatihan dan praktek demo memasak olahan dengan bahan dasar ikan, dengan sasaran peserta adalah anggota kelompok pengolah dan pemasar perikanan serta perwakilan PKK dari 14 kemantren, yg dilaksanakan sebanyak 6 kali di kantor Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta.



- Kontes olahan ikan dilaksanakan dengan metode lomba menu masakan hasil olahan dengan bahan dasar ikan, dengan sasaran peserta sebanyak 14 regu perwakilan PKK dari setiap kemantren.



- Sosialisasi gemarikan dilaksanakan dengan sasaran peserta siswa SD Negeri di Kota Yogyakarta sebanyak 11 kali bertempat di SDN Tegalrejo, SDN Pandeyan, SDN Keputran "A", SDN Jetis 1, SDN Rejowinangun 3, SDN Sosrowijayan, SDN Pilahan, SDN Kotagede 1, SDN Glagah, SDN Prawirotaman, SDN Tahunan.

**ANALISIS KINERJA SASARAN STRATEGIS 4 :
MENINGKATNYA PERSENTASE KENAIKAN KELAS KELOMPOK TANI**

Tabel 3.11 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran Strategis 4

Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
Meningkatnya Persentase kenaikan kelas kelompok tani	Persentase kenaikan kelas kelompok tani	Jumlah kelompok tani yang mengalami kenaikan kelas kelompok dibagi jumlah kelompok tani di Kota Yogyakarta dikali 100 persen. Hasil perhitungan : - Jumlah kelompok tani yang mengalami kenaikan kelas = 16 kelompok - Jumlah kelompok tani = 276 kelompok

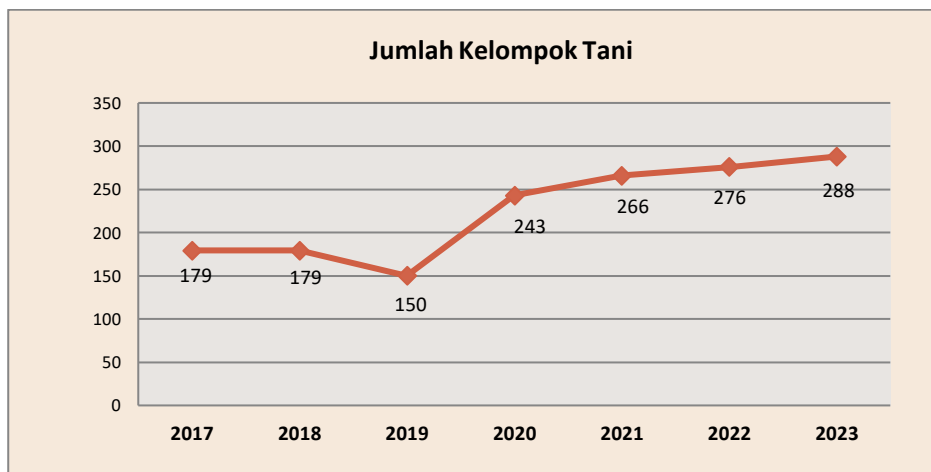
Tabel 3.12 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4

Sasaran Strategis	Kinerja							
	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2022	Target 2023	Target Renstra	Realisasi 2023	% capaian 2023	% capaian Renstra
Meningkatnya Persentase Kenaikan Kelas Kelompok Tani	Persentase kenaikan kelas kelompok tani	%	2.26	3.99	4.81	5.80	145.36%	120.58%

Target Capaian Kinerja Sasaran Strategis 4 pada Tahun 2023 dapat tercapai dengan tingkat capaian sebesar 145.36%. Realisasi capaian sebesar 5.80% diperoleh dari hasil perhitungan jumlah kelompok tani yang mengalami kenaikan kelas kelompok sebanyak 16 kelompok, dibagi jumlah kelompok tani yang ada di Kota Yogyakarta sebanyak 276 kelompok.

3.1.1 Membandingkan terhadap capaian kinerja tahun lalu.

Terhadap capaian kinerja tahun sebelumnya, jumlah kelompok tani mengalami peningkatan sebanyak 12 kelompok baru.



Jumlah Kelompok tani kelas Pemula mengalami penurunan karena sebanyak 13 kelompok mengalami kenaikan kelas menjadi Lanjut, namun disisi lain terdapat penambahan jumlah kelompok tani baru sebanyak 12 kelompok pada kelas Pemula. Selain itu juga terdapat 2 kelompok tani kelas Lanjut yang naik kelas menjadi Madya, dan 1 kelompok tani Madya yang naik kelas menjadi Utama, sehingga total terdapat 16 kelompok yang mengalami kenaikan kelas kelompok.

3.1.2 Membandingkan terhadap target capaian jangka menengah.

Terhadap capaian jangka menengah akhir periode Renstra 2023-2026, target akhir Renstra adalah 4.81%. Dengan realisasi yang diperoleh pada tahun 2023 yaitu sebesar 5.80%, maka target akhir Renstra telah terlampaui dengan capaian 120.58%. Dengan kondisi capaian ini maka indikator kinerja Sasaran Strategis 4 ini akan menjadi bahan evaluasi kinerja perangkat daerah, dan apabila diperlukan akan dilakukan perbaikan kinerja atau Reviu Renstra 2023-2026 untuk menyesuaikan target capaiannya.

3.1.3 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Faktor – faktor yang menunjang keberhasilan tercapainya target indikator kinerja sasaran strategis 4 ini diantaranya adalah berbagai kegiatan yang diselenggarakan Dinas seperti pembinaan kelompok tani/gapoktan, bimbingan teknis, gelar potensi dan kontes dapat meningkatkan semangat anggota kelompok tani. Disamping itu partisipasi aktif dari kelompok tani dan penyuluh pertanian, serta antusiasme dan semangat anggota kelompok tani untuk bergotong royong dalam kegiatan rutin kelompok tani, kegiatan penyuluhan semakin meningkat dengan adanya tambahan SDM Penyuluh dan antusiasme masyarakat terhadap budidaya pertanian, peternakan serta perikanan semakin tinggi, sehingga perkembangan jumlah kelompok tani juga mengalami peningkatan.

Adapun faktor-faktor yang menghambat keberhasilan tercapainya target indikator kinerja sasaran strategis 4 adalah tidak semua anggota kelompok tani dapat mengikuti kegiatan yang diselenggarakan Dinas, dan Masyarakat Kota Yogyakarta yang tergabung dalam kelompok tani bukan merupakan petani murni, sehingga tidak semuanya memiliki dasar ilmu pertanian yang baik, dan kegiatan pertanian yang ada sangat tergantung pada program dari pemerintah.

Upaya solusi yang dilakukan diantaranya adalah melalui meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Gapoktan di wilayah DIY dalam penyediaan cadangan beras pemerintah daerah, pendampingan oleh penyuluh pertanian secara intensif, meningkatkan koordinasi, edukasi dan komunikasi antar petani dengan memanfaatkan media sosial, serta dengan melibatkan petani maupun kelompok tani dalam kegiatan Gelar Potensi, pameran dan bazaar pertanian.

3.1.4 Analisis Efisiensi penggunaan sumber daya

Sasaran Strategis 4	Kinerja						Anggaran		
	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	% capaian 2023	Target	Realisasi	% capaian
Meningkatnya Persentase Kenaikan Kelas Kelompok Tani	Persentase kenaikan kelas kelompok tani	%	2.26	3.99	5.80	145.36%	1,913,853,500	1,904,405,933	99.51%

Dapat dilihat dari Tabel di atas bahwa persentase kinerja sasaran strategis 4 terhadap target tahun 2023 sebesar 145.36% tercapai lebih besar dari persentase capaian kinerja anggaran 99.51%, yang berarti dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran dalam pencapaian sasaran strategis 1 Meningkatnya Persentase Kenaikan Kelas Kelompok Tani telah tercapai secara **EFISIEN**.

3.1.5 Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran Dinas.

Keberhasilan capaian kinerja indikator sasaran 4 didukung oleh 3 (tiga) program yaitu :

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Indikator kinerja program ini yaitu :

- a. Persentase petani tanaman pangan yang telah memenuhi prosedur penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida sesuai aturan dapat tercapai dengan realisasi sebesar 100%, dimana dari 130 petani tanaman padi seluruhnya telah memenuhi prosedur penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida. Dengan tingkat capaian penggunaan anggaran sebesar 95,15%, indikator program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dapat dikatakan tercapai dengan efisien.
- b. Peningkatan persentase varietas tanaman buah yang telah bersertifikat dapat tercapai dengan realisasi sebesar 100%, dimana dari target 2.06% varietas tanaman buah yang telah bersertifikat seluruhnya tercapai. Dengan tingkat capaian penggunaan anggaran sebesar 99.63%, indikator program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dapat dikatakan tercapai dengan efisien.

Program Pendukung	Kinerja					Anggaran		
	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	% capaian 2023	Target	Realisasi	% capaian
Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase petani tanaman pangan yang telah memenuhi prosedur penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida sesuai aturan	%	100	100	100.00%	11,712,700	11,144,390	95.15%
	Peningkatan persentase varietas tanaman buah yang telah bersertifikat	%	2.06	2.06	100.00%	1,019,001,300	1,015,269,600	99.63%
Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Peningkatan jumlah prasarana pertanian yang dapat beroperasi dengan baik sesuai fungsinya	unit	22	22	100.00%	69,845,000	69,229,900	99.12%
Penyuluhan Pertanian	Cakupan bina kelompok tani	%	21.74	26.45	121.67%	813,294,500	808,762,043	99.44%

Faktor pendukung keberhasilan capaian program ini adalah karena adanya peran aktif dari PPL memantau dan melakukan pengawasan penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida petani, adanya kesadaran petani untuk menggunakan pupuk dan pestisida

sesuai aturan serta adanya dukungan OPD terkait (BP3MBTP). Adapun faktor penghambat keberhasilan capaian program diantaranya karena petani belum mempunyai dana untuk menebus pupuk bersubsidi, dan proses determinasi membutuhkan waktu lama dengan menunggu tanaman indukan berbuah 2 kali.

Dukungan terhadap capaian kinerja program ini diperoleh dari 2 Kegiatan dan 3 Sub Kegiatan, dengan rincian aktivitas yang dilakukan pada setiap sub kegiatan sebagai berikut :

a. Sub Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi

Memiliki indikator kinerja output Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi, tercapai sebesar 100%, dengan realisasi 2 laporan pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian yaitu laporan distribusi pupuk bersubsidi dan laporan penggunaan pestisida.

Faktor pendorong tercapainya kinerja diantaranya karena petani sudah mempunyai kartu tani, petani sudah menggunakan kartu tani dalam penebusan pupuk bersubsidi, dan pelayanan dari distributor dan agen mudah dan cepat. Adapun faktor penghambat tercapainya kinerja diantaranya adalah karena petani kurang paham petani dalam menggunakan kartu tani.

Aktivitas yang dilakukan pada Sub Kegiatan ini adalah :

- Pemantauan Produksi dan Penggunaan Alsintan dilaksanakan sebanyak 1 kali dengan sasaran kelompok tani bersawah bertempat di Kantor Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta
- Pendampingan Penyusunan RDKK Pupuk Bersubsidi dilaksanakan sebanyak 1 kali dengan sasaran kelompok tani bersawah bertempat di Kantor Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta
- Sosialisasi Kartu Tani dilaksanakan sebanyak 1 kali dengan sasaran kelompok tani bersawah bertempat di Kantor Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta
- Sosialisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dilaksanakan sebanyak 1 kali dengan sasaran kelompok tani bersawah bertempat di Kantor Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta
- Sosialisasi Penggunaan Pestisida dilaksanakan sebanyak 1 kali dengan sasaran kelompok tani bersawah bertempat di Kantor Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta
- Sosialisasi Penggunaan Pupuk Berimbang dilaksanakan sebanyak 1 kali dengan sasaran kelompok tani bersawah bertempat di Kantor Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta
- Bantuan Fasilitasi Premi Asuransi Pertanian (AUTP) sebanyak 8 kali musim tanam terhadap 28 petani bersawah.

b. Sub Kegiatan Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman

Memiliki indikator kinerja output Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian, tercapai sebesar 100%, dengan realisasi sebanyak 317 VUB tanaman pisang telah berhasil dilakukan penjaminan kemurnian dan kelestariannya.

Faktor pendorong tercapainya kinerja diantaranya karena adanya dukungan dari BRIN. Adapun faktor penghambat tercapainya kinerja diantaranya adalah karena

informasi untuk memperoleh varietas baru cukup sulit dilakukan karena bersifat tertutup.

Aktivitas yang dilakukan pada Sub Kegiatan ini adalah :

- Pengelolaan Kebun Hortikultura dilaksanakan untuk memproduksi benih dan bibit tanaman buah-buahan yang bersertifikat dan berlabel untuk menjaga kemurnian galurnya, melalui metode cangkok, sambung, okulasi dan stek.
- Pengelolaan Kebun Plasma Nutfah Pisang (KPNP) dilaksanakan untuk menjaga kelestarian varietas pisang yang ada di KPNP, dan juga sebagai bahan untuk memperbanyak benih pisang melalui metode kultur jaringan.



- Pengelolaan Laboratorium Kultur Jaringan dilaksanakan untuk memperbanyak benih pisang (planlet) melalui metode kultur jaringan.



- Pengelolaan Kebun Bibit Tegalrejo dilaksanakan untuk penanaman benih padi yang dikerjasamakan dengan salah satu petani di Kota Yogyakarta dengan sistem bagi hasil.

c. Sub Kegiatan Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman

Memiliki indikator kinerja output Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman, tercapai sebesar 100%, dengan realisasi 3 dokumen laporan hasil pelaksanaan peningkatan kualitas SDG pada Kebun Hortikultura.

Faktor pendorong tercapainya kinerja diantaranya karena adanya dukungan dari instansi terkait seperti BP3MBTP serta BRIN. Adapun faktor penghambat tercapainya kinerja diantaranya adalah karena proses determinasi membutuhkan waktu lama, sekitar 2 kali berbuah.

Aktivitas yang dilakukan pada Sub Kegiatan ini adalah :

- Pengelolaan kebun tanaman indukan bersertifikat melalui budidaya perbanyakan tanaman dengan sistem cangkok, sambung, okulasi dan setek.



2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Indikator kinerja program ini yaitu Peningkatan jumlah prasarana pertanian yang dapat beroperasi dengan baik sesuai fungsinya dapat tercapai dengan realisasi sebesar 100% sebanyak 22 unit prasarana pertanian dapat beroperasi dengan baik sesuai dengan fungsinya. Dengan tingkat capaian penggunaan anggaran sebesar 99.12%, program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian dapat dikatakan tercapai dengan efisien.

Faktor pendorong tercapainya kinerja diantaranya karena adanya pemeliharaan dan perawatan secara rutin, serta pemakaian yang sesuai dengan fungsinya. Adapun faktor penghambat tercapainya kinerja diantaranya adalah karena umur teknis peralatan dan faktor cuaca atau iklim.

Dukungan terhadap capaian kinerja program ini diperoleh dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan, dengan rincian aktivitas yang dilakukan pada setiap sub kegiatan sebagai berikut :

a. Sub Kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya

Memiliki indikator kinerja output Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipeliharadengan target 3 unit, tercapai sebesar 100%, dengan realisasi sebanyak 3 unit prasarana pertanian yaitu rehab greenhouse kebun hortikultura, pembuatan greenhouse Kebun Plasma Nutfah Pisang, serta pemeliharaan papan nama/baliho Kebun Plasma Nutfah Pisang.

Faktor pendorong tercapainya kinerja diantaranya karena tatakala pelaksanaan kegiatan disusun dengan baik, dan tersedianya SDM yang terampil dan cekatan. Adapun faktor penghambat tercapainya kinerja diantaranya adalah faktor iklim dan cuaca.

Aktivitas yang dilakukan pada Sub Kegiatan ini adalah :

- Rehab Greenhouse Kebun Hortikultura dilakukan untuk penggantian atap greenhouse (UV) yang telah rusak.
- Perbaikan baliho Kebun Plasma Nutfah Pisang dilakukan untuk memperbaharui papan informasi atau baliho di KPNP.
- Pembuatan Greenhouse Kebun Plasma Nutfah Pisang, untuk melengkapi kebutuhan area untuk aklimatisasi bibit pisang hasil kultur jaringan.



Rehab Greenhouse Kebun Hortikultura dan Perbaikan Baliho

3. Program Penyuluhan Pertanian

Indikator kinerja program ini yaitu Cakupan bina kelompok tani dapat tercapai dengan realisasi sebesar 26.45% yang dihitung dari hasil perolehan jumlah kelompok tani yang dibina sebanyak 73 kelompok, dibagi jumlah kelompok tani di Kota Yogyakarta sebanyak 276 kelompok, sehingga tingkat capaiannya 121.67%. Dengan tingkat capaian penggunaan anggaran sebesar 99.44%, program Penyuluhan Pertanian dapat dikatakan tercapai dengan efisien.

Faktor pendukung keberhasilan capaian program ini adalah karena semua rincian kegiatan di Program Penyuluhan Pertanian berjalan lancar karena melibatkan petani dan pihak-pihak lain dalam perencanaan program serta partisipasi aktif petani dan penyuluh dalam pelaksanaan program. Adapun faktor penghambat keberhasilan capaian program diantaranya karena belum adanya sinkronisasi data sasaran yang mendukung pencapaian misi program pemerintah kota, sehingga sinkronisasi data perlu diperlukan pada awal perencanaan.

Dukungan terhadap capaian kinerja program ini diperoleh dari 1 Kegiatan dan 3 Sub Kegiatan, dengan rincian aktivitas yang dilakukan pada setiap sub kegiatan sebagai berikut :

a. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa

Memiliki indikator kinerja output Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya dengan target 1 unit, tercapai sebesar 100%, dengan realisasi 1 unit Balai Penyuluhan Pertanian telah ditingkatkan kapasitas kelembagaannya.

Faktor pendorong tercapainya kinerja diantaranya karena target kinerja tercapai didukung dengan pelaksanaan kegiatan yang terlaksana sesuai dengan tata kala. Adapun faktor penghambat tercapainya kinerja diantaranya adalah karena terdapat kegiatan internal dan external yang terlaksana bersamaan, sehingga beberapa kegiatan mundur dari plotting yang sudah dijadwalkan.

Aktivitas yang dilakukan pada Sub Kegiatan ini adalah :

- Pembuatan Demplot Penyuluh Pertanian, dilakukan sebagai sarana pelatihan bagi para penyuluh dengan cara membuat lahan percontohan agar para petani bisa melihat dan membuktikan terhadap objek yang didemonstrasikan, sebanyak 1 kali praktek berlokasi di Balai Penyuluhan Pertanian.
- Bimtek Kelembagaan Petani, dilaksanakan sebanyak 4 kali dengan sasaran peserta adalah anggota kelompok tani yang telah teregister melalui metode Bimtek serta praktek yang bertempat di kantor Dinas Pertanian dan Pangan.

LKIP DPP 2023



- Pelatihan Pertanian Perkotaan untuk Penyuluh, dilaksanakan sebanyak 4 kali dengan sasaran peserta dari Penyuluh Pertanian serta Penyuluh Pertanian Swadaya sebanyak 30 orang melalui metode pelatihan langsung praktek berlokasi di PT Nira Lestari, Cipta Visi Group, Jamal Farming, Citra Rasa, Seyegan.
- Penyusunan Program Pertanian Tahun 2024. Program Penyuluhan Pertanian Tingkat Kota adalah program penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian Pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang disusun secara sistematis dengan memperhatikan aspirasi pelaku utama dan pelaku usaha, serta pemangku kepentingan lainnya sebagai arah dan pengendali dalam pencapaian penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian. Dokumen Program Penyuluhan Tingkat Kota Yogyakarta Tahun 2023 menjadi bahan usulan dan pertimbangan dalam menyusun Program Kegiatan Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2024. Dilaksanakan sebanyak 16 kali melalui metode diskusi bersama anggota kelompok tani pada 14 kamatanren dan kantor BPP.



- Lomba Penghargaan Bidang Pertanian Tingkat DIY Tahun 2023, Koordinasi Penyuluh dan Penyuluh Pertanian Swadaya, Seminar Penyuluh Pertanian, Sosialisasi Perwal Kelembagaan Petani



- Temu Tugas Pertanian Tahun 2023 merupakan kegiatan pertemuan antara pemegang fungsi penyuluhan bersama Penyuluh Pertanian dan Penyuluh Swadaya dalam rangka mensinkronkan tugas lingkup Penyuluhan Pertanian selama satu tahun berjalan, dilaksanakan melalui diskusi sebanyak 2 kali.

- Temu Wicara Pertanian Tahun 2023 adalah pertemuan antara petani dengan pemerintah untuk berdiskusi mengenai kebijakan pemerintah dalam pembangunan pertanian. Dalam forum tersebut disampaikan keinginan, gagasan dan pelaksanaan pembangunan pertanian oleh petani di lapangan sebagai umpan balik terhadap kebijakan pemerintah, dilaksanakan melalui diskusi sebanyak 2 kali.



b. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa

Memiliki indikator kinerja output Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya dengan target 3 unit, tercapai sebesar 100%, dengan realisasi 3 unit kelembagaan petani yang ditingkatkan kapasitasnya yaitu Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan Asosiasi Petani.

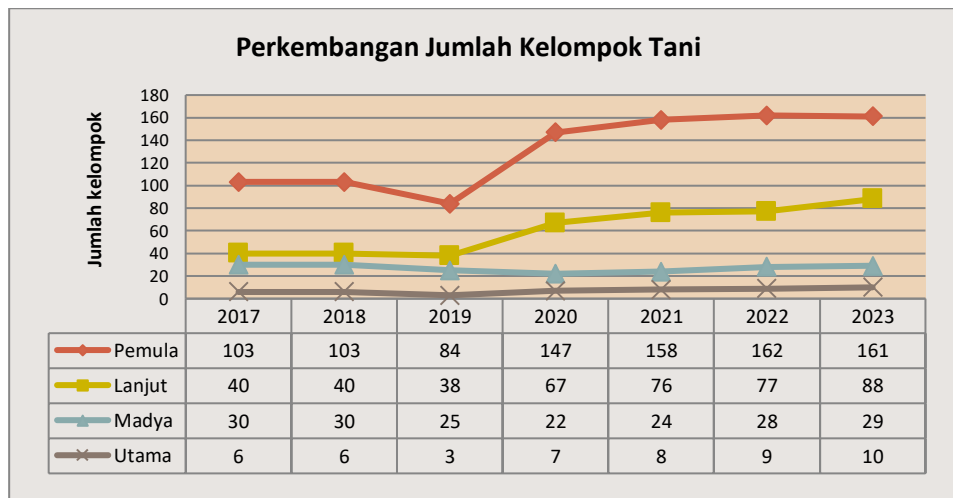
Faktor pendorong tercapainya kinerja diantaranya karena target kinerja dan realisasi kegiatan tercapai sesuai harapan dengan adanya dukungan penyuluh dan anggota kelompok tani, serta adanya Perwal Kelembagaan Kelompok Tani No 128 Tahun 2021. Adapun faktor penghambat tercapainya kinerja diantaranya adalah karena terdapat kegiatan internal dan external yang terlaksana bersamaan, sehingga beberapa kegiatan mundur dari jadwal yang sudah disusun.

Aktivitas yang dilakukan pada Sub Kegiatan ini adalah :

- Bimbingan Teknis bagi anggota kelompok tani serta masyarakat umum dilaksanakan sebanyak 20 orang selama 23 kali untuk 10 macam bimtek yaitu : Agribisnis Olah Hasil Pertanian (1 kali), Budidaya Anggrek (2 kali), Biofarmaka, Budidaya Padi, Budidaya Sayuran, Budidaya Sayur, Budidaya Tabulampot (1 kali), Hidroponik, POC, serta Tanaman Obat yang dilaksanakan di Balai Penyuluhan Pertanian, maupun di kelompok tani.
- Fasilitasi KUR berupa sosialisasi dan pendampingan dari perbankan maupun jasa keuangan lainnya terhadap para anggota kelompok tani maupun petani milenial, dilaksanakan sebanyak 4 kali melalui sosialisasi dan pendampingan.
- Pembinaan kepada petani dilakukan terhadap Asosiasi Petani, Gabungan Kelompok Tani, serta Kelompok Tani sebanyak 6 Kali melalui pembinaan dan pendampingan, bertempat di BPP dan di Kebun Tompeyan, Tegalrejo.
- Penilaian Kelas Kelompok Tani dilaksanakan secara rutin setiap tahun untuk memberikan penilaian kelas kepada seluruh kelompok tani, sebagai alat untuk monitoring dan evaluasi perkembangan kelompok tani. Dari hasil penilaian kelas kelompok tahun 2023 terdapat 16 kelompok tani yang berhasil naik ke kelas yang lebih tinggi, dan terdapat 12 kelompok tani yang baru, sehingga secara keseluruhan jumlah kelompok tani di Kota Yogyakarta sampai tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 3. Daftar Kelompok Tani yang Naik Kelas Tahun 2023

KEMANTREN	KELURAHAN	NAMA KELOMPOK	KELAS		
			2022	2023	Ket
Danurejan	Suryatmajan	KT Jambu	Pemula	Lanjut	Naik
Gondokusuman	Demangan	KT Sumber Rejeki	Lanjut	Madya	Naik
	Kota Baru	KT Kompitu Hijau	Pemula	Lanjut	Naik
Jetis	Bumijo	KT Seruja	Pemula	Lanjut	Naik
	Cokrodiningratan	KT Sami Mulyo	Pemula	Lanjut	Naik
	Gowongan	KT Sumber Rejeki	Madya	Utama	Naik
Pakualaman	Gunung Ketur	KT GK 232	Pemula	Lanjut	Naik
Wirobrajan	Pakuncen	KT Mitra	Pemula	Lanjut	Naik
	Pakuncen	KT Winongo Asri	Pemula	Lanjut	Naik
	Patangpuluhan	KWT Sekar Niaga	Lanjut	Madya	Naik
	Patangpuluhan	KWT Harum Manis	Pemula	Lanjut	Naik
Umbulharjo	Warungboto	KT Sekar Sari	Pemula	Lanjut	Naik
	Warungboto	KT Laras Asri	Pemula	Lanjut	Naik
Gedongtengen	Pringgokusuman	KWT Subur Ceria	Pemula	Lanjut	Naik
Kotagede	Prenggan	KT Subur Makmur	Pemula	Lanjut	Naik
	Rejowinangun	KT Lorsay Gembira	Pemula	Lanjut	Naik



- Gelar Potensi Pertanian dan Kontes Tanaman Hias sebanyak 1 kali pelaksanaan kegiatan selama 3 hari bertempat di halaman Balaikota Yogyakarta, dengan peserta melibatkan seluruh kelompok tani, Asosiasi Petani, Gapoktan serta komunitas-komunitas pecinta tanaman hias yang ada di Kota Yogyakarta. Bagi petani, kegiatan ini sebagai ajang dan wadah untuk menampilkan beberapa unggulan, inovasi dan kegiatan binaan dari Dinas. Sedangkan bagi masyarakat khususnya para pecinta tanaman adalah kesempatan untuk berburu tanaman lokal dengan harga yang lebih murah.
- Lomba Burung Berkicau diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan visi dan menjalankan misi Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta yaitu membina pertanian pada tanaman dan hewan yang eksotis berbasis hobbies. Kegiatan ini dilaksanakan bekerja sama dengan PBI dengan harapan dapat mendatangkan

wisata minat khusus yang tentunya akan berdampak pada perekonomian Kota Yogyakarta.

- Sosialisasi Penguatan Kelembagaan Gapoktan, Sosialisasi Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani, Temu Usaha Kemitraan



c. Sub Kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian

Memiliki indikator kinerja output Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian dengan target 48 unit, tercapai sebesar 100%, dengan realisasi 48 unit sarana dan prasarana yang digunakan dalam pelaksanaan penyuluhan pertanian.

Faktor pendorong tercapainya kinerja diantaranya karena target Kinerja dapat tercapai karena terlaksana tepat waktu sesuai dengan tata laksana dan plotting. Adapun faktor penghambat tercapainya kinerja diantaranya adalah karena tidak semua objek belanja belum tersedia di Kota Yogyakarta, salah satunya adalah bagan warna daun. Barang yang diharapkan memiliki lebih dari 4 warna, tetapi yang tersedia hanya 4 warna.

Aktivitas yang dilakukan pada Sub Kegiatan ini adalah :

- Praktek Demplot Penyuluh Pertanian
- Pemeliharaan Greenhouse Balai Penyuluhan Pertanian berupa perbaikan atas solartuff

3.1.6 Inovasi yang Mendukung Pencapaian Kinerja

1. Digitalisasi Katalog Tanaman (LABELIN DIKA)

Dinas Pertanian dan Pangan merupakan salah satu instansi di Pemerintah Kota Yogyakarta yang melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat dimana salah satu bentuk layanan yang disediakan adalah penjualan bibit tanaman. Namun pelayanan yang ada belum optimal karena belum ada informasi ketersediaan tanaman yang mudah diakses. Banyak pelanggan yang datang ke Dinas untuk membeli tanaman tetapi ternyata tanaman yang diinginkan tidak tersedia atau stok habis. Ketika pelanggan menghubungi melalui telepon Dinas, tidak semua pegawai yang menerima telepon dapat memberikan informasi secara cepat. Ketika pelanggan datang langsung tidak tersedia papan informasi yang dapat dilihat langsung oleh pelanggan. Tidak semua pegawai yang melayani pembelian bibit juga hafal dengan harga tanaman yang dijual sehingga ketika ada pelanggan yang akan membeli harus menanyakan ke pegawai lain atau melihat daftar harga. Selain hal-hal tersebut, pada masa pandemi Covid 19 juga menyebabkan jumlah kunjungan dan pembelian tanaman menurun, sehingga muncullah gagasan untuk Optimalisasi Pelayanan Pembelian Bibit Tanaman melalui Inovasi LABELIN DIKA (Layanan Belanja Online dan Digitalisasi Katalog).



Manfaat yang diperoleh dapat diukur dengan meningkatnya jumlah pegawai Dinas yang dapat memberikan informasi tanaman yang dijual kepada masyarakat yang membutuhkan informasi, meningkatnya jumlah penjualan, respon masyarakat yang menghubungi melalui DM instagram maupun whatsapp ke kontak admin petugas pelayanan pembelian bibit tanaman, serta melalui Overview insight yang ada dalam Instagram, karena melalui fasilitasi ini dapat dilihat berapa masyarakat yang berkunjung atau melihat katalog digital.



**ANALISIS KINERJA SASARAN STRATEGIS 5 :
MENINGKATNYA PERSENTASE PENURUNAN JUMLAH KASUS
PENYAKIT HEWAN MENULAR STRATEGIS**

Tabel 3.13 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran Strategis 5

Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
Meningkatnya Persentase penurunan jumlah kasus penyakit hewan menular strategis	Persentase penurunan jumlah kasus penyakit hewan menular strategis	Jumlah kasus penyakit hewan menular strategis (PHMS) tahun berjalan dikurangi jumlah kasus PHMS tahun sebelumnya, dibagi jumlah kasus PHMS tahun sebelumnya (n-1) dikali 100 persen

Tabel 3.14 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 5

Sasaran Strategis	Kinerja							
	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2022	Target 2023	Target Renstra	Realisasi 2023	% capaian 2023	% capaian Renstra
Meningkatnya Persentase Penurunan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis	Persentase penurunan jumlah kasus penyakit hewan menular strategis	%	-11.29	-11.82	-13.51	-68.18	576.82%	504.66%

Target Capaian kinerja Sasaran Strategis 5 pada Tahun 2023 dapat tercapai dengan tingkat capaian sebesar 576.82%. Realisasi capaian sebesar -68.18% diperoleh dari hasil perhitungan jumlah kasus Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) yang terjadi pada tahun 2023 (35 kasus) dikurangi jumlah kasus PHMS tahun 2022 (110 kasus), dibagi dengan jumlah kasus tahun sebelumnya (110 kasus) dikali 100%.

3.1.1 Membandingkan terhadap capaian kinerja tahun lalu.

Terhadap capaian kinerja tahun sebelumnya, persentase penurunan jumlah kasus penyakit hewan menular strategis (PHMS) mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2022 jumlah kasus PHMS mencapai 110 kasus, sedangkan pada tahun 2023 hanya tercatat 35 kasus.

3.1.2 Membandingkan terhadap target capaian jangka menengah.

Terhadap capaian jangka menengah akhir periode Renstra 2023-2026, target akhir Renstra adalah -13.51%. Dengan realisasi yang diperoleh pada tahun 2023 yaitu sebesar -68.18%, maka target akhir Renstra telah terlampaui dengan capaian 576.82%. Dengan kondisi capaian ini maka indikator kinerja Sasaran Strategis 5 ini akan menjadi bahan evaluasi kinerja perangkat daerah, dan apabila diperlukan akan dilakukan perbaikan kinerja atau Reviu Renstra 2023-2026 untuk menyesuaikan target capaiannya.

3.1.3 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Faktor – faktor yang menunjang keberhasilan tercapainya target indikator kinerja sasaran strategis 5 ini diantaranya adalah adanya peningkatan pembinaan dan pengawasan terkait adanya penyakit hewan menular strategis serta pelaksanaan vaksinasi PMK dan pelayanan terpadu kesehatan hewan, vaksinasi hewan penular rabies dalam rangka pencegahan zoonosis, komunikasi, informasi dan edukasi terkait penyakit hewan kepada peternak dan masyarakat, optimalisasi Unit Respon Cepat terhadap kasus PHMS, dan kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kesehatan hewannya mengalami peningkatan.

Adapun faktor-faktor yang menghambat keberhasilan tercapainya target indikator kinerja sasaran strategis 5 adalah perubahan cuaca ekstrim menyebabkan daya tahan tubuh hewan menurun, kesadaran masyarakat terkait surat keterangan kesehatan hewan masih rendah, waktu untuk bertemu dengan pelaku usaha tidak bisa fleksibel, beberapa pelaku usaha tidak memiliki media komunikasi elektronik.

Upaya solusi yang dilakukan adalah melalui pendampingan kelompok peternak, meningkatkan pengawasan kesehatan hewan di peternak dan Rumah Potong Hewan, serta

dengan meningkatkan komunikasi, edukasi dan informasi kepada peternak terkait kesehatan hewan ternak mereka.

3.1.4 Analisis Efisiensi penggunaan sumber daya

Sasaran Strategis	Kinerja						Anggaran		
	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	% capaian 2023	Target	Realisasi	% capaian
Meningkatnya Persentase Penurunan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis	Persentase penurunan jumlah kasus penyakit hewan menular strategis	%	-11.29	-11.82	-68.18	576.82%	910,602,995	907,815,825	99.69%

Dapat dilihat dari Tabel di atas bahwa persentase kinerja sasaran strategis 5 terhadap target tahun 2023 sebesar 576.66% tercapai lebih besar dari persentase capaian kinerja anggaran 99.69%, yang berarti dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran dalam pencapaian sasaran strategis 5 ini dapat tercapai secara **EFISIEN**.

3.1.5 Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran Dinas.

Program Pendukung	Kinerja					Anggaran		
	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	% capaian 2023	Target	Realisasi	% capaian
Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Peningkatan persentase Pengecur Obat Hewan yang terbina dan terawasi	%	41.67	66.67	160.00%	15,821,320	15,427,700	97.51%
Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Peningkatan persentase unit usaha bidang kesehatan hewan yang terbina dan terawasi	%	61.76	100	161.92%	744,701,100	742,428,350	99.69%
Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase zoonosis prioritas yang terkendali	%	100	100	100.00%	150,080,575	149,959,775	99.92%

Keberhasilan capaian kinerja indikator sasaran 4 didukung oleh 3 (tiga) program yaitu :

1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian

Indikator kinerja program ini yaitu Peningkatan persentase Pengecur Obat Hewan yang terbina dan terawasi dapat tercapai dengan realisasi sebesar 66.67%, dari hasil perhitungan sebanyak 40 pengecur obat hewan dapat terbina dan terawasi dari seluruh 60 pengecur obat hewan yang ada di Kota Yogyakarta, sehingga capaian kinerjanya sebesar 159,99%. Dengan tingkat capaian penggunaan anggaran sebesar 97,51%, indikator kinerja ini dapat dikatakan tercapai dengan efisien.

Faktor pendukung keberhasilan capaian program ini adalah karena meningkatnya kesadaran pelaku usaha pengecur obat hewan terhadap kualitas mutu dan keamanan obat hewan yang dijual. Adapun faktor penghambat keberhasilan capaian program diantaranya karena saat dilaksanakan monitoring di lapangan yang ditemui bukan pemilik usaha, sehingga informasi yang diperoleh kurang lengkap.

Dukungan terhadap capaian kinerja program ini diperoleh dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan, dengan rincian aktivitas sebagai berikut :

a. Sub Kegiatan Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan

Memiliki indikator kinerja output Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar, tercapai sebesar 100%, dengan realisasi 4 laporan hasil terhadap 25 unit usaha telah menjalani pemeriksaan mutu, khasiat dan keamanan obat hewan yang beredar.

Faktor pendorong tercapainya kinerja diantaranya karena adanya komunikasi, Informasi dan Edukasi terkait peredaran obat hewan, serta meningkatnya kesadaran pelaku usaha pengecer obat hewan terhadap kualitas mutu dan keamanan obat hewan yang dijual. Adapun faktor penghambat tercapainya kinerja diantaranya adalah karena pada saat dilaksanakan monitoring di lapangan yang ditemui bukan pemilik usaha, sehingga informasi yang diperoleh kurang lengkap.

Aktivitas yang dilakukan pada Sub Kegiatan ini adalah :

- Sosialisasi Peredaran Obat Hewan dilaksanakan dengan sasaran dokter hewan praktik yang memiliki SIP serta para pemilik petshop/poultry shop di wilayah Kota Yogyakarta sebanyak 2kali bertempat di Aula RPH Giwangan, dengan pemateri dari Fakultas Kedokteran Hewan UGM, Balai Besar Veteriner Wates serta dari Dinas Kelautan dan Perikanan DIY.
- Pengawasan Peredaran Obat Hewan dilaksanakan terhadap seluruh unit usaha pengecer obat hewan yang ada di Kota Yogyakarta sebanyak 40 unit usaha yang terdiri dari 36 unit usaha petshop dan 4 unit usaha poultryshop, melalui pengawasan dan monitoring secara berkala serta pembinaan.



2. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Indikator kinerja program ini yaitu Peningkatan persentase unit usaha bidang kesehatan hewan yang terbina dan terawasi dapat tercapai dengan realisasi sebesar 100%, dari hasil perhitungan sebanyak 68 unit usaha bidang kesehatan hewan seluruhnya berhasil terawasi dari 68 unit usaha kesehatan hewan yang ada di Kota Yogyakarta, sehingga capaian kinerjanya sebesar 161.92%. Dengan tingkat capaian penggunaan anggaran sebesar 99.69%, indikator kinerja program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dapat dikatakan tercapai dengan efisien.

Faktor pendukung keberhasilan capaian program ini adalah karena terjalinnnya komunikasi yang baik antara kelompok, masyarakat dan petugas (Dinas, wilayah dan OPD terkait) sehingga memudahkan dalam koordinasi dan pelaksanaan aktivitas sub kegiatan, adanya layanan Kesehatan Hewan gratis dari DPP, Komunikasi, Informasi dan edukasi terkait penyakit hewan kepada peternak dan masyarakat, optimalisasi Unit Respon Cepat (URC) dalam menanggapi pengaduan dari masyarakat. Adapun faktor penghambat keberhasilan capaian program diantaranya karena perubahan cuaca

ekstrem menyebabkan daya tahan tubuh hewan menurun, kesadaran masyarakat terkait surat keterangan kesehatan hewan masih rendah, waktu untuk bertemu dengan pelaku usaha terkendala kesibukan pelaku usaha, beberapa pelaku usaha tidak memiliki media komunikasi elektronik.

Dukungan terhadap capaian kinerja program ini diperoleh dari 3 Kegiatan dan 3 Sub Kegiatan, dengan rincian aktivitas masing-masing Sub Kegiatan sebagai berikut :

a. *Sub Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis*

Memiliki indikator kinerja output Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis, tercapai sebesar 100%, dengan realisasi 4 laporan tribulanan laporan hasil pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis.

Faktor pendorong tercapainya kinerja diantaranya karena terjalannya komunikasi yang baik antara kelompok, Masyarakat dan petugas (Dinas, wilayah dan OPD terkait) sehingga memudahkan dalam koordinasi dan pelaksanaan aktivitas sub kegiatan, serta optimalisasi Unit Respon Cepat. Adapun faktor penghambat tercapainya kinerja diantaranya adalah karena perubahan cuaca ekstrem menyebabkan daya tahan tubuh hewan menurun, kesadaran masyarakat terkait surat keterangan kesehatan hewan masih rendah, waktu untuk bertemu dengan pelaku usaha/peternak terkendala kesibukan pelaku usaha/peternak.

Aktivitas yang dilakukan pada Sub Kegiatan ini adalah :

- Pembinaan dan Pengawasan Kesehatan Hewan dilaksanakan secara rutin selama 12 bulan dengan sasaran peternak serta kelompok ternak yang ada di Kota Yogyakarta dengan target 42 unit dapat terealisasi 68 unit, serta 11 unit usaha produk asal hewan.
- Pelayanan Terpadu Kesehatan Hewan Ternak Ruminansia dilaksanakan dengan sasaran kelompok ternak melalui pemeriksaan dan pengobatan gratis serta pemberian vitamin dan obat cacing untuk hewan ternak. Pelayanan terpadu ini terlaksana pada 7 lokasi kelompok ternak Ngudi Mulyo, Suryidiningratan, Mantrijeron; Ledhok Timoho, Muja Muju, Umbulharjo; Code Farm, Keparakan, Mergangsan; Tri Handini Rejo, Bener, Tegalrejo; Tri Manunggal Lembu Suro, Rejowinangun, Kotagede; dan Andaka Karya, Patangpuluhan, Wirobrajan.



- Sosialisasi Kesejahteraan Hewan dilaksanakan sebanyak 1 kali dengan sasaran peserta para sopir andong yang ada di Kota Yogyakarta sebanyak 20 orang, melalui pemberian materi dari dokter hewan praktisi dan komunitas Animal Friends Jogja (AFJ).
- Pemantauan dan Pengendalian Penyakit Pada Hewan Kurban dilakukan dengan sasaran para peternak dan penjual hewan qurban sebanyak 14 kali pemantauan

sampai pelaksanaan penyembelihan hewan qurban. Secara keseluruhan pemeriksaan hewan qurban ini dilaksanakan pada 55 titik lokasi penjualan hewan qurban yang tersebar pada 12 wilayah kemantren di Kota Yogyakarta.



b. Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner

Memiliki indikator kinerja output Jumlah Pelayan Jasa Medik Veteriner, tercapai sebesar 100%, dengan realisasi 12 laporan bulanan hasil pelaksanaan kegiatan penyediaan pelayanan jasa medik veteriner pada Poliklinik Hewan Kota Yogyakarta.

Faktor pendorong tercapainya kinerja diantaranya karena tingginya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan hewan peliharaan, komunikasi Informasi dan Edukasi kepada masyarakat tentang kesehatan hewan, serta peningkatan kualitas layanan kesehatan hewan. Adapun faktor penghambat tercapainya kinerja diantaranya adalah penetapan skala prioritas untuk kebutuhan melengkapi sarana prasarana (komputer, alat laboratorium, ruang bedah, dan perbaikan atap laboratorium), dan kebutuhan air bersih kondisi eksisting air keruh dan sedikit.

Aktivitas yang dilakukan pada Sub Kegiatan ini adalah :

- Pengelolaan pelayanan jasa medik veteriner ditujukan kepada Pemilik hewan di wilayah Kota Yogyakarta dan sekitarnya. Realisasi pelayanan kesehatan tahun 2023 sejumlah 11.299 ekor yang terdiri dari 150 ekor ternak, 9.860 ekor hewan kesayangan dan 1.289 ekor hewan unggas dengan 36.256 tindakan pada Poliklinik Hewan Kota Yogyakarta.



c. Sub Kegiatan Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis

Memiliki indikator kinerja output Jumlah Pemenuhan Persyaratan Teknis yang Ditetapkan, tercapai sebesar 100%, dengan realisasi 12 laporan bulanan hasil pelaksanaan kegiatan layanan Rumah Potong Hewan (RPH).

Faktor pendorong tercapainya kinerja diantaranya karena meningkatnya kesadaran konsumen terhadap kebutuhan daging yang sehat dan halal terutama untuk hari

keagamaan. Adapun faktor penghambat tercapainya kinerja diantaranya adalah adanya selisih harga di pasaran.

Aktivitas yang dilakukan pada Sub Kegiatan ini adalah :

- Pemotongan hewan reguler berupa layanan pemotongan hewan sapi/kerbau dan kambing/domba serta mobil pengangkut daging. Layanan ini diberikan kepada masyarakat dan pelaku usaha pangan asal hewan. Jumlah pemotongan tahun 2023 mencapai 935 ekor sapi dan 5.361 ekor kambing/domba.
- Pemotongan Hewan Hari Raya Idul Fitri berupa layanan pemotongan hewan sapi/kerbau dan kambing/domba serta mobil pengangkut daging selama 6 hari selama hari raya Idul Fitri.
- Pemotongan Hewan Hari Raya Idul Adha berupa layanan pemotongan hewan sapi/kerbau dan kambing/domba serta mobil pengangkut daging selama hari raya Idul Adha. Jumlah hewan yang dipotong pada hari raya Idul Adha mencapai 154 ekor sapi dan 65 ekor kambing/domba.



- Sosialisasi Pemotongan Hewan ASUH dilaksanakan sebanyak 1 kali dengan sasaran para jagal dan anak jagal yang ada di wilayah Kota Yogyakarta dengan narasumber dari Fakultas Kedokteran Hewan UGM dan dari Kementerian Agama Kota Yogyakarta.

3. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Indikator kinerja program ini yaitu Persentase zoonosis prioritas yang terkendali dapat tercapai dengan realisasi sebesar 100%, karena sebanyak 5 jenis penyakit hewan zoonosis prioritas seluruhnya dapat terkendali dan tertanggulangi, sehingga capaian kerjanya sebesar 100%. Dengan tingkat capaian penggunaan anggaran sebesar 99.92%, indikator kinerja program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian dapat dikatakan tercapai dengan efisien.

Faktor pendukung keberhasilan capaian program ini adalah karena adanya komunikasi, Informasi dan edukasi terkait zoonosis kepada peternak dan masyarakat, vaksinasi hewan penular rabies dalam rangka pencegahan zoonosis, koordinasi dengan Dinas terkait jika terjadi kasus zoonosis, optimalisasi Unit Respon Cepat terhadap kasus gigitan HPR dan kasus dugaan leptospirosis. Adapun faktor penghambat keberhasilan capaian program diantaranya karena adanya perubahan cuaca ekstrim menyebabkan daya tahan tubuh hewan menurun, tingginya lalu lintas Hewan Penular Rabies (HPR) di wilayah Kota Yogyakarta, kesadaran masyarakat terkait surat keterangan kesehatan hewan masih rendah, jumlah vaksin rabies yang tersedia tidak mencukupi sehingga pelaksanaan vaksinasi tertunda di 18 kelurahan.

Dukungan terhadap capaian kinerja program ini diperoleh dari 1 Kegiatan dan 1 Sub Kegiatan, dengan rincian aktivitas Sub Kegiatan sebagai berikut :

a. Sub Kegiatan Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis

Memiliki indikator kinerja Jumlah Wilayah Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis, tercapai sebesar 100%, dengan realisasi 4 laporan tribulanan laporan hasil penanggulangan bencananon alam zoonosis.

Faktor pendorong tercapainya kinerja diantaranya karena terjalannya komunikasi, informasi dan edukasi terkait zoonosis kepada peternak dan masyarakat, vaksinasi hewan penular rabies dalam rangka pencegahan zoonosis, koordinasi dengan Dinas terkait (wilayah, Dinas Kesehatan, Satpol PP, BPBD, DPKP DIY, Balai Besar Veteriner) jika terjadi kasus zoonosis, serta optimalisasi Unit Respon Cepat terhadap kasus gigitan HPR dan kasus dugaan leptospirosis.

Adapun faktor penghambat tercapainya kinerja diantaranya adalah karena adanya perubahan cuaca ekstrim menyebabkan daya tahan tubuh hewan menurun, tingginya lalu lintas Hewan Penular Rabies (HPR) di wilayah Kota Yogyakarta, jumlah vaksin rabies yang tersedia tidak mencukupi (anggaran murni) sehingga pelaksanaan vaksinasi tertunda di 18 kelurahan (menunggu anggaran perubahan).

Aktivitas yang dilakukan pada Sub Kegiatan ini adalah :

- Pengendalian populasi/sterilisasi kucing dilaksanakan guna mengendalikan populasi hewan liar khususnya kucing yang ada di fasilitas umum (pasar) di Kota Yogyakarta melalui kerjasama dengan komunitas pecinta binatang peliharaan (AFJ) dengan melakukan sterilisasi terhadap 20 ekor kucing tidak berpemilik di Kota Yogyakarta. Sterilisasi kucing dilakukan di Poliklinik Hewan Kota Yogyakarta.



- Vaksinasi rabies dilakukan secara gratis engan sasaran anjing, kucing dan kera yang berdomisili di Kota Yogyakarta, melalui kerjasama dengan 45 wilayah kelurahan, serta praktik dokter hewan mandiri. Pemberian vaksin rabies terlaksana untuk sebanyak 2.660 ekor hewan kesayangan yang terdiri dari 2.202 ekor kucing, 531 ekor anjing dan 8 ekor kera.



**ANALISIS KINERJA SASARAN STRATEGIS 6 :
MENINGKATNYA REFORMASI BIROKRASI**

Tabel 3.15 Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan Sasaran Strategis 6

Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Pertanian dan Pangan	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat

Tabel 3.16 Capaian Kinerja Sasaran Strategis 6

Sasaran Strategis	Kinerja							
	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2022	Target 2023	Target Renstra	Realisasi 2023	% capaian 2023	% capaian Renstra
Meningkatnya Reformasi Birokrasi	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	nilai	BB	A	A	A	100%	100%

Target Capaian kinerja Sasaran Strategis 6 pada Tahun 2023 dapat tercapai dengan tingkat capaian sebesar 100%. Realisasi capaian kinerja tersebut diperoleh berdasarkan Surat dari Inspektorat dengan Nomor X.700.1.2.1/170/EV.RB/C/XI/2023 perihal Laporan Hasil Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi General Perangkat Daerah Tahun 2023. Ruang lingkup evaluasi tersebut meliputi penilaian perencanaan Reformasi Birokrasi atas dokumen Rencana Aksi Reformasi Birokrasi yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta dengan Nomor 000.8.6/047/DPP/2023.

Hasil evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi RB pada Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta untuk tahun 2023 adalah sebesar 80,43% dari target yang ditetapkan sampai dengan Triwulan III. Dengan mendasarkan pada 7 kategori nilai RB maka capaian Dinas Pertanian dan Pangan adalah nilai A = >80-90, dengan capaian kinerja sebesar 100%.

3.1.1 Membandingkan terhadap capaian kinerja tahun lalu.

Capaian kinerja meningkatnya Reformasi Birokrasi belum dapat diperbandingkan dengan tahun sebelumnya, karena adanya perubahan dalam penyusunan Rencana Aksi RB dan Evaluasi pelaksanaan terhadap rencana aksi RB mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi.

3.1.2 Membandingkan terhadap target capaian jangka menengah.

Terhadap capaian jangka menengah akhir periode Renstra 2023-2026, target akhir Renstra adalah 100%. Dengan realisasi capaian terhadap kondisi akhir Renstra meskipun target tetap pada nilai A, namun akan tetap diupayakan adanya peningkatan dalam skor nilai dengan melakukan perbaikan-perbaikan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat, diantaranya adalah dengan melengkapi informasi sumber daya anggaran yang

dialokasikan, melengkapi Rencana Aksi RB yang belum terlaksana sesuai rencana yang telah ditetapkan, dan melengkapi bukti dukung yang belum sesuai dengan indikator output.

3.1.3 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

Faktor – faktor yang menunjang keberhasilan tercapainya target indikator kinerja sasaran strategis 5 ini diantaranya adalah seluruh kegiatan terlaksana dengan baik sesuai dengan tatakala pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan, dengan realisasi capaian kinerja yang seluruhnya dapat **tercapai dengan efisien**, dengan realisasi capaian keuangan yang cukup baik yaitu 96,43%.

Adapun faktor-faktor yang menghambat keberhasilan tercapainya target indikator kinerja sasaran strategis 6 adalah Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta belum seluruhnya dilengkapi dengan informasi sumberdaya anggaran yang digunakan, masih terdapat rencana aksi RB yang belum terlaksana, dan masih terdapat bukti dukung yang belum sesuai dengan indikator output.

Upaya solusi yang dilakukan adalah melakukan perbaikan-perbaikan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh Inspaktorat, diantaranya adalah dengan melengkapi informasi sumber daya anggaran yang dialokasikan, melengkapi Rencana Aksi RB yang belum terlaksana sesuai rencana yang telah ditetapkan, dan melengkapi bukti dukung yang belum sesuai dengan indikator output.

3.1.4 Analisis Efisiensi penggunaan sumber daya

Sasaran Strategis	Kinerja						Anggaran		
	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2022	Target 2023	Realisasi 2023	% capaian 2023	Target	Realisasi	% capaian
Meningkatnya Reformasi Birokrasi	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	nilai	BB	A	A	100%	12,500,010,117	11,870,451,046	94.96%

Dapat dilihat dari Tabel di atas bahwa persentase kinerja sasaran strategis 6 terhadap target tahun 2023 sebesar 100% tercapai lebih besar dari persentase capaian kinerja anggaran 94.96%, yang berarti dapat disimpulkan bahwa penggunaan anggaran dalam pencapaian sasaran strategis 6 ini dapat tercapai secara EFISIEN.

3.1.5 Analisis program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja sasaran Dinas.

Program Pendukung	Kinerja						Anggaran		
	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2022	Target RKPD 2023	Realisasi 2023	% capaian RKPD 2023	Target	Realisasi	% capaian
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan	nilai	A	A	A	100.00%	12,500,010,117	11,870,451,046	94.96%

Keberhasilan capaian kinerja indikator sasaran 6 didukung oleh 1 (satu) program yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

LKIP DPP 2023

Indikator kinerja program ini yaitu Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan dapat tercapai dengan realisasi sebesar 100%, dari hasil evaluasi pelaksanaan SAKIP dari Inspektorat, dimana Dinas Pertanian dan Pangan memperoleh nilai A. Dengan tingkat capaian penggunaan anggaran sebesar 94.96%, indikator kinerja program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dapat dikatakan tercapai dengan efisien.

Faktor pendukung tercapainya kinerja sasaran ini adalah karena adanya komitmen yang kuat dari pimpinan serta seluruh pejabat dalam upaya meningkatkan nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah, tahapan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan terlaksana sesuai tatakala yang telah disusun, tercapainya seluruh indikator kinerja program dan kegiatan dengan capaian kinerja diatas 100%, serta terlaksananya monitoring dan evaluasi secara rutin dan berkelanjutan.

Dukungan terhadap capaian kinerja program ini diperoleh dari 1 Kegiatan dan 34 Sub Kegiatan yang terdiri atas sub kegiatan yang terkait dengan penyusunan dokumen perencanaan, penyusunan dokumen penganggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja, penatausahaan keuangan, penyusunan laporan keuangan, penatausahaan barang, monitoring dan evaluasi kinerja pegawai, penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor, pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor, pemeliharaan kendaraan serta pemeliharaan bangunan gedung kantor.

Secara umum seluruh capaian kinerja output sub kegiatan tercapai 100%, dengan capaian realisasi keuangan hampir seluruh sub kegiatan memiliki capaian di atas 95%, hanya 1 sub kegiatan yang memiliki capaian di bawah 50% yaitu Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang capaiannya hanya 43,18%, disebabkan karena pembayaran tagihan belanja telepon disesuaikan dengan tagihan dari kantor telepon sesuai penggunaan, dimana penggunaan pesawat telepon kantor relatif telah jarang digunakan karena adanya perkembangan sistem komunikasi sekarang ini.

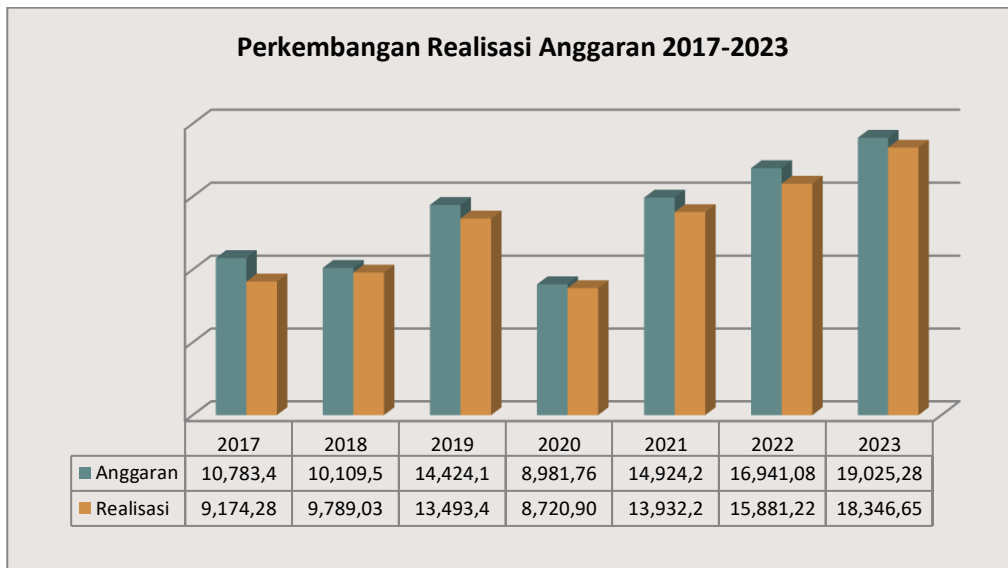
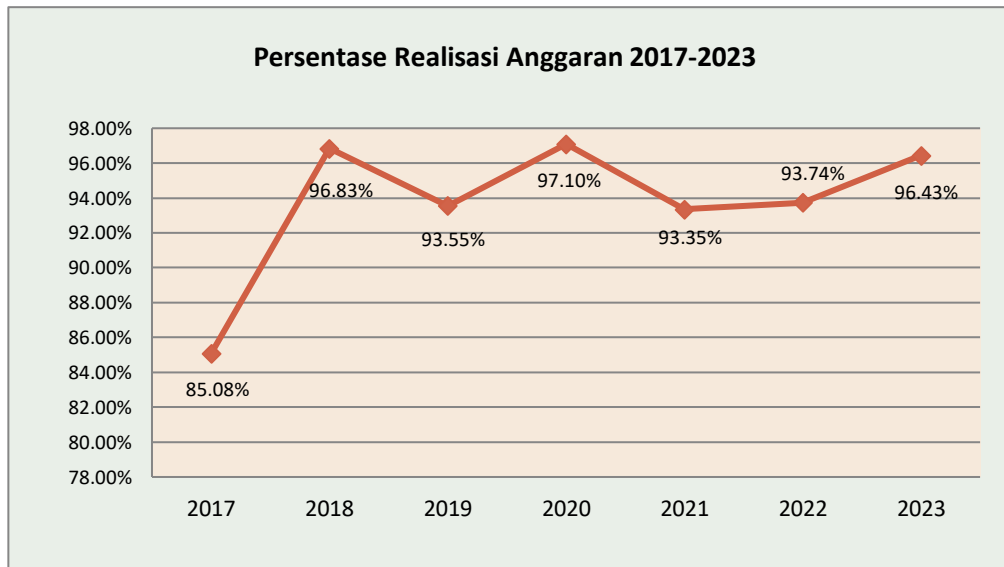
3.2 REALISASI ANGGARAN

Jumlah anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan seluruh program dan kegiatan pada Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta berdasarkan anggaran perubahan Tahun 2023 beserta realisasi keuangannya adalah :

Uraian	Anggaran (Rp.)	Prosentase	Realisasi (Rp.)	Prosentase
Belanja Operasi	18,574,002,074	97.63%	15,443,515,601	97.24%
- Belanja Pegawai	9,839,399,425	51.72%	9,228,389,269	58.11%
- Belanja Barang Jasa	8,734,602,649	45.91%	8,680,563,935	54.66%
Belanja Modal	451,280,300	2.37%	437,705,200	2.76%
- BM Peralatan dan Mesin	316,280,300	1.66%	303,950,200	1.91%
- BM Gedung dan Bangunan	135,000,000	0.71%	133,755,000	0.84%
Jumlah	19,025,282,374	100.00%	15,881,220,801	100.00%
			Persentase	96.43%

LKIP DPP 2023

Persentase realisasi keuangan Tahun 2023 secara keseluruhan mencapai 96.43%, meningkat apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 93,74%, dengan jumlah anggaran yang lebih besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Secara umum seluruh belanja yang telah dianggarkan dapat terlaksana sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2023, dimana sisa anggaran belanja sebagian besar disebabkan karena adanya selisih harga satuan barang di pasaran, serta sisa kontrak dengan penyedia jasa.



LKIP DPP 2023

Adapun realisasi anggaran per program yang mendukung tercapainya sasaran strategis perangkat daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.18. Realisasi Anggaran Program Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Kinerja					Anggaran			Program Pendukung	Kinerja	Anggaran		
		Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	% capaian 2023	Target	Realisasi	% capaian		Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% capaian
1	Meningkatnya Angka Konsumsi Pangan	Angka Konsumsi Pangan	poin	90.4	91.2	100.88%	1,750,158,444	1,746,953,650	99.82%	Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Peningkatan persentase kawasan yang dikembangkan menjadi kawasan pangan lestari	609,642,000	607,832,000	99.70%
										Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Angka Ketersediaan Energi	574,063,108	573,531,500	99.91%
											Peningkatan persentase pemenuhan cadangan pangan Pemerintah Daerah	471,762,000	471,114,650	99.86%
										Penanganan Kerawanan Pangan	Penurunan wilayah rawan pangan prioritas 2	94,691,336	94,475,500	99.77%
2	Meningkatnya Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	89.47	93.41	104.40%	968,120,650	936,862,150	96.77%	Pengawasan Keamanan Pangan	Peningkatan Persentase pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan yang diawasi	251,747,220	248,235,000	98.60%

LKIP DPP 2023

										Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Peningkatan persentase pelaku usaha pangan asal hewan dan perikanan yang diawasi	716,373,430	688,627,150	96.13%
3	Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan	Angka konsumsi ikan	Kg/kapita /tahun	35.46	35.89	101.21%	982,536,668	980,169,800	99.76%	Pengelolaan Perikanan Budidaya	Peningkatan Persentase kelompok pembudidaya ikan yang berizin	855,289,168	853,161,300	99.75%
										Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase pengolah dan pemasar hasil perikanan yang berizin	127,247,500	127,008,500	99.81%
4	Meningkatnya Persentase Kenaikan Kelas Kelompok Tani	Persentase kenaikan kelas kelompok tani	%	3.99	5.80	145.36%	1,913,853,500	1,904,405,933	99.51%	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase petani tanaman pangan yang telah memenuhi prosedur penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida sesuai aturan	11,712,700	11,144,390	95.15%
											Peningkatan persentase varietas tanaman buah yang telah bersertifikat	1,019,001,300	1,015,269,600	99.63%
										Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Peningkatan jumlah prasarana pertanian yang dapat beroperasi dengan baik sesuai fungsinya	69,845,000	69,229,900	99.12%

LKIP DPP 2023

										Penyuluhan Pertanian	Cakupan bina kelompok tani	813,294,500	808,762,043	99.44%
5	Meningkatnya Persentase Penurunan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis	Persentase penurunan jumlah kasus penyakit hewan menular strategis	%	-11.82	-68.18	576.82%	910,602,995	907,815,825	99.69%	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Peningkatan persentase Pengecer Obat Hewan yang terbina dan terawasi	15,821,320	15,427,700	97.51%
										Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Peningkatan persentase unit usaha bidang kesehatan hewan yang terbina dan terawasi	744,701,100	742,428,350	99.69%
										Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase zoonosis prioritas yang terkendali	150,080,575	149,959,775	99.92%
6	Meningkatnya Reformasi Birokrasi	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	nilai	A	A	100%	12,500,010,117	11,870,451,046	94.96%	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan	12,500,010,117	11,870,451,046	94.96%

BAB IV PENUTUP

Penyelenggaraan kegiatan pada Dinas Pertanian dan Pangan pada Tahun Anggaran 2023 merupakan tahun pertama dari Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Pangan Tahun 2023-2026 yang merupakan masa transisi sebelum ada Kepala Daerah definitif. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Pengukuran kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Pertanian dan Pangan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Tabel 3.1. Capaian Kinerja IKU/Sasaran Strategis Tahun 2023 sesuai Perbaikan Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian	Predikat Capaian
1.	Meningkatnya Angka Konsumsi Pangan	Angka Konsumsi Pangan	poin	90.4	91.2	100.88%	Tercapai
2.	Meningkatnya Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	%	89.47	93.41	104.40%	Tercapai
3.	Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan	Angka Konsumsi Ikan	Kg/Kapita/Tahun	35.46	35.89	101.21%	Tercapai
4.	Meningkatnya Persentase Kenaikan Kelas Kelompok Tani	Persentase Kenaikan Kelas Kelompok Tani	%	3.99	5.80	145.36%	Tercapai
5.	Meningkatnya Persentase Penurunan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis	Persentase Penurunan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis	%	-11.82	-68.18	576.82%	Tercapai
6.	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Pertanian dan Pangan	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	nilai	A	A	100.00%	Tercapai

Evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran strategis Dinas Pertanian dan Pangan dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Dari 6 indikator kinerja Sasaran Strategis seluruhnya memperoleh predikat **tercapai** dengan persentase capaian diatas 100.00%. Keberhasilan pencapaian tersebut didukung oleh beberapa faktor, antara lain :

1. Masyarakat sangat kooperatif dalam melakukan wawancara pada saat survei konsumsi pangan untuk perhitungan angka konsumsi pangan. Disamping itu juga terdapat peningkatan konsumsi pangan dari 9 kelompok pangan yaitu padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak/lemak, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur/buah dan lain-lain (aneka bumbu dan bahan minuman), berdasarkan hasil survei secara mandiri. Selain itu pengembangan pangan lokal melalui gerakan diversifikasi pangan turut mendukung ketersediaan aneka ragam bahan pangan yang dapat dikonsumsi masyarakat dalam rangka ketahanan pangan.
2. Masyarakat dan para pelaku usaha antusias dalam mengikuti pembinaan dan sosialisasi keamanan pangan. Disamping itu para pelaku usaha juga memiliki antusiasme yang cukup tinggi untuk menaati aturan terkait perijinan usaha penjualan daging, dan secara mandiri menginginkan pengawasan dan pengujian secara berkala serta mereka juga sangat kooperatif dengan petugas monitoring.
3. Kegiatan sosialisasi Gemar Ikan sudah dilaksanakan sebanyak 10 kali di SD Negeri wilayah Kota Yogyakarta dan siswa SD sangat antusias dan interaktif mengikuti sosialisasi Gemarikan. Disamping itu masyarakat juga sangat antusias mengikuti bimtek olahan ikan karena menu olahan menarik dan inovatif.
4. Berbagai kegiatan yang diselenggarakan Dinas seperti pembinaan kelompok tani/gapoktan, bimbingan teknis, gelar potensi dan kontes dapat meningkatkan semangat anggota kelompok tani. Disamping itu partisipasi aktif dari kelompok tani dan penyuluh pertanian, serta antusiasme dan semangat anggota kelompok tani untuk bergotong royong dalam kegiatan rutin kelompok tani, kegiatan penyuluhan semakin meningkat dengan adanya tambahan SDM Penyuluh dan antusiasme masyarakat terhadap budidaya pertanian, peternakan serta perikanan semakin tinggi, sehingga perkembangan jumlah kelompok tani juga mengalami peningkatan.
5. Adanya peningkatan pembinaan dan pengawasan terkait adanya penyakit hewan menular strategis serta pelaksanaan vaksinasi PMK dan pelayanan terpadu kesehatan hewan, vaksinasi hewan penular rabies dalam rangka pencegahan zoonosis, komunikasi, informasi dan edukasi terkait penyakit hewan kepada peternak dan masyarakat, optimalisasi Unit Respon Cepat terhadap kasus PHMS, dan kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kesehatan hewannya mengalami peningkatan.
6. Seluruh kegiatan terlaksana dengan baik sesuai dengan tatakala pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan, dengan realisasi capaian kinerja yang seluruhnya dapat **tercapai dengan efisien**, dengan realisasi capaian keuangan yang cukup baik yaitu 96,43%.

Adapun langkah-langkah yang akan diambil untuk mempertahankan pencapaian kinerja yang baik tersebut dirumuskan Rencana Tindak Lanjut sebagai berikut:

1. Meningkatkan komunikasi, edukasi dan informasi kepada masyarakat mengenai keberagaman pangan terutama pangan lokal yang dapat dikonsumsi, serta dengan terus meningkatkan koordinasi bersama OPD terkait, melibatkan kader kesehatan dalam kegiatan pertanian dan pangan seperti sosialisasi B2SA, Gempal (Gerakan

Pangan Lokal), Gembrot (Gerakan Mengonsumsi Protein) maupun dengan memasyarakatkan gerakan Jogja Sadar Kalori.

2. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama lintas OPD dalam hal monitoring dan pengujian produk pangan segar asal tumbuhan, asal ikan maupun asal hewan, seperti BPOM, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DIY, Purnama Lab serta GIS. Selain itu juga dilakukan penguatan data pelaku usaha dan meningkatkan jejaring antar pelaku usaha, serta penguatan kapasitas SDM pengawasan mutu.
3. Meningkatkan variasi olahan berbahan dasar ikan serta memberikan edukasi Gemarikan pada sekolah untuk meningkatkan minat masyarakat terutama anak-anak sejak usia dini untuk mengonsumsi ikan.
4. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Gapoktan di wilayah DIY dalam penyediaan cadangan beras pemerintah daerah, pendampingan oleh penyuluh pertanian secara intensif, meningkatkan koordinasi, edukasi dan komunikasi antar petani dengan memanfaatkan media sosial, serta dengan melibatkan petani maupun kelompok tani dalam kegiatan Gelar Potensi, pameran dan bazaar pertanian.
5. Pendampingan kelompok peternak, meningkatkan pengawasan kesehatan hewan di peternak dan Rumah Potong Hewan, serta dengan meningkatkan komunikasi, edukasi dan informasi kepada peternak terkait kesehatan hewan ternak mereka.
6. Melakukan perbaikan-perbaikan sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat, diantaranya adalah dengan melengkapi informasi sumber daya anggaran yang dialokasikan, melengkapi Rencana Aksi RB yang belum terlaksana sesuai rencana yang telah ditetapkan, dan melengkapi bukti dukung yang belum sesuai dengan indikator output.

LAMPIRAN

- Lampiran 1. Cascading / Pohon Kinerja
- Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023
- Lampiran 4. Pengukuran Kinerja Tahun 2023
- Lampiran 5. Matriks Tindak Lanjut Evaluasi LHE SAKIP Tahun 2022
- Lampiran 6. Keputusan Walikota Nomor 261 Tahun 2023 tentang Penetapan Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023-2026
- Lampiran 7. Rekap Capaian Kinerja Sasaran, Program, Sub Kegiatan dan Anggaran Tahun 2023
- Lampiran 8. Piagam Penghargaan

	2021	2022	2023	2024	2025
Angka kasualti pangan	85,1	86,4	91,2	92,1	92,1
Perubahan persentase perubahan angka kasualti pangan	88,8%	89,2%	90,9%	92,8%	92,8%
Angka kasualti kesehatan	25,48	25,46	25,47	25,47	25,47
Perubahan persentase perubahan angka kasualti kesehatan	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%
Perubahan persentase perubahan angka kasualti kesehatan	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%
Perubahan persentase perubahan angka kasualti kesehatan	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%

Angka kasualti pangan					Perubahan persentase dan perubahan kasualti pangan					Angka kasualti kesehatan					Perubahan persentase jumlah kasus penyakit menular strategis					Perubahan kasualti bila kelompok lain																																																																															
Angka kasualti pangan					Perubahan persentase dan perubahan kasualti pangan					Angka kasualti kesehatan					Perubahan persentase jumlah kasus penyakit menular strategis					Perubahan kasualti bila kelompok lain																																																																															
<table border="1"> <tr><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th></tr> <tr><td>85,1</td><td>86,4</td><td>91,2</td><td>92,1</td><td>92,1</td></tr> <tr><td>88,8%</td><td>89,2%</td><td>90,9%</td><td>92,8%</td><td>92,8%</td></tr> </table>					2021	2022	2023	2024	2025	85,1	86,4	91,2	92,1	92,1	88,8%	89,2%	90,9%	92,8%	92,8%	<table border="1"> <tr><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th></tr> <tr><td>88,8%</td><td>89,2%</td><td>90,9%</td><td>92,8%</td><td>92,8%</td></tr> </table>					2021	2022	2023	2024	2025	88,8%	89,2%	90,9%	92,8%	92,8%	<table border="1"> <tr><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th></tr> <tr><td>25,48</td><td>25,46</td><td>25,47</td><td>25,47</td><td>25,47</td></tr> <tr><td>2,0%</td><td>2,0%</td><td>2,0%</td><td>2,0%</td><td>2,0%</td></tr> </table>					2021	2022	2023	2024	2025	25,48	25,46	25,47	25,47	25,47	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	<table border="1"> <tr><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th></tr> <tr><td>2,0%</td><td>2,0%</td><td>2,0%</td><td>2,0%</td><td>2,0%</td></tr> </table>					2021	2022	2023	2024	2025	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	<table border="1"> <tr><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th></tr> <tr><td>2,0%</td><td>2,0%</td><td>2,0%</td><td>2,0%</td><td>2,0%</td></tr> </table>					2021	2022	2023	2024	2025	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	<table border="1"> <tr><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th></tr> <tr><td>2,0%</td><td>2,0%</td><td>2,0%</td><td>2,0%</td><td>2,0%</td></tr> </table>					2021	2022	2023	2024	2025	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%
2021	2022	2023	2024	2025																																																																																															
85,1	86,4	91,2	92,1	92,1																																																																																															
88,8%	89,2%	90,9%	92,8%	92,8%																																																																																															
2021	2022	2023	2024	2025																																																																																															
88,8%	89,2%	90,9%	92,8%	92,8%																																																																																															
2021	2022	2023	2024	2025																																																																																															
25,48	25,46	25,47	25,47	25,47																																																																																															
2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%																																																																																															
2021	2022	2023	2024	2025																																																																																															
2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%																																																																																															
2021	2022	2023	2024	2025																																																																																															
2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%																																																																																															
2021	2022	2023	2024	2025																																																																																															
2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%																																																																																															
<table border="1"> <tr><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th></tr> <tr><td>85,1</td><td>86,4</td><td>91,2</td><td>92,1</td><td>92,1</td></tr> <tr><td>88,8%</td><td>89,2%</td><td>90,9%</td><td>92,8%</td><td>92,8%</td></tr> </table>					2021	2022	2023	2024	2025	85,1	86,4	91,2	92,1	92,1	88,8%	89,2%	90,9%	92,8%	92,8%	<table border="1"> <tr><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th></tr> <tr><td>88,8%</td><td>89,2%</td><td>90,9%</td><td>92,8%</td><td>92,8%</td></tr> </table>					2021	2022	2023	2024	2025	88,8%	89,2%	90,9%	92,8%	92,8%	<table border="1"> <tr><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th></tr> <tr><td>25,48</td><td>25,46</td><td>25,47</td><td>25,47</td><td>25,47</td></tr> <tr><td>2,0%</td><td>2,0%</td><td>2,0%</td><td>2,0%</td><td>2,0%</td></tr> </table>					2021	2022	2023	2024	2025	25,48	25,46	25,47	25,47	25,47	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	<table border="1"> <tr><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th></tr> <tr><td>2,0%</td><td>2,0%</td><td>2,0%</td><td>2,0%</td><td>2,0%</td></tr> </table>					2021	2022	2023	2024	2025	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	<table border="1"> <tr><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th></tr> <tr><td>2,0%</td><td>2,0%</td><td>2,0%</td><td>2,0%</td><td>2,0%</td></tr> </table>					2021	2022	2023	2024	2025	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	<table border="1"> <tr><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th></tr> <tr><td>2,0%</td><td>2,0%</td><td>2,0%</td><td>2,0%</td><td>2,0%</td></tr> </table>					2021	2022	2023	2024	2025	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%
2021	2022	2023	2024	2025																																																																																															
85,1	86,4	91,2	92,1	92,1																																																																																															
88,8%	89,2%	90,9%	92,8%	92,8%																																																																																															
2021	2022	2023	2024	2025																																																																																															
88,8%	89,2%	90,9%	92,8%	92,8%																																																																																															
2021	2022	2023	2024	2025																																																																																															
25,48	25,46	25,47	25,47	25,47																																																																																															
2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%																																																																																															
2021	2022	2023	2024	2025																																																																																															
2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%																																																																																															
2021	2022	2023	2024	2025																																																																																															
2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%																																																																																															
2021	2022	2023	2024	2025																																																																																															
2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%																																																																																															
<table border="1"> <tr><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th></tr> <tr><td>85,1</td><td>86,4</td><td>91,2</td><td>92,1</td><td>92,1</td></tr> <tr><td>88,8%</td><td>89,2%</td><td>90,9%</td><td>92,8%</td><td>92,8%</td></tr> </table>					2021	2022	2023	2024	2025	85,1	86,4	91,2	92,1	92,1	88,8%	89,2%	90,9%	92,8%	92,8%	<table border="1"> <tr><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th></tr> <tr><td>88,8%</td><td>89,2%</td><td>90,9%</td><td>92,8%</td><td>92,8%</td></tr> </table>					2021	2022	2023	2024	2025	88,8%	89,2%	90,9%	92,8%	92,8%	<table border="1"> <tr><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th></tr> <tr><td>25,48</td><td>25,46</td><td>25,47</td><td>25,47</td><td>25,47</td></tr> <tr><td>2,0%</td><td>2,0%</td><td>2,0%</td><td>2,0%</td><td>2,0%</td></tr> </table>					2021	2022	2023	2024	2025	25,48	25,46	25,47	25,47	25,47	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	<table border="1"> <tr><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th></tr> <tr><td>2,0%</td><td>2,0%</td><td>2,0%</td><td>2,0%</td><td>2,0%</td></tr> </table>					2021	2022	2023	2024	2025	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	<table border="1"> <tr><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th></tr> <tr><td>2,0%</td><td>2,0%</td><td>2,0%</td><td>2,0%</td><td>2,0%</td></tr> </table>					2021	2022	2023	2024	2025	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	<table border="1"> <tr><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th></tr> <tr><td>2,0%</td><td>2,0%</td><td>2,0%</td><td>2,0%</td><td>2,0%</td></tr> </table>					2021	2022	2023	2024	2025	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%
2021	2022	2023	2024	2025																																																																																															
85,1	86,4	91,2	92,1	92,1																																																																																															
88,8%	89,2%	90,9%	92,8%	92,8%																																																																																															
2021	2022	2023	2024	2025																																																																																															
88,8%	89,2%	90,9%	92,8%	92,8%																																																																																															
2021	2022	2023	2024	2025																																																																																															
25,48	25,46	25,47	25,47	25,47																																																																																															
2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%																																																																																															
2021	2022	2023	2024	2025																																																																																															
2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%																																																																																															
2021	2022	2023	2024	2025																																																																																															
2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%																																																																																															
2021	2022	2023	2024	2025																																																																																															
2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%																																																																																															
<table border="1"> <tr><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th></tr> <tr><td>85,1</td><td>86,4</td><td>91,2</td><td>92,1</td><td>92,1</td></tr> <tr><td>88,8%</td><td>89,2%</td><td>90,9%</td><td>92,8%</td><td>92,8%</td></tr> </table>					2021	2022	2023	2024	2025	85,1	86,4	91,2	92,1	92,1	88,8%	89,2%	90,9%	92,8%	92,8%	<table border="1"> <tr><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th></tr> <tr><td>88,8%</td><td>89,2%</td><td>90,9%</td><td>92,8%</td><td>92,8%</td></tr> </table>					2021	2022	2023	2024	2025	88,8%	89,2%	90,9%	92,8%	92,8%	<table border="1"> <tr><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th></tr> <tr><td>25,48</td><td>25,46</td><td>25,47</td><td>25,47</td><td>25,47</td></tr> <tr><td>2,0%</td><td>2,0%</td><td>2,0%</td><td>2,0%</td><td>2,0%</td></tr> </table>					2021	2022	2023	2024	2025	25,48	25,46	25,47	25,47	25,47	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	<table border="1"> <tr><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th></tr> <tr><td>2,0%</td><td>2,0%</td><td>2,0%</td><td>2,0%</td><td>2,0%</td></tr> </table>					2021	2022	2023	2024	2025	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	<table border="1"> <tr><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th></tr> <tr><td>2,0%</td><td>2,0%</td><td>2,0%</td><td>2,0%</td><td>2,0%</td></tr> </table>					2021	2022	2023	2024	2025	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	<table border="1"> <tr><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th></tr> <tr><td>2,0%</td><td>2,0%</td><td>2,0%</td><td>2,0%</td><td>2,0%</td></tr> </table>					2021	2022	2023	2024	2025	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%
2021	2022	2023	2024	2025																																																																																															
85,1	86,4	91,2	92,1	92,1																																																																																															
88,8%	89,2%	90,9%	92,8%	92,8%																																																																																															
2021	2022	2023	2024	2025																																																																																															
88,8%	89,2%	90,9%	92,8%	92,8%																																																																																															
2021	2022	2023	2024	2025																																																																																															
25,48	25,46	25,47	25,47	25,47																																																																																															
2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%																																																																																															
2021	2022	2023	2024	2025																																																																																															
2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%																																																																																															
2021	2022	2023	2024	2025																																																																																															
2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%																																																																																															
2021	2022	2023	2024	2025																																																																																															
2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%																																																																																															
<table border="1"> <tr><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th></tr> <tr><td>85,1</td><td>86,4</td><td>91,2</td><td>92,1</td><td>92,1</td></tr> <tr><td>88,8%</td><td>89,2%</td><td>90,9%</td><td>92,8%</td><td>92,8%</td></tr> </table>					2021	2022	2023	2024	2025	85,1	86,4	91,2	92,1	92,1	88,8%	89,2%	90,9%	92,8%	92,8%	<table border="1"> <tr><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th></tr> <tr><td>88,8%</td><td>89,2%</td><td>90,9%</td><td>92,8%</td><td>92,8%</td></tr> </table>					2021	2022	2023	2024	2025	88,8%	89,2%	90,9%	92,8%	92,8%	<table border="1"> <tr><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th></tr> <tr><td>25,48</td><td>25,46</td><td>25,47</td><td>25,47</td><td>25,47</td></tr> <tr><td>2,0%</td><td>2,0%</td><td>2,0%</td><td>2,0%</td><td>2,0%</td></tr> </table>					2021	2022	2023	2024	2025	25,48	25,46	25,47	25,47	25,47	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	<table border="1"> <tr><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th></tr> <tr><td>2,0%</td><td>2,0%</td><td>2,0%</td><td>2,0%</td><td>2,0%</td></tr> </table>					2021	2022	2023	2024	2025	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	<table border="1"> <tr><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th></tr> <tr><td>2,0%</td><td>2,0%</td><td>2,0%</td><td>2,0%</td><td>2,0%</td></tr> </table>					2021	2022	2023	2024	2025	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	<table border="1"> <tr><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th></tr> <tr><td>2,0%</td><td>2,0%</td><td>2,0%</td><td>2,0%</td><td>2,0%</td></tr> </table>					2021	2022	2023	2024	2025	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%
2021	2022	2023	2024	2025																																																																																															
85,1	86,4	91,2	92,1	92,1																																																																																															
88,8%	89,2%	90,9%	92,8%	92,8%																																																																																															
2021	2022	2023	2024	2025																																																																																															
88,8%	89,2%	90,9%	92,8%	92,8%																																																																																															
2021	2022	2023	2024	2025																																																																																															
25,48	25,46	25,47	25,47	25,47																																																																																															
2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%																																																																																															
2021	2022	2023	2024	2025																																																																																															
2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%																																																																																															
2021	2022	2023	2024	2025																																																																																															
2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%																																																																																															
2021	2022	2023	2024	2025																																																																																															
2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%																																																																																															
<table border="1"> <tr><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th></tr> <tr><td>85,1</td><td>86,4</td><td>91,2</td><td>92,1</td><td>92,1</td></tr> <tr><td>88,8%</td><td>89,2%</td><td>90,9%</td><td>92,8%</td><td>92,8%</td></tr> </table>					2021	2022	2023	2024	2025	85,1	86,4	91,2	92,1	92,1	88,8%	89,2%	90,9%	92,8%	92,8%	<table border="1"> <tr><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th></tr> <tr><td>88,8%</td><td>89,2%</td><td>90,9%</td><td>92,8%</td><td>92,8%</td></tr> </table>					2021	2022	2023	2024	2025	88,8%	89,2%	90,9%	92,8%	92,8%	<table border="1"> <tr><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th></tr> <tr><td>25,48</td><td>25,46</td><td>25,47</td><td>25,47</td><td>25,47</td></tr> <tr><td>2,0%</td><td>2,0%</td><td>2,0%</td><td>2,0%</td><td>2,0%</td></tr> </table>					2021	2022	2023	2024	2025	25,48	25,46	25,47	25,47	25,47	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	<table border="1"> <tr><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th></tr> <tr><td>2,0%</td><td>2,0%</td><td>2,0%</td><td>2,0%</td><td>2,0%</td></tr> </table>					2021	2022	2023	2024	2025	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	<table border="1"> <tr><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th></tr> <tr><td>2,0%</td><td>2,0%</td><td>2,0%</td><td>2,0%</td><td>2,0%</td></tr> </table>					2021	2022	2023	2024	2025	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	<table border="1"> <tr><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th></tr> <tr><td>2,0%</td><td>2,0%</td><td>2,0%</td><td>2,0%</td><td>2,0%</td></tr> </table>					2021	2022	2023	2024	2025	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%
2021	2022	2023	2024	2025																																																																																															
85,1	86,4	91,2	92,1	92,1																																																																																															
88,8%	89,2%	90,9%	92,8%	92,8%																																																																																															
2021	2022	2023	2024	2025																																																																																															
88,8%	89,2%	90,9%	92,8%	92,8%																																																																																															
2021	2022	2023	2024	2025																																																																																															
25,48	25,46	25,47	25,47	25,47																																																																																															
2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%																																																																																															
2021	2022	2023	2024	2025																																																																																															
2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%																																																																																															
2021	2022	2023	2024	2025																																																																																															
2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%																																																																																															
2021	2022	2023	2024	2025																																																																																															
2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%																																																																																															
<table border="1"> <tr><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th></tr> <tr><td>85,1</td><td>86,4</td><td>91,2</td><td>92,1</td><td>92,1</td></tr> <tr><td>88,8%</td><td>89,2%</td><td>90,9%</td><td>92,8%</td><td>92,8%</td></tr> </table>					2021	2022	2023	2024	2025	85,1	86,4	91,2	92,1	92,1	88,8%	89,2%	90,9%	92,8%	92,8%	<table border="1"> <tr><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th></tr> <tr><td>88,8%</td><td>89,2%</td><td>90,9%</td><td>92,8%</td><td>92,8%</td></tr> </table>					2021	2022	2023	2024	2025	88,8%	89,2%	90,9%	92,8%	92,8%	<table border="1"> <tr><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th></tr> <tr><td>25,48</td><td>25,46</td><td>25,47</td><td>25,47</td><td>25,47</td></tr> <tr><td>2,0%</td><td>2,0%</td><td>2,0%</td><td>2,0%</td><td>2,0%</td></tr> </table>					2021	2022	2023	2024	2025	25,48	25,46	25,47	25,47	25,47	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	<table border="1"> <tr><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th></tr> <tr><td>2,0%</td><td>2,0%</td><td>2,0%</td><td>2,0%</td><td>2,0%</td></tr> </table>					2021	2022	2023	2024	2025	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	<table border="1"> <tr><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th></tr> <tr><td>2,0%</td><td>2,0%</td><td>2,0%</td><td>2,0%</td><td>2,0%</td></tr> </table>					2021	2022	2023	2024	2025	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	<table border="1"> <tr><th>2021</th><th>2022</th><th>2023</th><th>2024</th><th>2025</th></tr> <tr><td>2,0%</td><td>2,0%</td><td>2,0%</td><td>2,0%</td><td>2,0%</td></tr> </table>					2021	2022	2023	2024	2025	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%
2021	2022	2023	2024	2025																																																																																															
85,1	86,4	91,2	92,1	92,1																																																																																															
88,8%	89,2%	90,9%	92,8%	92,8%																																																																																															
2021	2022	2023	2024	2025																																																																																															
88,8%	89,2%	90,9%	92,8%	92,8%																																																																																															
2021	2022	2023	2024	2025																																																																																															
25,48	25,46	25,47	25,47	25,47																																																																																															
2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%																																																																																															
2021	2022	2023	2024	2025																																																																																															
2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%																																																																																															
2021	2022	2023	2024	2025																																																																																															
2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%																																																																																															
2021	2022	2023	2024	2025																																																																																															
2,0%	2,0%	2,0%	2,0%	2,0%																																																																																															



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

மாகალ பரதாசிபாதுகா அமைச்சு

Jl. Lingkar Selatan, Malangan, Giwangan Umbulharjo Yogyakarta Kode Pos: 55163
Telp. (0274) 4396955 HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id
EMAIL: pertanianpangan@jogjakota.go.id WEBSITE: pertanian.jogjakota.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ir. SUYANA

Jabatan : Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta
selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : SUMADI, SH., MH.

Jabatan : Pj. Walikota Yogyakarta

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Yogyakarta, 09 JAN 2023

Pihak Kedua

SUMADI, SH., MH.
NIP. 196308261989031007

Pihak Pertama

Ir. SUYANA
NIP. 196309101990031008

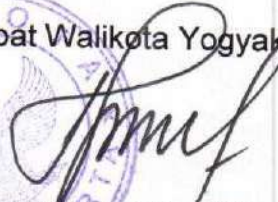
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KOTA YOGYAKARTA**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Angka Konsumsi Pangan	Angka Konsumsi Pangan	90,4 poin
2.	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Pertanian dan Pangan	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	80,5

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Rp 609.642.000	APBD TA 2023
2.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp 1.054.575.108	APBD TA 2023
3.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp 94.691.336	APBD TA 2023
4.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp 243.447.220	APBD TA 2023
5.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp 768.386.168	APBD TA 2023
6.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp 130.447.500	APBD TA 2023
7.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp 1.336.134.530	APBD TA 2023
8.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp 954.395.520	APBD TA 2023
9.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp 5.250.000	APBD TA 2023
10.	Program Penyuluhan Pertanian	Rp 730.784.500	APBD TA 2023
11.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp 125.300.575	APBD TA 2023
12.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 11.555.038.719	APBD TA 2023
Jumlah Anggaran		Rp 17.608.093.176	

Yogyakarta, 09 JAN 2023

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan
Kota Yogyakarta

Penjabat Walikota Yogyakarta

SUMADI, SH., MH.
NIP. 196308261989031007


Ir. SUYANA
NIP. 196309101990031008



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Wahana Kemandirian Pangan Masyarakat

Jl. Lingkar Selatan, Malangan, Giwangan Umbulharjo Yogyakarta Kode Pos: 55163
Telp. (0274) 4396955 HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id
EMAIL: pertanianpangan@jogjakota.go.id WEBSITE: pertanian.jogjakota.go.id

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUKIDI, S.E., M.Si.

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan
selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : SINGGIH RAHARJO, S.H., M.Ed

Jabatan : Pj. Wali Kota Yogyakarta
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Yogyakarta, 01 NOV 2023

Pihak Kedua,

SINGGIH RAHARJO, S.H., M.Ed.

Pihak Pertama,

SUKIDI S.E., M.Si.
NIP. 19661061992031005

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KOTA YOGYAKARTA**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Angka Konsumsi Pangan	Angka Konsumsi Pangan	90.4 poin
2.	Meningkatnya Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	89.47 %
3.	Meningkatnya Angka konsumsi ikan	Angka konsumsi ikan	35,46 Kg/Kapita/ Tahun
4.	Meningkatnya Persentase kenaikan kelas kelompok tani	Persentase kenaikan kelas kelompok tani	3.99 %
5.	Meningkatnya Persentase penurunan jumlah kasus penyakit hewan menular strategis	Persentase penurunan jumlah kasus penyakit hewan menular strategis	- 11.82 %
6.	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Pertanian dan Pangan	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	A Nilai

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 12.500.010.117	APBD Perubahan
2.	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Rp 609.642.000	APBD Perubahan
3.	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp 1.045.825.108	APBD Perubahan
4.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp 94.691.336	APBD Perubahan
5.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp 251.747.220	APBD Perubahan
6.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp 855.289.168	APBD Perubahan
7.	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp 127.247.500	APBD Perubahan
8.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp 69.845.000	APBD Perubahan
9.	Program Penyuluhan Pertanian	Rp 813.294.500	APBD Perubahan
10.	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp 1.046.535.320	APBD Perubahan

No	Program	Anggaran	Keterangan
11.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp 1.461.074.530	APBD Perubahan
12.	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp 150.080.575	APBD Perubahan
Jumlah Anggaran		Rp 19.025.282.374	

Pj. Wali Kota Yogyakarta



SINGGIH RAHARJO, S.H., M.Ed.

Yogyakarta, 01 NOV 2023

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan,



SUKIDI, S.E., M.Si.

NIP. 196811061992031005



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
Wibala Pertanian dan Pangan

Jl. Lingkar Selatan, Malangan, Giwangan Umbulharjo Yogyakarta Kode Pos: 55163
Telp. (0274) 4396955 HOTLINE SMS: 08122780001 HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id
EMAIL: pertanianpangan@jogjakota.go.id WEBSITE: pertanian.jogjakota.go.id

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SUKIDI, S.E., M.Si.

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan
selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : SINGGIH RAHARJO, S.H., M.Ed

Jabatan : Pj. Wali Kota Yogyakarta
selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Yogyakarta, 1 Oktober 2023

Pihak Kedua,



[Signature]
SINGGIH RAHARJO, S.H., M.Ed.

Pihak Pertama,



[Signature]
SUKIDI, S.E., M.Si.
NIP. 196817061992031005

**REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KOTA YOGYAKARTA**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Angka Konsumsi Pangan	Angka Konsumsi Pangan	90.4 poin
2.	Meningkatnya Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	89.47 %
3.	Meningkatnya Angka konsumsi ikan	Angka konsumsi ikan	35,46 Kg/Kapita/ Tahun
4.	Meningkatnya Persentase kenaikan kelas kelompok tani	Persentase kenaikan kelas kelompok tani	3.99 %
5.	Meningkatnya Persentase penurunan jumlah kasus penyakit hewan menular strategis	Persentase penurunan jumlah kasus penyakit hewan menular strategis	- 11.82 %
6.	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Pertanian dan Pangan	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	80.5 poin

No	Program	Anggaran		Keterangan
1.	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Rp	609.642.000	APBD TA 2023
2.	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp	1.054.575.108	APBD TA 2023
3.	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp	94.691.336	APBD TA 2023
4.	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp	243.447.220	APBD TA 2023
5.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Rp	768.386.168	APBD TA 2023
6.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Rp	130.447.500	APBD TA 2023
7.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp	1.336.134.530	APBD TA 2023
8.	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp	954.395.520	APBD TA 2023
9.	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp	5.250.000	APBD TA 2023
10.	Program Penyuluhan Pertanian	Rp	730.784.500	APBD TA 2023

No	Program	Anggaran		Keterangan
11.	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp	125.300.575	APBD TA 2023
12.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	11.555.038.719	APBD TA 2023
Jumlah Anggaran		Rp	17.608.093.176	

Yogyakarta, 1 Oktober 2023

Pj. Wali Kota Yogyakarta

Kepala Dinas Pertanian dan Pangan,





 SINGGIH RAHARJO, S.H., M.Ed.





 SUKIDI, S.E., M.Si.
 NIP. 196511061992031005

**PENGUKURAN KINERJA
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
TAHUN 2023**

No	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Target Tahun 2023	Capaian Kinerja Triwulan IV			Keterangan	Program	Indikator Program	Target Tahun 2023	Capaian Kinerja Triwulan IV			Anggaran Tahun 2023	Capaian Anggaran Triwulan IV			Perangkat Kerja Pengampu
				Target	Realisasi	%					Target	Realisasi	%		Anggaran	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Meningkatnya Angka Konsumsi Pangan	Angka Konsumsi Pangan	90.4 poin	90,4 poin	91,2 poin	100.88		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Angka Ketersediaan Energi		2611.9	2745.31	105.11	1.045.825.108,00	1.054.575.108,00	1.044.646.150,00	99,06	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
								PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penurunan wilayah rawan pangan prioritas 2		3	0	0	94.691.336,00	94.691.336,00	94.475.500,00	99,77	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
								PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Peningkatan persentase kawasan yang dikembangkan menjadi kawasan pangan lestari		28.88	28.88	100	609.642.000,00	609.642.000,00	607.832.000,00	99,70	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
2	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Pertanian dan Pangan	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	80.5 poin	A poin	A poin	100.00		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan		A	A	NAN	12.500.010.117,00	11.599.169.019,00	11.870.451.046,00	102,34	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
3	Meningkatnya Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	89.47 %	89.47 %	93.41 %	104.40		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Peningkatan persentase unit usaha bidang kesehatan hewan yang terbina dan terawasi		61,76	100	163.93	1.461.074.530,00	1.336.134.530,00	1.431.055.500,00	107,10	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
								PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Peningkatan Persentase pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan yang yang diawasi		26.55	26.55	100	251.747.220,00	243.447.220,00	248.235.000,00	101,97	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
4	Meningkatnya Angka konsumsi ikan	Angka konsumsi ikan	35,46 Kg/Kapita/Tahun	35,46 Kg/Kapita/Tahun	35.89 Kg/Kapita/Tahun	101.21		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Peningkatan Persentase kelompok pembudidaya ikan yang yang berizin		1.27	3.10	244.09	855.289.168,00	768.386.168,00	853.161.300,00	111,03	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
								PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase pengolah dan pemasar hasil perikanan yang berizin		40	40	100	127.247.500,00	130.447.500,00	127.008.500,00	97,36	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
5	Meningkatnya Persentase penurunan jumlah kasus penyakit hewan menular strategis	Persentase penurunan jumlah kasus penyakit hewan menular strategis	-11.82 %	-11.82 %	-68,18 %	576.81		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan persentase varietas tanaman buah yang telah bersertifikat		2.06	2.06	100	1.046.535.320,00	954.395.520,00	1.041.841.690,00	109,16	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
									Persentase petani tanaman pangan yang telah memenuhi prosedur penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida sesuai aturan		100	100	100					
								PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Peningkatan persentase unit usaha bidang kesehatan hewan yang terbina dan terawasi		61,76	100	163.93	1.461.074.530,00	1.336.134.530,00	1.431.055.500,00	107,10	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
								PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase zoonosis prioritas yang terkendali		100%	100%	100	150.080.575,00	125.300.575,00	149.959.775,00	119,68	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
6	Meningkatnya Persentase kenaikan kelas kelompok tani	Persentase kenaikan kelas kelompok tani	3.99 %	3.99 %	5.80 %	145.36		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan persentase varietas tanaman buah yang telah bersertifikat		2.06	2.06	100	1.046.535.320,00	954.395.520,00	1.041.841.690,00	109,16	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
								PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan bina kelompok tani		21.74	26.45	121.67	813.294.500,00	730.784.500,00	808.762.043,00	110,67	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

**PENGUKURAN KINERJA
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN
TAHUN 2023**

No	Sasaran Daerah	Indikator Sasaran Daerah	Target Tahun 2023	Capaian Kinerja Triwulan IV			Keterangan	Program	Indikator Program	Target Tahun 2023	Capaian Kinerja Triwulan IV			Anggaran Tahun 2023	Capaian Anggaran Triwulan IV			Perangkat Kerja Pengampu
				Target	Realisasi	%					Target	Realisasi	%		Anggaran	Realisasi	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
								PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Peningkatan jumlah prasarana pertanian yang dapat beroperasi dengan baik sesuai fungsinya		22	22	100	69.845.000,00	5.250.000,00	69.229.900,00	1.318,66	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

Faktor Pendorong:

- =>-Masyarakat kooperatif dalam wawancara konsumsi pangan. -Terdapat peningkatan konsumsi pangan dari 9 kelompok pangan yaitu padi-padian, umbi-umbian, pangan hewani, minyak/lemak, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, sayur/buah dan lain-lain (aneka bumbu dan bahan minuman).
- =>Sudah menyusun rencana aksi RB general maupun tematik serta realisasinya
- =>-Masyarakat dan pelaku usaha antusias dalam mengikuti pembinaan dan sosialisasi keamanan pangan -Pelaku usaha memiliki antusias untuk taat aturan terkait perijinan usaha penjualan daging -Pelaku usaha yang secara mandiri menginginkan pengawasan dan pengujian secara berkala -Pelaku usaha kooperatif dengan petugas monitoring
- =>-Kegiatan sosialisasi Gemar Ikan sudah dilaksanakan sebanyak 10 kali di SD Negeri wilayah Kota Yogyakarta -Antusias masyarakat mengikuti bimtek olahan ikan karena menu olahan menarik dan inovatif -Siswa SD sangat antusias dan interaktif mengikuti sosialisasi Gemarikan
- =>-Berbagai kegiatan yang diselenggarakan Dinas sepe

Uraian Permasalahan:

- =>Perbedaan bulan pengambilan sampel dapat berpengaruh pada konsumsi masyarakat yang diwawancarai, sehingga bulan yang dipilih bukan saat bulan puasa atau mendekati HBKN.
- =>
- =>-Pelaku usaha perikanan berkurang dan beralih ke usaha lain. -Pasar Sentul belum mendukung dalam segi higien sanitasi untuk produk PAH dan perikanan. -Rendahnya pelaku usaha PSAT (Pangan Segar Asal Tumbuhan) yang melakukan pengemasan mandiri dan registrasi PSAT. -Beberapa pelaku usaha terdampak relokasi pasar berdampak pada keterbatasan pemilihan target jumlah pelaku usaha
- =>-
- =>Tidak semua anggota kelompok tani dapat mengikuti kegiatan yang diselenggarakan Dinas dikarenakan terdapat keterbatasan kuota pembinaan (maksimal 20 orang per bimtek)
- =>-Perubahan cuaca ekstrim menyebabkan daya tahan tubuh hewan menurun -Kesadaran masyarakat terkait surat keterangan kesehatan hewan masih rendah -Waktu untuk bertemu dengan pelaku usaha tidak bisa fleksibel, beberapa pelaku usaha tidak memiliki media komunikasi elektronik.

Rencana Tindak Lanjut:

- =>- Fenomena penurunan konsumsi beras memang dijumpai di beberapa kelurahan, namun demikian jika tidak diikuti upaya penambahan asupan pangan sumber karbohidrat lain (i.e. umbi-umbian) akan berdampak pada menurunnya skor PPH. Oleh karenanya upaya pemanfaatan pangan berbasis umbi-umbian menjadi jalan keluar ketika konsumsi beras menurun. - Perlu ada peningkatan ragam pangan olahan yang berbahan baku umbi-umbian dan disukai masyarakat Kota Yogyakarta. Harapan ke depan persoalan sumber pangan karbohidrat non beras (umbi-umbian) dapat diwujudkan melalui program lumbung hidup sumber pangan karbohidrat (ie : gadung, uwi, mbili dll) yang dikembangkan bersamaan dengan program Kampung Sayur dan Kampung Pangan Lestari.
- =>
- =>- Menambah pembinaan, sosialisasi dan bimtek yang kaitannya dengan registrasi PSAT
- =>-
- =>- Menjalani kemitraan dengan perusahaan benih, perusahaan pupuk, perguruan tinggi - Menambah jumlah bimtek - Optimalisasi Penyuluh Swadaya dalam transfer knowledge pada kelompok tani
- =>

Yogyakarta,

Kepala

SUKIDI, S.E.,M.Si.
NIP. 196811061992031005

**MATRIKS TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2022
DINAS PERTANIAN DAN PANGAN**

No.	Rekomendasi LHE 2022	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Status/Progress Penyelesaian
1	Melaksanakan reviu terhadap penetapan tujuan/indikator tujuan dan sasaran/ indikator kinerja sasaran sehingga meningkatkan kualitas RENSTRA dengan memperhatikan kerangka logis penjenjangan kinerja (analogical framework) dan critical success factor (CFS) dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.	Akan dilakukan reviu terhadap penetapan tujuan/indikator tujuan serta sasaran/indikator sasaran perangkat daerah dengan mengevaluasi ulang cascading/pohon kinerja sesuai dengan pedoman Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.	Tahun 2023	Juni-Juli 2023	- Sekretaris Dinas - Kasubag Keuangan PEP	Telah dilakukan reviu terhadap penetapan tujuan/indikator tujuan serta sasaran/indikator sasaran perangkat daerah dengan mengevaluasi ulang cascading/pohon kinerja, melalui Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 261 Tahun 2023 tentang Penetapan Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta
2	Melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal sesuai dengan pedoman Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.	Untuk evaluasi akuntabilitas kinerja yang akan datang akan dilakukan sesuai dengan pedoman Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.	Tahun 2023	Oktober - Desember 2023	- Sekretaris Dinas - Kasubag Keuangan PEP	Sedang dilakukan pencermatan terhadap Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan saat ini dalam proses penyusunan sistem penilaian mandiri internal OPD (LKE) untuk evaluasi kinerja OPD sesuai dengan peraturan tersebut. Untuk tindak lanjut pelaksanaan masih menunggu Sosialisasi PermenPAN-RB Nomor 88 Tahun 2021 tersebut dari Inspektorat.

Yogyakarta, Agustus 2023

Kepala Dinas



No	No. dan Tgl LHE	Rekomendasi	Keterangan Tindak Lanjut
			<ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pertanian dan Pangan dalam proses melengkapi Kepwal perbaikan kinerja tersebut dan menyusun reviu kinerja sesuai dengan tahapan-tahapan kerangka logis penjurangan kinerja melalui <i>Analogical framework</i> (kerangka logis kinerja) dan <i>critical success factor</i> (CSF) sembari menunggu sosialisasi Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 89 Tahun 2021 Tentang Penjurangan Kinerja Instansi Pemerintah dari Inspektorat.
		Melaksanakan evaluasi akuntabilitas internal sesuai dengan pedoman Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> - Saat ini Dinas Pertanian dan Pangan sedang mempelajari PermenPAN-RB Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Penjurangan Kinerja Instansi Pemerintah secara mandiri, sembari menunggu sosialisasi dari Inspektorat. - Dinas Pertanian telah menyusun Lembar Kerja untuk penilaian secara mandiri secara elektronik (online) yang menurut rencana akan mulai digunakan untuk melaksanakan evaluasi akuntabilitas secara internal untuk SAKIP tahun mendatang.
	Jumlah	2	

Demikian Berita Acara hasil monitoring Tindak Lanjut Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023 ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pimpinan Auditi

Yogyakarta, Oktober 2023
a.n Pimpinan APIP,
Tim Pemantauan


Suki H. SE, MSi
NIP. 19681061992031005

(Yohanna Purnomo Sari, S.T., M.Eng)
NIP. 197411042005012005

SEGORO AMARTO
SEMANGAT GOTONG ROYONG AGAWE MAJUNE NGAYOGYAKARTA
KEDISIPLINAN – KEPEDULIAN SOSIAL – GOTONG ROYONG - KEMANDIRIAN



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 261 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN PERBAIKAN KINERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023-2026
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta, diperlukan adanya perbaikan kinerja Perangkat Daerah melalui penetapan dan penyesuaian target dan indikator kinerja baru bagi Perangkat Daerah Tahun 2023-2026;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah tahun 2023-2026 di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang;
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN PERBAIKAN KINERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023-2026 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA.

KESATU : Menetapkan Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dengan rincian indikator kinerja dan target kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

- KEDUA : Perbaiki Kinerja sebagaimana tercantum pada Diktum KESATU mencakup:
- a. hasil reviu kinerja sasaran daerah sebagai indikator kinerja utama pada Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026;
 - b. hasil reviu kinerja sasaran perangkat daerah sebagai indikator kinerja utama perangkat daerah; dan
 - c. hasil reviu kinerja program pada Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.
- KETIGA : Perbaiki Kinerja sebagaimana tercantum pada Diktum KESATU digunakan untuk:
- a. perencanaan jangka menengah;
 - b. perencanaan tahunan;
 - c. penetapan kinerja;
 - d. pemantauan, pengendalian, dan pengukuran kinerja;
 - e. evaluasi kinerja; dan
 - f. pelaporan akuntabilitas kinerja.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 26 Juni 2023
Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

SINGGIH RAHARJO



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 261 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN PERBAIKAN KINERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023-2026
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta, diperlukan adanya perbaikan kinerja Perangkat Daerah melalui penetapan dan penyesuaian target dan indikator kinerja baru bagi Perangkat Daerah Tahun 2023-2026;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah tahun 2023-2026 di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang - Undang;
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN PERBAIKAN KINERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023-2026 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA.
- KESATU : Menetapkan Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta dengan rincian indikator kinerja dan target kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

- KEDUA : Perbaiki Kinerja sebagaimana tercantum pada Diktum KESATU mencakup:
- a. hasil reviu kinerja sasaran daerah sebagai indikator kinerja utama pada Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026;
 - b. hasil reviu kinerja sasaran perangkat daerah sebagai indikator kinerja utama perangkat daerah; dan
 - c. hasil reviu kinerja program pada Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026.
- KETIGA : Perbaiki Kinerja sebagaimana tercantum pada Diktum KESATU digunakan untuk:
- a. perencanaan jangka menengah;
 - b. perencanaan tahunan;
 - c. penetapan kinerja;
 - d. pemantauan, pengendalian, dan pengukuran kinerja;
 - e. evaluasi kinerja; dan
 - f. pelaporan akuntabilitas kinerja.
- KEEMPAT : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 26 Juni 2023
Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

SINGGIH RAHARJO

Tabel Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah Periode 2023-2026
Kota Yogyakarta Tahun 2023

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)	Formula Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)	Target Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome) RPD					Perbaikan Target Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)					Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Data Capaian Awal Perencanaan	2023	2024	2025	2026	Data Capaian Awal Perencanaan	2023	2024	2025	2026	
		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	CPR (Contraceptive Prevalence Rate)	(Jumlah Pasangan Usia Subur ber KB / Jumlah Pasangan Usia Subur) x 100	-	50,70 %	51,00 %	51,30 %	51,60 %	-	50,70 %	51,00 %	51,30 %	51,60 %	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Persentase jumlah Kampung KB berkelanjutan	(Jumlah Kampung KB Berkelanjutan / Jumlah Kampung KB di Kota Yogyakarta) *100%	-	53,33 %	68,89 %	84,44 %	100 %	-	53,33 %	68,89 %	84,44 %	100 %	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
			Persentase pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmetneed)	((Jumlah Pasangan Usia Subur yang tidak ingin anak lagi + Jumlah Pasangan Usia Subur yang ingin anak ditunda) / Jumlah Pasangan Usia Subur) x 100	-	24,12 %	23,59 %	22,53 %	22 %	-	24,12 %	23,59 %	22,53 %	22 %	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Persentase kelompok kegiatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dengan stratifikasi paripurna	(Kelompok kegiatan bina keluarga sejahtera dengan stratifikasi paripurna / Kelompok kegiatan bina keluarga sejahtera di Kota Yogyakarta) *100%	-	5 %	6 %	7 %	8 %	-	5,03%	6,14%	7,19%	8,13%	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		Hasil penilaian reformasi birokrasi oleh Inspektorat	Hasil penilaian reformasi birokrasi oleh Inspektorat	77,79 poin	77,99 poin	78,19 poin	78,39 poin	78,59 poin	-	-	-	-	-	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Kategori hasil penilaian RB oleh Inspektorat	-	-	-	-	-	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	-	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Meningkatnya Angka Konsumsi Pangan	Meningkatnya Angka Konsumsi Pangan		Angka Konsumsi Pangan	Angka Konsumsi Pangan dihitung terhadap konsumsi energi dan protein secara agregat menggunakan standar Angka Kecukupan Gizi (AKG) dan Angka Kecukupan Protein (AKP) hasil Wdyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) XI tahun 2018.	89.7 poin	90.4 poin	91.2 poin	92.1 poin	93.1 poin	89.7 poin	90.4 poin	91.2 poin	92.1 poin	93.1 poin	Dinas Pertanian dan Pangan

Tabel Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah Periode 2023-2026
Kota Yogyakarta Tahun 2023

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)	Formula Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)	Target Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome) RPD					Perbaikan Target Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)					Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Data Capaian Awal Perencanaan	2023	2024	2025	2026	Data Capaian Awal Perencanaan	2023	2024	2025	2026	
		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	Peningkatan persentase kawasan yang dikembangkan menjadi kawasan pangan lestari	Jumlah kelurahan yang dikembangkan menjadi kawasan pangan lestari dibagi jumlah kelurahan di Kota Yogyakarta dikali 100%	-	28.88 %	37.78 %	46.67 %	55.56 %	-	28.88 %	37.78 %	46.67 %	55.56 %	Dinas Pertanian dan Pangan
		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Angka Ketersediaan Energi	Hasil analisa neraca bahan makanan	-	2611.9 kkal/kapita/hari	2616.9 kkal/kapita/hari	2621.9 kkal/kapita/hari	2626.9 kkal/kapita/hari	-	2611.9 kkal/kapita/hari	2616.9 kkal/kapita/hari	2621.9 kkal/kapita/hari	2626.9 kkal/kapita/hari	Dinas Pertanian dan Pangan
			Peningkatan persentase pemenuhan cadangan pangan Pemerintah Daerah	Jumlah cadangan pangan Pemerintah Daerah yang dikelola dibagi Jumlah cadangan pangan Pemerintah Daerah dikali 100%	-	54.21 %	69.46 %	84.71 %	100 %	-	54.21 %	69.46 %	84.71 %	100 %	Dinas Pertanian dan Pangan
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penurunan wilayah rawan pangan prioritas 2	Jumlah kelurahan yang rawan pangan prioritas 2	-	3 wilayah	2 wilayah	1 wilayah	0 wilayah	-	3 wilayah	2 wilayah	1 wilayah	0 wilayah	Dinas Pertanian dan Pangan
Meningkatnya Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Meningkatnya Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan		Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	Jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi di pedagang di Kota Yogyakarta sesuai standar yang berlaku dibagi jumlah total sampel pangan dikali 100 persen	-	-	-	-	-	88.00%	89.47%	90.94%	92.41%	93.88%	Dinas Pertanian dan Pangan

Tabel Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah Periode 2023-2026
Kota Yogyakarta Tahun 2023

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)	Formula Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)	Target Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome) RPD					Perbaikan Target Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)					Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Data Capaian Awal Perencanaan	2023	2024	2025	2026	Data Capaian Awal Perencanaan	2023	2024	2025	2026	
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Peningkatan Persentase pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan yang diawasi	Pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan yang diawasi dikali 100%	-	26.55 %	35.40 %	44.25 %	53.10 %	-	26.55 %	35.40 %	44.25 %	53.10 %	Dinas Pertanian dan Pangan
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase pelaku usaha pangan asal hewan dan perikanan yang diawasi	Jumlah pelaku usaha pangan asal hewan dan perikanan yang diawasi dibagi Jumlah pelaku usaha pangan asal hewan dan perikanan di Kota Yogyakarta	-	22.49 %	31.24 %	39.98 %	48.72 %	-	22.49 %	31.24 %	39.98 %	48.72 %	Dinas Pertanian dan Pangan
Meningkatnya Angka konsumsi ikan	Meningkatnya Angka konsumsi ikan		Angka konsumsi ikan	Angka konsumsi ikan berdasarkan hasil survei SUSENAS	-	-	-	-	-	35,43 Kg/Kapita/Tahun	35,46 Kg/Kapita/Tahun	35,49 Kg/Kapita/Tahun	35,52 Kg/Kapita/Tahun	35,55 Kg/Kapita/Tahun	Dinas Pertanian dan Pangan
		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Peningkatan Persentase kelompok pembudidaya ikan yang berizin	Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang berizin dibagi jumlah kelompok pembudidaya ikan di Kota Yogyakarta dikali 100%.	-	1.27 %	1.62 %	1.95 %	2.25 %	-	1.27 %	1.62 %	1.95 %	2.25 %	Dinas Pertanian dan Pangan
		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Peningkatan angka konsumsi ikan	angka konsumsi ikan berdasarkan SUSENAS	-	35.46 Kg/Kapita/Tahun	35.49 Kg/Kapita/Tahun	35.52 Kg/Kapita/Tahun	35.55 Kg/Kapita/Tahun	-	-	-	-	-	Dinas Pertanian dan Pangan

Tabel Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah Periode 2023-2026
Kota Yogyakarta Tahun 2023

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)	Formula Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)	Target Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome) RPD					Perbaikan Target Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)					Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Data Capaian Awal Perencanaan	2023	2024	2025	2026	Data Capaian Awal Perencanaan	2023	2024	2025	2026	
			Persentase pengolah dan pemasar hasil perikanan yang berizin	Jumlah pengolah dan pemasar hasil perikanan yang berizin dibagi jumlah pengolah dan pemasar hasil perikanan di Kota Yogyakarta dikali 100 persen	-	-	-	-	-	-	40.00%	52.38%	68.18%	82.61%	Dinas Pertanian dan Pangan
Meningkatnya Persentase kenaikan kelas kelompok tani	Meningkatnya Persentase kenaikan kelas kelompok tani		Persentase kenaikan kelas kelompok tani	Jumlah kelompok tani yang mengalami kenaikan kelas kelompok tani dibagi jumlah kelompok tani di Kota Yogyakarta dikali 100 persen	-	-	-	-	-	2.26%	3.99%	4.27%	4.55%	4.81%	Dinas Pertanian dan Pangan
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan persentase varietas tanaman buah yang telah bersertifikat	Jumlah varietas tanaman buah yang telah bersertifikasi dibagi jumlah varietas tanaman buah yang dimiliki dinas dikali 100%.	-	2.06 %	3.54 %	4.72 %	7.08 %	-	2.06 %	3.54 %	4.72 %	7.08 %	Dinas Pertanian dan Pangan
			Persentase petani tanaman pangan yang telah memenuhi prosedur penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida sesuai aturan	Jumlah petani tanaman pangan yang telah memenuhi prosedur penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida sesuai aturan dibagi jumlah petani tanaman pangan di Kota Yogyakarta dikali 100%	-	100 %	100 %	100 %	100 %	-	100 %	100 %	100 %	100 %	Dinas Pertanian dan Pangan
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Peningkatan jumlah prasarana pertanian yang dapat beroperasi dengan baik sesuai fungsinya	Jumlah prasarana pertanian yang dikelola dan beroperasi sesuai dengan baik sesuai fungsinya	-	22 unit	23 unit	24 unit	24 unit	-	22 unit	23 unit	24 unit	24 unit	Dinas Pertanian dan Pangan

Tabel Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah Periode 2023-2026
Kota Yogyakarta Tahun 2023

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)	Formula Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)	Target Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome) RPD					Perbaikan Target Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)					Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Data Capaian Awal Perencanaan	2023	2024	2025	2026	Data Capaian Awal Perencanaan	2023	2024	2025	2026	
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Cakupan bina kelompok tani	Jumlah kelompok tani yang dibina dibagi jumlah kelompok tani di Kota Yogyakarta dikali 100%	-	27.55 %	35.39 %	42.55 %	49.11 %	-	21.74%	24.91%	27.97%	49.11%	Dinas Pertanian dan Pangan
Meningkatnya Persentase penurunan jumlah kasus penyakit hewan menular strategis	Meningkatnya Persentase penurunan jumlah kasus penyakit hewan menular strategis		Persentase penurunan jumlah kasus penyakit hewan menular strategis	Jumlah kasus penyakit hewan menular strategis tahun berjalan dikurangi jumlah kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya dibagi jumlah kasus penyakit hewan menular strategis tahun sebelumnya (n-1) dikali 100 persen	-	-	-	-	-	-11.29%	-11.82%	-12.37%	-12.94%	-13.51%	Dinas Pertanian dan Pangan
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Peningkatan persentase Pengecer Obat Hewan yang terbina dan terawasi	Jumlah pengecer obat hewan yang dibina dan diawasi dibagi jumlah pengecer obat hewan di Kota Yogyakarta dikali 100%	-	41.67 %	50 %	58.33 %	66.67 %	-	41.67 %	50 %	58.33 %	66.67 %	Dinas Pertanian dan Pangan
		PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Peningkatan persentase unit usaha bidang kesehatan hewan yang terbina dan terawasi	Jumlah Unit Usaha Bidang kesehatan hewan yang terbina dan terawasi dibagi Unit Usaha Bidang Kesehatan Hewan dikali 100%	-	61.54 %	71.15 %	80.77 %	90.38 %	-	61.76 %	70.59 %	80.88 %	89.71 %	Dinas Pertanian dan Pangan
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase zoonosis prioritas yang terkendali	(Jumlah zoonosis prioritas yang terkendali dibagi jumlah zoonosis prioritas)x 100%	-	100 %	100 %	100 %	100 %	-	100 %	100 %	100 %	100 %	Dinas Pertanian dan Pangan

Tabel Perbaikan Kinerja Perangkat Daerah Periode 2023-2026
Kota Yogyakarta Tahun 2023

Tujuan	Sasaran	Program	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)	Formula Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)	Target Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome) RPD					Perbaikan Target Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, dan Program (Outcome)					Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Data Capaian Awal Perencanaan	2023	2024	2025	2026	Data Capaian Awal Perencanaan	2023	2024	2025	2026	
Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Pertanian dan Pangan	Meningkatnya Reformasi Birokrasi Dinas Pertanian dan Pangan		Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	80 poin	80.5 poin	81 poin	81.5 poin	82 poin	-	-	-	-	-	Dinas Pertanian dan Pangan
				Kategori hasil penilaian RB oleh Inspektorat	-	-	-	-	-	BB Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	Dinas Pertanian dan Pangan
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan	-	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	-	A Nilai	A Nilai	A Nilai	A Nilai	Dinas Pertanian dan Pangan
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	$IKLH = (0,376 \times IKA) + (0,405 \times IKU) + (0,219 \times IKL)$	54.47 %	54.66 %	55.19 %	55.47 %	55.87 %	54.47 %	54.66 %	55.19 %	55.47 %	55.87 %	Dinas Lingkungan Hidup
		PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Tercapainya Penyusunan dan Penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	$(\text{Jumlah Tercapainya Penyusunan dan Penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota} / (\text{Jumlah total Penyusunan dan Penetapan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota}) \times 100\%$	-	25 %	50 %	75 %	100 %	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup

REKAP CAPAIAN KINERJA SASARAN DAN ANGGARAN TAHUN 2023

No	Sasaran Strategis	Kinerja								Anggaran			Bidang
		Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2022	Target RKPD 2023	Target Renstra	Realisasi 2023	% capaian RKPD 2023	% capaian Renstra	Target	Realisasi	% capaian	
1	Meningkatnya Angka Konsumsi Pangan	Angka Konsumsi Pangan	poin	89,7	90,4	93,1	91,2	100,88%	97,96%	1.750.158.444	1.746.953.650	99,82%	Pangan
2	Meningkatnya Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	%	88	89,47	93,88	93,41	104,40%	99,50%	968.120.650	936.862.150	96,77%	Pangan
3	Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan	Angka konsumsi ikan	Kg/kapita/tahun	35,43	35,46	35,55	35,89	101,21%	100,96%	982.536.668	980.169.800	99,76%	Perikanan dan Kehewananan
4	Meningkatnya Persentase Kenaikan Kelas Kelompok Tani	Persentase kenaikan kelas kelompok tani	%	2,26	3,99	4,81	5,80	145,36%	120,58%	1.913.853.500	1.904.405.933	99,51%	Pertanian
5	Meningkatnya Persentase Penurunan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis	Persentase penurunan jumlah kasus penyakit hewan menular strategis	%	-11,29	-11,82	-13,51	-68,18	576,82%	504,66%	910.602.995	907.815.825	99,69%	Perikanan dan Kehewananan
6	Meningkatnya Reformasi Birokrasi	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	nilai	BB	A	A	A	100%	100%	12.500.010.117	11.870.451.046	94,96%	Sekretariat

REKAP CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2023

No	Sasaran Strategis	Kinerja		Kinerja								Anggaran		
		Indikator Kinerja	Program Pendukung	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2022	Target RKPDPD 2023	Target Renstra	Realisasi 2023	% capaian RKPDPD 2023	% capaian Renstra	Target	Realisasi	% capaian
1	Meningkatnya Angka Konsumsi Pangan	Angka Konsumsi Pangan	Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Peningkatan persentase kawasan yang dikembangkan menjadi kawasan pangan lestari	%	26,67	28,88	55,56	28,88	100,00%	51,98%	609.642.000	607.832.000	99,70%
			Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Angka Ketersediaan Energi	kkal/kapita/hari	2607	2611,9	2626,9	2745,31	105,11%	104,51%	574.063.108	573.531.500	99,91%
				Peningkatan persentase pemenuhan cadangan pangan Pemerintah Daerah	%	38,96	54,21	100	54,21	100,00%	54,21%	471.762.000	471.114.650	99,86%
			Penanganan Kerawanan Pangan	Penurunan wilayah rawan pangan prioritas 2	wilayah	0	3	0	0	0,00%	100,00%	94.691.336	94.475.500	99,77%
2	Meningkatnya Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan	Pengawasan Keamanan Pangan	Peningkatan Persentase pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan yang diawasi	%		26,55	53,1	26,55	100,00%	50,00%	251.747.220	248.235.000	98,60%
			Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Peningkatan persentase pelaku usaha pangan asal hewan dan perikanan yang diawasi	%		22,49	48,72	22,49	100,00%	46,16%	716.373.430	688.627.150	96,13%
3	Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan	Angka konsumsi ikan	Pengelolaan Perikanan Budidaya	Peningkatan Persentase kelompok pembudidaya ikan yang berizin	%		1,27	2,25	3,1	244,09%	137,78%	855.289.168	853.161.300	99,75%
			Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase pengolah dan pemasar hasil perikanan yang berizin	%		40	82,61	40	100,00%	48,42%	127.247.500	127.008.500	99,81%

No	Sasaran Strategis	Kinerja	Program Pendukung	Kinerja								Anggaran		
		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2022	Target RKPD 2023	Target Renstra	Realisasi 2023	% capaian RKPD 2023	% capaian Renstra	Target	Realisasi	% capaian
4	Meningkatnya Persentase Kenaikan Kelas Kelompok Tani	Persentase kenaikan kelas kelompok tani	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase petani tanaman pangan yang telah memenuhi prosedur penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida sesuai aturan	%	100	100	100	100	100,00%	100,00%	11.712.700	11.144.390	95,15%
				Peningkatan persentase varietas tanaman buah yang telah bersertifikat	%		2,06	7,08	2,06	100,00%	29,10%	1.019.001.300	1.015.269.600	99,63%
			Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Peningkatan jumlah prasarana pertanian yang dapat beroperasi dengan baik sesuai fungsinya	unit		22	24	22	100,00%	91,67%	69.845.000	69.229.900	99,12%
			Penyuluhan Pertanian	Cakupan bina kelompok tani	%		21,74	49,11	26,45	121,67%	53,86%	813.294.500	808.762.043	99,44%
5	Meningkatnya Persentase Penurunan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis	Persentase penurunan jumlah kasus penyakit hewan menular strategis	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Peningkatan persentase Pengecer Obat Hewan yang terbina dan terawasi	%		41,67	50	66,67	160,00%	133,34%	15.821.320	15.427.700	97,51%
			Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Peningkatan persentase unit usaha bidang kesehatan hewan yang terbina dan terawasi	%		61,76	89,71	100	161,92%	111,47%	744.701.100	742.428.350	99,69%
			Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase zoonosis prioritas yang terkendali	%	100	100	100	100	100,00%	100,00%	150.080.575	149.959.775	99,92%
6	Meningkatnya Reformasi Birokrasi	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan	nilai	A	A	A	A	100,00%	100,00%	12.500.010.117	11.870.451.046	94,96%

REKAP CAPAIAN KINERJA SUB KEGIATAN DAN ANGGARAN TAHUN 2023

No	Sasaran Strategis	Kinerja	Program Pendukung	Kinerja	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Bidang	
		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja			Indikator Kinerja	Satuan	Target Output	Realisasi	% capaian	Perubahan	Realisasi		% capaian
1	Meningkatnya Angka Konsumsi Pangan	Angka Konsumsi Pangan	Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Peningkatan persentase kawasan yang dikembangkan menjadi kawasan pangan lestari	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia	unit	10	10	100%	609.642.000	607.832.000	99,70%	Pangan
			Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Angka Ketersediaan Energi	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	laporan	13	13	100%	109.126.824	109.112.000	99,99%	Pangan
						Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	laporan	2	2	100%	454.733.820	454.227.500	99,89%	Pangan
						Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	laporan	12	12	100%	10.202.464	10.192.000	99,90%	Pangan
				Peningkatan persentase pemenuhan cadangan pangan Pemerintah Daerah	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	laporan	2	2	100%	71.410.000	70.906.000	99,29%	Pangan
						Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	ton	18,3	18,3	100%	192.150.000	192.150.000	100,00%	Pangan
					Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	dokumen	1	1	100%	60.730.000	60.586.650	99,76%	Pangan
						Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	laporan	1	1	100%	147.472.000	147.472.000	100,00%	Pangan
			Penanganan Kerawanan Pangan	Penurunan wilayah rawan pangan prioritas 2	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan	dokumen	1	1	100%	94.691.336	94.475.500	99,77%	Pangan
2	Meningkatnya Persentase Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan	Pengawasan Keamanan Pangan	Peningkatan Persentase pelaku usaha pangan segar asal tumbuhan yang diawasi	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina	dokumen	1	1	100%	93.442.290	91.509.100	97,93%	Pangan
						Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	1	1	100%	23.222.930	22.991.300	99,00%	Pangan

No	Sasaran Strategis	Kinerja		Kegiatan	Sub Kegiatan	Kinerja					Anggaran			Bidang	
		Indikator Kinerja	Program Pendukung			Indikator Kinerja	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja	Satuan	Target Output	Realisasi	% capaian	Perubahan		Realisasi
					Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	dokumen	1	1	100%	135.082.000	133.734.600	99,00%	Pangan	
			Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Peningkatan persentase pelaku usaha pangan asal hewan dan perikanan yang diawasi	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	laporan	24	24	100%	404.579.830	385.716.700	95,34%	Pangan
					Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	laporan	24	24	100%	311.793.600	302.910.450	97,15%	Pangan	
3	Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan	Angka konsumsi ikan	Pengelolaan Perikanan Budidaya	Peningkatan Persentase kelompok pembudidaya ikan yang berizin	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan	kelompok	71	71	100%	134.678.000	134.678.000	100,00%	Perikanan dan Kehewananan
					Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	kelompok	6	6	100%	263.615.818	262.833.500	99,70%	Perikanan dan Kehewananan	
					Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	unit	3	3	100%	456.995.350	455.649.800	99,71%	Perikanan dan Kehewananan
			Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Persentase pengolahan dan pemasar hasil perikanan yang berizin	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	unit usaha	19	19	100%	127.247.500	127.008.500	99,81%	Perikanan dan Kehewananan
4	Meningkatnya Persentase Kenaikan Kelas Kelompok Tani	Persentase kenaikan kelas kelompok tani	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase petani tanaman pangan yang telah memenuhi prosedur penggunaan pupuk bersubsidi dan pestisida sesuai aturan	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	laporan	4	4	100%	11.712.700	11.144.390	95,15%	Pertanian

No	Sasaran Strategis	Kinerja	Program Pendukung	Kinerja	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Bidang	
		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja			Indikator Kinerja	Satuan	Target Output	Realisasi	% capaian	Perubahan	Realisasi		% capaian
				Peningkatan persentase varietas tanaman buah yang telah bersertifikat	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	VUB	317	317	100%	971.288.800	970.016.600	99,87%	Pertanian
						Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	dokumen	3	3	100%	47.712.500	45.253.000	94,85%	Pertanian
			Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Peningkatan jumlah prasarana pertanian yang dapat beroperasi dengan baik sesuai	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	unit	12	12	100%	69.845.000	69.229.900	99,12%	Pertanian
			Penyuluhan Pertanian	Cakupan bina kelompok tani	Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	unit	1	1	100%	131.704.500	131.599.500	99,92%	Pertanian
						Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya	unit	3	3	100%	631.310.000	627.012.543	99,32%	Pertanian
						Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	unit	48	48	100%	50.280.000	50.150.000	99,74%	Pertanian
5	Meningkatnya Persentase Penurunan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular Strategis	Persentase penurunan jumlah kasus penyakit hewan menular strategis	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Peningkatan persentase unit usaha bidang Pengecer Obat Hewan yang terbina dan terawasi	Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	unit usaha	25	25	100%	15.821.320	15.427.700	97,51%	Perikanan dan Kehewan
			Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Peningkatan persentase kesehatan hewan yang terbina dan terawasi	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	laporan	4	4	100%	63.302.150	62.778.200	99,17%	Perikanan dan Kehewan
						Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	laporan	12	12	100%	315.561.500	315.527.700	99,99%	Perikanan dan Kehewan
						Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Pemenuhan Persyaratan Teknis yang Ditetapkan	laporan	12	12	100%	365.837.450	364.122.450	99,53%	Perikanan dan Kehewan
			Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase zoonosis prioritas yang terkendali	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	Jumlah Wilayah Penanggulangan Bencana Non Alam yang Bersifat Zoonosis	laporan	4	4	100%	150.080.575	149.959.775	99,92%	Perikanan dan Kehewan

No	Sasaran Strategis	Kinerja		Program Pendukung	Kinerja	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Bidang
		Indikator Kinerja	Indikator Kinerja					Indikator Kinerja	Satuan	Target Output	Realisasi	% capaian	Perubahan	Realisasi	
6	Meningkatnya Reformasi Birokrasi	Hasil Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi oleh Inspektorat	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Hasil penilaian SAKIP oleh Inspektorat untuk Dinas Pertanian dan Pangan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	3	3	100%	5.812.500	5.799.950	99,78%	Sekretariat
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	1	1	100%	680.000	672.500	98,90%	Sekretariat
						Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen	1	1	100%	680.000	679.800	99,97%	Sekretariat
						Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen	1	1	100%	680.000	672.000	98,82%	Sekretariat
						Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	dokumen	1	1	100%	680.000	675.000	99,26%	Sekretariat
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	12	12	100%	3.780.000	3.776.750	99,91%	Sekretariat
						Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	4	4	100%	6.340.000	6.331.000	99,86%	Sekretariat
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	95	95	100%	9.839.399.425	9.228.389.269	93,79%	Sekretariat
						Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	dokumen	12	12	100%	39.072.000	39.072.000	100,00%	Sekretariat
						Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	dokumen	12	12	100%	725.000	724.500	99,93%	Sekretariat

No	Sasaran Strategis	Kinerja	Program Pendukung	Kinerja	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Bidang	
		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja			Indikator Kinerja	Satuan	Target Output	Realisasi	% capaian	Perubahan	Realisasi		% capaian
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	laporan	1	1	100%	1.627.500	1.617.000	99,35%	Sekretariat
						Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	dokumen	1	1	100%	650.000	645.000	99,23%	Sekretariat
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	laporan	12	12	100%	2.185.000	2.169.100	99,27%	Sekretariat
						Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	dokumen	1	1	100%	375.000	372.000	99,20%	Sekretariat
					Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	dokumen	1	1	100%	450.000	450.000	100,00%	Sekretariat
						Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	dokumen	2	2	100%	950.000	945.000	99,47%	Sekretariat
						Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	12	12	100%	3.740.000	3.740.000	100,00%	Sekretariat
						Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	laporan	2	2	100%	860.000	860.000	100,00%	Sekretariat
						Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	dokumen	2	2	100%	1.360.000	1.360.000	100,00%	Sekretariat
					Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	dokumen	2	2	100%	1.600.000	1.593.000	99,56%	Sekretariat
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	1	1	100%	23.193.650	23.181.650	99,95%	Sekretariat
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	4	4	100%	54.930.292	54.630.100	99,45%	Sekretariat

No	Sasaran Strategis	Kinerja	Program Pendukung	Kinerja	Kegiatan	Sub Kegiatan	Kinerja				Anggaran			Bidang	
		Indikator Kinerja		Indikator Kinerja			Indikator Kinerja	Satuan	Target Output	Realisasi	% capaian	Perubahan	Realisasi		% capaian
						Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	1	1	100%	22.372.750	21.839.000	97,61%	Sekretariat
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	2	2	100%	11.647.500	11.646.500	99,99%	Sekretariat
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	dokumen	2	2	100%	2.160.000	1.680.000	77,78%	Sekretariat
						Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	83	83	100%	109.870.000	109.801.931	99,94%	Sekretariat
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	16	16	100%	18.200.000	15.760.000	86,59%	Sekretariat
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	11	11	100%	44.130.300	44.130.300	100,00%	Sekretariat
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	12	100%	6.600.000	2.850.162	43,18%	Sekretariat
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	4	4	100%	1.600.599.200	1.598.899.584	99,89%	Sekretariat
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	1	1	100%	28.050.000	27.879.200	99,39%	Sekretariat
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	unit	29	29	100%	247.840.000	242.543.100	97,86%	Sekretariat
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	64	64	100%	53.770.000	52.650.650	97,92%	Sekretariat
						Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	unit	5	5	100%	365.000.000	362.415.000	99,29%	Sekretariat

PIAGAM PENGHARGAAN



Piagam Penghargaan sebagai Peringkat 3
Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kategori Eselon 2 Tahun 2021



Piagam Penghargaan sebagai Peringkat 2
Capaian Kinerja Perangkat Daerah Kategori Eselon 2 Tahun 2022